Riwayat Penulis

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.



Sejak mahasiswa, DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., sudah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa STKS Bandung (1993), Pengurus Pusat dan Ketua Badan Mandiri Kerjasama Mahasiswa di Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), dan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Karena kepiawaiannya dalam memimpin, sejak tahun 2010 hingga sekarang Taufik dipercaya menjadi Ketua IKA STKS, Bandung dan menjadi Pengurus IKA Universitas Padjajaran Bandung mulai 2009-2014. Kegemarannya berorganisasi akhirnya membawa dirinya mengenal lebih jauh dunia luar melalui dunia pers. Mungkin itu sebabnya pria berusia 44 tahun ini aktif di dunia pemberitaan dengan duduk di Presidium Forum Pers Mahasiswa Bandung (1995) dan menjadi pemimpin majalah kampus Altruist STKS, Bandung (1994). Di dunia pendidikan, ayah tiga anak ini bukanlah sosok yang mudah berpuas diri dengan hanya meraih satu gelar kesarjanaan. Usai menamatkan pendidikan di STKS tahun 1996, Taufik kemudian masuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung untuk mengambil gelar Sarjana Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial yang berhasil dirampungkannya pada tahun 1998. Selanjutnya, Taufik pun menempuh pendidikan pasca sarjana di universitas yang sama dan berhasil mendapat gelar Magister Ilmu-ilmu Sosial Konsentrasi di Bidang Ilmu Pemerintahan pada tahun 2005. Di samping itu, Taufik juga melakoni dunia pendidikan non formal di antaranya Pendidikan dan Penataran P4 Pola 200 Jam, Pendidikan Singkat Jurnalistik DR. Supomo tahun 2006, Pendidikan Pemetaan dan Surveyor Diploma Satu di Institut Teknologi Bandung, serta Pendidikan dan Pelatihan Singkat dari Kanwil Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Pemahaman HAM bagi Ormas dan OKP. Seiring waktu berjalan, Taufik mulai memasuki dunia kerja dengan bekerja sebagai Tim Koordinasasi dan Kosultasi Konflik Maluku Di Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan. Menjadi Tim Koordinasi dan Konsultasi Konflik Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Ketua Angkatan Pendidikan dan Tim Perumus Materi Pendidikan Bela Negara di Departemen Pertahanan, Pengajar di Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSM) PUSDIKLAT Departemen Sosial RI, Ketua Yayasan Pusat Studi Kemasyarakatan (PSK) Bandung, Direktur Operasi Yayasan Semesta Jakarta, Direktur Operasional Yayasan LEIMA Bandung, Staff Ahli dan Fraksi FPBB MPR RI khusus menangani Pers dan Dekumentasi, dan menjadi Dosen Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama).

Pengalamannya yang segudang, akhirnya 'menyeret' seorang Taufiqurokhman masuk dunia politik dengan menjadi Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Cendikiawan Nasional Indonesia (PCNI, menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Organisasi dan Keanggotaan Trisula Nusantara, Ketua Forum Peduli Sosial, Sekretaris Jenderal Badan Pengkaderan Nasional Kosgoro, dan menjadi pengurus di DPP Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPPSI). Sikap aktif dan proaktif-nya di dunia politik inilah, akhirnya yang membawa Taufik benar-benar terjun sebagai pelaku politik dengan menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi Banten. Bahkan karena kepiawaiannya di dunia tersebut membuat Taufik dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten 2009 – 2011 dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten tahun 2011-2014, dan menjadi Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten. Bahkan Taufik juga pernah dipercaya menjadi Ketua Seksi Acara Persidangan Kongres DPP Partai Demokrat Tahun 2010 Bandung dan Ketua Seksi Materi dan Seksi Acara di Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) Partai Demokrat Cipanas Bogor, Jawa Barat Tahun 2008. Kini, di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, pembicara, dan pelaku politik yang aktif di partai Taufik yang berhasil meraih gelar doktor (doktoral S3) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung ini juga mulai sibuk menulis berbagai buku dan aktif membangun berbagai organisasi yang bertujuan untuk memberi peluang pada generasi muda untuk turut memajukan bangsa Indonesia.

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers



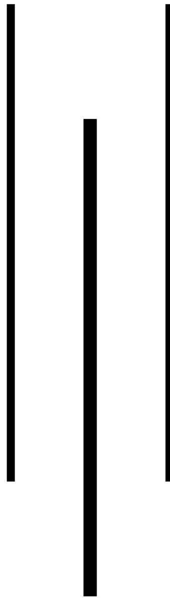
DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

KEBIJAKAN PUBLIK

PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

PENERBIT
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Moestopo Beragama Pers
ISBN 602-9006-07-0

KEBIJAKAN PUBLIK



PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pengarang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEBIJAKAN PUBLIK

PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Cetakan Pertama Tahun 2014

Penulis : DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si.
Kata Pengantar : H. Teuku Riefky Harsya, MT.
: **Prof. DR. H. Sunarto, Msi**
DR. Andriansyah, M.Si.

Penerbit : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Moestopo Beragama (Pers)
Jl. Hang Lekir I No. 8, Senayan, Jakarta Pusat, 10270
Telp: (021) 7220269, 7252682, 7395333 Fax: 7252682

ISBN: 602-9006-07-0

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

KEBIJAKAN PUBLIK

PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Daftar Isi



KEBIJAKAN PUBLIK

PENDELEGASIAN TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

KATA PENGANTAR

Ketika saya diminta untuk membuat kata pengantar pada buku Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan yang ditulis oleh DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., maka bolehlah saya meminjam pendapat Thomas R. Dye yang menyebutkan 'Is whatever goverments choose to or not to do'. Menurut saya, kebijakan yang diambil oleh seorang presiden dalam hal ini Presiden RI, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus tetap dilakukan. Itu artinya, tidak mudah bagi seorang presiden dalam membuat kebijakan.

Apa pun kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang kepala negara, bisa dipastikan akan berpengaruh pada masyarakat terlebih yang langsung bersinggungan dengan harkat hidup orang banyak. Jadi, sangat dibutuhkan kehati-hatian, kepekaan, dan sikap empati yang tinggi dari seorang presiden untuk menelurkan sebuah kebijakan publik. Menurut saya, kebijakan publik merupakan hal yang senantiasa menyita perhatian publik. Kebijakan publik memang tidak serta merta muncul begitu saja. Kebijakan publik ada setelah melalui proses yang begitu panjang bahkan rumit. Demikian kompleksnya suatu permasalahan terkadang bisa memakan waktu berbulan bulan bahkan bertahun-tahun hingga akhirnya tercapai satu keputusan untuk membuat satu kebijakan.

Hal ini menjadi sebuah keniscayaan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh sekian banyak pemangku kepentingan atau stake holder. Tarik menarik kepentingan demikian hebatnya hingga masing-masing kelompok kepentingan dengan segala upaya berjuang agar kepentingannya dapat diakomodasi dalam kebijakan publik tersebut. Tak ayal segala carapun ditempuh oleh kelompok-kelompok kepentingan tersebut yang terkadang terkesan menghalalkan segala cara. Berbagai sarana dan media digunakan, mulai dari cara yang formal mupun informal, dari meja rapat hingga turun ke jalan.

Masyarakat diajak untuk berpikir bersama yang pada akhirnya dipengaruhi hingga sepakat dengan apa yang mereka teriakkan. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Kelompok ini harus terus berjuang. Karena di sisi jalan mereka juga terdapat kelompok yang demikian kerasnya ingin meneriakkan kepentingan. Di sisi jalan yang lainnya juga ada yang meneriakkan

kepentingan mereka yang ternyata berbeda dengan kelompok pertama. Mereka sama-sama ingin memperoleh simpati publik, bahwa apa yang mereka teriakan adalah teriakan mereka juga. Dan dengan harapan dalam bawah sadar masyarakat bahwa betul-betul di tengah mereka ada permasalahan yang tidak pernah tersentuh oleh pemerintah.

Penetrasi yang demikian terus menerus pada akhirnya menyadarkan setiap orang bahwa ada permasalahan yang belum terurus dengan baik dan muncullah apa yang dinamakan dengan awareness of a problem atau kesadaran akan adanya masalah tertentu. Melalui buku ini, saya berharap, semoga kita semua, khususnya seluruh stake holder, terutama kepala negara bisa lebih hati-hati dalam mengambil dan membuat satu kebijakan yang bersinggungan dengan publik.

H. Teuku Riefky Harsya, MT.
Ketua Komisi X DPR-RI Priode 2014-1019

PANDANGAN

Prof. DR. H. Sunarto, Msi

Kebijakan publik atau public policy yang diambil pemerintah di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah. Kebijakan publik menurut hemat saya adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya.

Selanjutnya, setelah kebijakan public dibuat, publik harus mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan atau dengan kata lain, apa persoalan yang ingin diselesaikan dan apa prioritasnya, apakah publik diperbolehkan memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yang akan dilahirkan.

Setelah itu, pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan

dibicarakan dan berpengaruh secara signifikan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum atau opini publik.

Menurut saya, dalam masyarakat autoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Di sinilah sangat dibutuhkan, kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi.

Adalah naif untuk mengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisa memuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang akan dijalankannya. Sebagai akademisi, saya sangat berharap jangan sampai ada lagi anggapan 'kebijakan dibuat untuk dilanggar', jangan sampai karena untuk kepentingan umum, kebijakan sulit dipercaya, atau untuk memenangkan kelompok tertentu.

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat dan seharusnyalah pemerintah tidak sungkan member pelayanan yang baik bagi masyarakatnya. Karena pemerintah ada bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah diambil, sebab *government organizations are created by the public, for the public, and need to be accountable to it.*

Prof. DR. H. Sunarto, Msi
Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

PANDANGAN

DR. Andriansyah, M.Si

Kebijakan Publik atau public policy kita ketahui merupakan aturan yang sudah ditetapkan dan harus ditaati. Bagi siapa yang melanggar akan mendapatkan sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi tersebut. Jadi, kebijakan publik ini bisa kita ibaratkan suatu hukum. Bukan hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan public, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bila melanggar akan mendapat sanksi. Namun begitu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar dikaji secara mendalam kebenarannya dan ketepatannya sehingga benar-benar efektif mengatasi permasalahan dan tidak justru menimbulkan berbagai persoalan baru.

Selain itu, faktor kemerdekaan pers yang membawa nuansa liberalisme yang kental, dan adanya kecenderungan selalu campur tangan pihak luar yang sangat berkepentingan agar pemerintah lemah dan bisa mudah ditekan. Menurut hemat kami, keberadaan pemuka agama juga sangat penting yang senantiasa mendampingi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan. Dengan demikian peran dan kontribusi pemuka agama dalam penguatan sinergisitas secara alamiah akan mengalami ini dengan sendirinya gerakan apapun yang sifatnya radikal dalam arti negatif dan anarkis.

Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah terhadap gerakan yang dianggap radikal dan anarkis, karena kedua istilah itu adalah istilah asing, maka sebagai pemerintah dari NKRI yang berdaulat, yang di dalam pembukaan UUD 1945 telah menyebut "bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak

sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan", maka seyogyanya pemerintah membebaskan diri dari segala tekanan asing yang melambangkan ketidak berdaulatan pemerintah atas negeri sendiri dan masih berlakunya penjajahan di atas dunia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan itu.

DR. Andriansyah, M.Si.
Wakil Rektor III
Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

PENGANTAR PENULIS

Ilmu kebijakan diarahkan kepada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan orientasi utama dari para ilmuwan kebijakan bukanlah pada tahapan proses pembuatan kebijakan, tetapi kepada permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Dan ilmu kebijakan merupakan multidisiplin ilmu yang model-modelnya, metode-metodenya, dan temuan-temuannya diarahkan kepada upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Sebelum menulis buku ini, saya tergelitik dengan komentar Riant Nugroho D., yang menyebutkan bahwa, bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mu¬dah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan.

Apa yang ditulis oleh Nugroho, benar adanya. Mengingat, kebijakan publik bersangkutan dengan politik. Nugroho juga menuliskan, kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu bagaimana merumuskan kebijakan publik, bagaimana kebijakan publik tersebut diim¬plementasikan, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

Nugroho juga menulis, dalam konteks formulasi, berbagai isu yang banyak beredar di tengah masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan.

Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan seperti, apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif yang cepat menarik perhatian masyarakat, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi, dan terakhir apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

Itu sebabnya, suatu kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Kebijakan-kebijakan publik yang dibuat pemerintah, dalam hal ini presiden selaku penyelenggara pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-perubahan di segala bidang, baik di dunia pendidikan demi tercapainya pelaksanaan pendidikan yang lebih baik, perubahan kebijakan di bidang ekonomi yang bertujuan agar tingkat ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, dan perubahan-perubahan kebijakan di berbagai sektor. Tujuannya hanya satu, demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kita semua berharap, presiden selaku penyelenggara pemerintahan, dalam membuat kebijakan sebaiknya jangan hanya mempertimbangkan apakah isu tersebut telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi, dan apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Tetapi sebaiknya, buatlah kebijakan yang memang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan memang sangat dibutuhkan masyarakat tanpa pandang bulu dan banyak pertimbangan.

Bab 1 (Satu)

PENGERTIAN KEBIJAKAN & KEBIJAKAN PUBLIK

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;

c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
i. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Setelah kita memahami beberapa konsep kebijakan menurut para ahli di atas sekarang kita akan mulai membahas lebih mendalam tentang kebijakan publik.

Pengertian Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publiksebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publikitu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2)◎ menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17).◎ mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: "Serangkaian keputusan kebijaksanan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat"

3. Kategori Kebijakan Publik

Ada banyak sekali pengkategorian kebijakan publik berikut ini kategori

kebijakan publik menurut beberapa ahli:

James E. Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a). Kebijakan substantif dan kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b).Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c). Kebijakan materal dan kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d). Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat (privat goods).

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:25-27), mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:

a).Tuntutan kebijakan (policy demands)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b). Keputusan kebijakan (policy decisions)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c). Pernyataan kebijakan (policy statements)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradialn, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat,tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d). Keluaran kebijakan (policy outputs)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e). Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992; 2-4).

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371 – 372): bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu ber-

jangka panjang dan menyeluruh.

Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan: (Ndraha 2003: 492-499); bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Meski demikian kata kebijakan yang berasal dari policy dianggap merupakan konsep yang relatif (Michael Hill, 1993: 8): The concept of policy has a particular status in the rational model as the relatively durable element against which other premises and actions are supposed to be tested for consistency.

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology dan adalah sistem nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijakan. Dalam merumuskan kebijakan Thomas R. Dye merumuskan model kebijakan antara lain menjadi: model kelembagaan, model elit, model kelompok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem.

Selanjutnya tercatat tiga model yang diusulkan Thomas R. Dye, yaitu: model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait dengan organisasi, kebijakan menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin (Terry, 1964:278).

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin,2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

suatu undang-undang.

Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh William N. Dunn (William N. Dunn, 2003: 89); Analisis Kebijakan (Policy Analysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam buku The Policy Process sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Selanjutnya Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai: (Michael Hill, 1993: 34); A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve.

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan "administrasi negara." Menurut Nigro dan Nigro dalam buku M. Irfan Islamy "Prinsip-prinsip Kebijakan Negara (Islamy, 2001:1), administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik.

Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program

dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (Abidin, 2004: 21) adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku "Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3); Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Sedangkan menurut Said Zainal Abidin, alumni University of Pittsburgh, Pennsylvania, US, (Said Zainal Abidin,2004: 23); kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan kebijakan publik merupakan suatu sistem nilai yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan dapat digambarkan sebagai berikut:

Riant Nugroho D., bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik (Nugroho, 2004:52). Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho 2004,100-105).

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar di dalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:

Apakah Isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?

Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian asyarakat?

Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?

Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?

Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?

Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

Namun dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

Efektivitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.

Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.

Adil – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Aktivitas analisis di dalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu di dalam kebijakan pub-

lik akan terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, maka akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini Ripley menyatakan (Randal B. Ripley, 1985: 31); Di dalam proses kebijakan telah termasuk di dalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama.

Pada praktik kebijakan publik antara lain mengembangkan mekanisme jaringan aktor (actor networks). Melalui mekanisme jaringan aktor telah tercipta jalur-jalur yang bersifat informal (second track), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecahkan.

Mark Considine memberi batasan jaringan aktor sebagai: (Mark Considine, 1994: 103); Keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara individu-individu dan kelompok-kelompok di dalam suatu sistem kebijakan.

Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting di dalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Di dalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan, karena memiliki relevansi dengan tema kajian.

A. Kerangka Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan publik walaupun merupakan bagian dari studi Ilmu Administrasi Negara, tetapi bersifat multi disipliner, karena banyak meminjam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Studi kebijakan publik mulai berkembang pada awal tahun 1970-an terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang Policy Sciences.

Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasikan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dievaluasi kebijakan. Isi materi kerangka kebijakan publik ini akan membahas konsep dan lingkup kebijakan publik, proses kebijakan publik, dan arti pentingnya studi kebijakan, lingkungan kebijakan, sistem kebijakan publik.

B. Konsep dan Lingkup Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever government choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak. James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Walaupun disadari bawa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks modul ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Dalam padangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengadung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

C. Arti Pentingnya Studi KebijakanPublik

Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik (Dye 1981, Anderson, 1979) dengan penjabaran sebagai berikut :

Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh (dependent variable), sehigga berusaha menentukan variabel pengaruhnya (independent variable). Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Misalnya, studi untuk mengidetifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya undang-undang anti terorisme di Indonesia.

Sebaliknya, studi kebijakan publik dapat menempatkan kebijakan publik sebagai independent variable, sehingga berusaha mengidintifikasi apa dampak dari sutau kebijakan publik. Sebagai contoh studi untuk menganalisis apa dampak dari kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah.

Meningkatkan Profesionalisme Praktisi

Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik. Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimanana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sehingga ke depan akan lahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan.

Berguna untuk tujuan politik

Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Sebaliknya kebijakan publik tersebut dapat meyakin kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. Kebijakan publik

sepertii itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik.

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni:

Pertama dikenal dengan istilah policy analysis, dan kedua political public policy (Hughes, 1994: 145). Pada pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (policy formation) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih.

Sedangkan pada pendekatan kedua, lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik dari pada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, di dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.

Pada pendekatan pertama, pendekatan kuantitatif digunakan dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar rasional menurut pertimbangan untung rugi. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang memberikan manfaat bersih paling optimal. Sayangnya, pendekatan matematika seperti ini kurang realistis dalam dunia kebijakan dan politik. Politik dan kebijakan terkadang kurang rasional dalam beberapa hal. Patton dan Sawicki (1986:25) menulis sebagai berikut:

If the rational model were to be followed, many rational decisions would have to be compromised because they were not politically feasible. A rational, logical, and technically desirable policy may not be adopted because the political system will not accepted it. The figures don't always speak for themselves, and good ideas do not always win out. Analysts and decision makers are constantly faced with the conflict between technically superior and politically feasible alternatives.

D. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

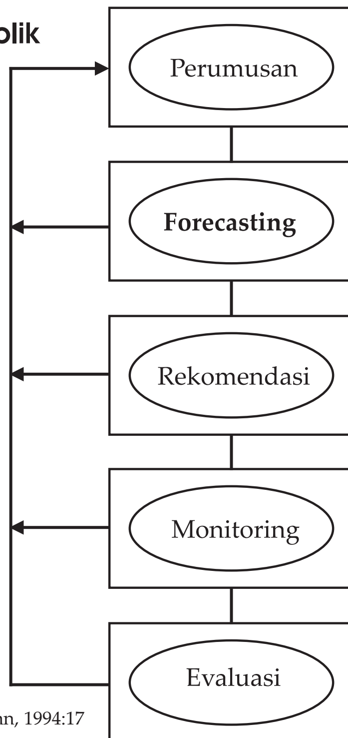
a. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai.
b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam

pembuatan kebijakan.
c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan.
d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik.
f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan sebagainya.

E. Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah

Gambar 1
Proses Kebijakan Publik



Sumber: William N. Dunn, 1994:17

aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Tabel 1

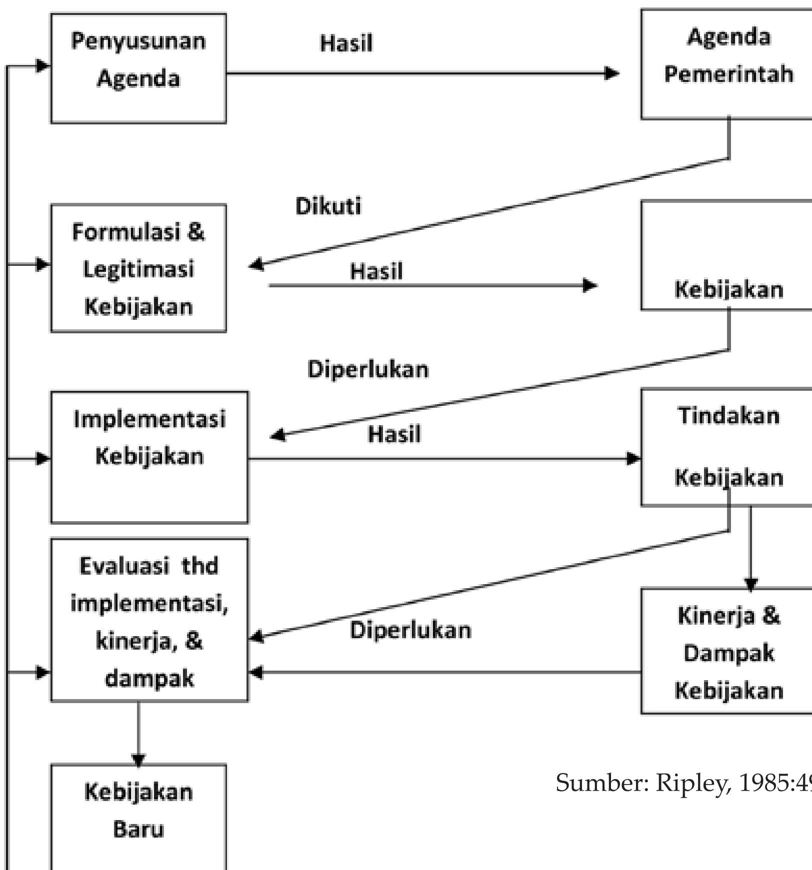
Tahap Analisis Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan Masalah	: Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Forecasting (Peramalan)	: Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
Rekomendasi Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarangdan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi Kebijakan	: Memberikan informasi mengenai kinerja

atau hasil dari suatu kebijakan

Dalam pandangan Ripley (1985), tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Tahapan Kebijakan Publik



Sumber: Ripley, 1985:49.

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni;

(1) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite poltik bukan dianggap sebagai masalah;

(2) Membuat batasan masalah;

(3) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

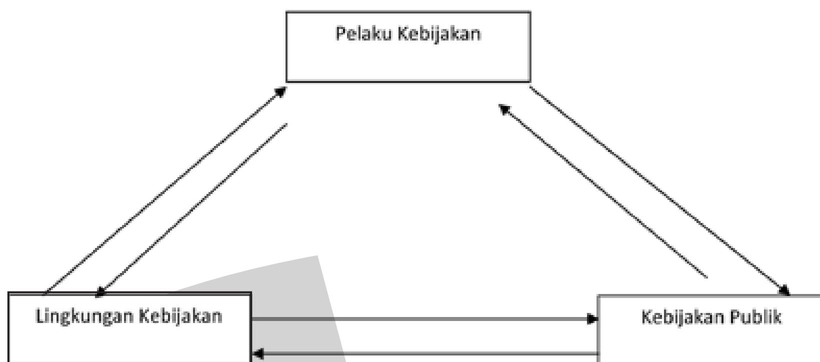
Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selajutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan lebih berhasil.

F. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengar-

uhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan publik untuk memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan. Misalnya kebijakan pengembangan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja, kebijakan penegakan hukum untuk mengatasi kriminalitas, kebijakan pengurangan pajak untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan keamanan untuk mengatasi kejolak politik. Gambar 3 mendeskripsikan hubungan antara tiga elemen yang terlibat dalam sebuah kebijakan.



Gambar 3
Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu bersamaan ada keterbatasan dan konstrain dari lingkungan yang akan membpengaruhi policy makers. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik geografi, seperti: sumberdaya alam, iklim, dan topografi; variabel demografi, seperti: banyaknya penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spesial; kebudayaan politik; struktur sosial; dan sistem ekonomi.

Dalam kasus tertentu, lingkungan international dan kebijakan internasional menjadi penting untuk dipertimbangkan (Anderson, 1979). Dalam pembahasan selanjutnya akan difokuskan ke dalam dua variabel lingkun-

gan, yakni variabel kebudayaan politik (political culture variable) dan variabel sosial ekonomi (socio economic variable).

Kebudayaan politik. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda, dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kebudayaan oleh seorang pakar Antropologi Clyde Kluckhohn didefinisikan sebagai the total life way of a people, the social legacy the individual acquires from his group.

Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kebudayaan masyarakat dapat membentuk atau mempengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang mencakup nilai, kepercayaan, dan sikap tentang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukannya, serta bagaimana menjalin hubungan dengan warganegaranya.

Kondisi sosial ekonomi. Kebijakan publik sering dipandang sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok dalam masyarakat, dan antara pemerintah dengan privat. Salah satu sumber konflik, khususnya di dalam masyarakat yang maju, adalah aktivitas ekonomi. Konflik dapat berkembang dari kepentingan berbeda antara perusahaan besar dan kecil, pemilik perusahaan dan buruh, debitor dan kreditor, kustomer dan penjual, petani dengan pembeli hasil-hasil pertanian, dan sebagainya. Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda di atas dapat dikurangi atau diselesaikan dengan kebijakan pemerintah dalam wujud perubahan ekonomi atau pembangunan.

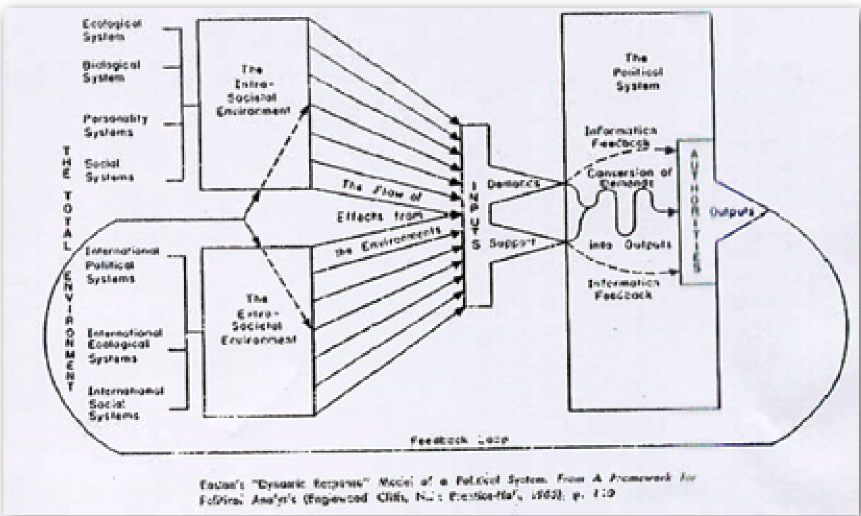
Kebijakan pemerintah dapat melindungi kelompok yang lemah, dan menciptakan keseimbangan hubungan antara kelompok yang berbeda. Industrialisasi yang cepat dan pertumbuhan berbagai kelompok bisnis besar yang terjadi di Amerika Serikat pada abad sembilan belas sebagai akibat dari tata ekonomi baru. Ini telah mendorong para petani, kalangan bisnis kecil, dan elemen-elemen reformist untuk menuntut pada pemerintah agar mengontrol kalangan bisnis besar.

Dalam pandangan seorang pakar politik David Easton sebagaimana di-

kutip oleh Anderson (1979) dan Dye (1981), kebijakan publik dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, konversi, dan output. Dalam konteks ini ada dua variabel makro yang mempengaruhi kebijakan pubik, yakni lingkungan domestik, dan lingkungan internasional (Gambar 4). Baik lingkungan domestik maupun lingkungan internasional/global dapat memberikan input yang berupa dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor dalam sistem politik akan memproses atau mengkonversi input tersebut menjadi output yang berwujud peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan tersebut akan diterima oleh mayarakat, selanjutnya masyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk input baru kepada sistem politik tersebut.

Apabila kebijakan tersebut memberikan insentif, maka masyarakat akan mendukungnya. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut bersifat dis-insentif, misalnya kenaikan bahan bakar minyak (BBN) atau pajak, maka masyarakat akan melakukan tuntutan baru, berupa tuntutan penurunan harga BBM dan penurunan pajak.

Gambar 4
Kebijakan Publik menurut Pendekatan Sistem



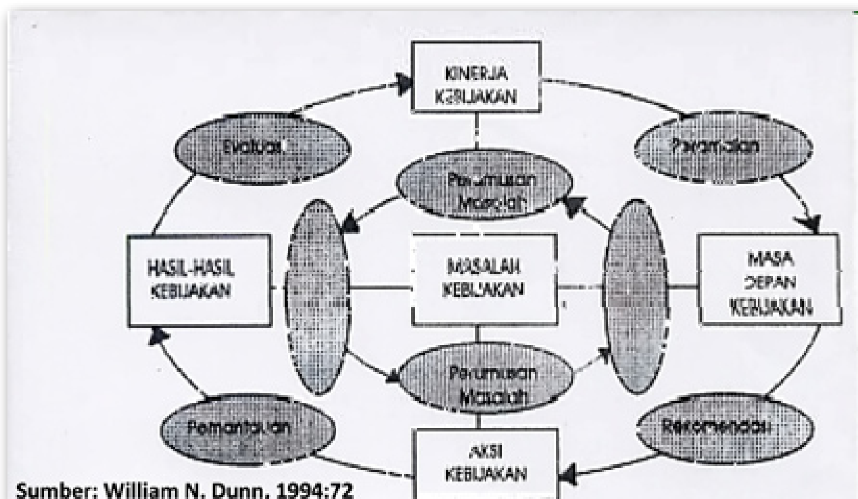
G. Sistem Kebijakan Publik

Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup lima komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.

Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan melahirkan aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan.

Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan, seperti dalam Gambar 5.

Gambar 5
Analisis Kebijakan



Sumber: William N. Dunn, 1994:72

BAB 2 (DUA)

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Perkembangan kebijakan publik berhubungan erat dengan pertumbuhan peradaban dari bangsa-bangsa yang memiliki kebebasan laut yang luas. Sehingga analisis kebijakan sebagai aktivitas yang terspesialisasi menyertai perubahan-perubahan di dalam organisasi sosial yang diikuti dengan bentuk-bentuk baru teknologi produksi dan pola pemukiman menetap.

Contoh dokumen terkuno dari analisis kebijakan publik ditemukan di Mesopotamia yang berupa pakta-pakta pemerintahan dan politik. Dokumen itu disebut kode Hammurabi yang ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad 18 sebelum masehi, yang mengekspresikan keinginan untuk membentuk ketertiban publik yang bersatu dan adil pada masa ketika babilonia mengalami transisi dari negara kecil menjadi negara wilayah yang luas.

Kode Hammurabi memiliki kesamaan dengan hukum Musa yang mencantumkan persyaratan-persyaratan ekonomi dan sosial untuk suatu pemukiman urban yang stabil di mana hak dan tanggungjawab didefinisikan menurut posisi sosial. Kode mencakup proses kriminal, hak milik, perdagangan hubungan keluarga dan perkawinan,dana kesehatan dan apa yang dikenal sekarang sebagai akuntabilitas publik.

Sejarah yang tertulis tentang para spesialis menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan dapat ditelusuri sampai abad keempat sebelum masehi. Di India, Arthashastra karya Kautilya, satu dari tuntunan-tuntunan awal tentang pembuatan kebijakan, keahlian bernegara dari administrasi pemerintahan, mensarikan apa yang telah ditulis sampai ketika itu (300 SM) mengenai materi yang saat ini disebut Ilmu Ekonomi.

Kautilya, yang mengabdi sebagai penasehat kerajaan Mauyan di India Utara, dapat dibandingkan dengan Plato (427-327 SM), Aristoteles (384- 322

SM), dan Machiavelli (1469-1527), kesemuanya secara mendalam terlibat dalam aspek-aspek praktis pembuatan kebijakan pemerintah selain pekerjaan mereka sebagai pemikir-pemikir sosial.

Plato mengabdi sebagai penasehat dari penguasa di Sisilia, sementara Aristoteles mengajar Alexander dari Macedonia sejak orang tersebut terakhir berusia 14 tahun sampai ia naik tahta pada usia 20 tahun. Aristoteles, seperti para pemikir sosial kontemporer, yang menemukan bahwa politik praktis menjijikkan, cenderung menerima kedudukan tersebut dengan harapan agar dapat menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah publik.

A. Perkembangan pada Abad Pertengahan

Ekspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kotasepanjang abad pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh strukturokupasi yang memudahkan pengembangan pengetahuan yang terspesialisasi. Berbagai kelompok spesialis kebijakan diangkat oleh para pemimpin untuk memberikan saran dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh para penguasa misalnya pengambilan keputusan yang efektif, keuangan, perang dan hukum.

Pertumbuhan ”Politisi Profesional”, memperoleh kedudukan yang berbeda di dunia. Di Eropa, India, Cina, Jepang dan Mongolia pada abad pertengahan para pendeta merupakan kelompok yang terpelajar, karena kelompok ini secara teknis sangat dibutuhkan. Para penulis yang terpelajar, yang pada zaman modern saat ini adalah penulis pidato presiden juga memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan.

Di Inggris para bangsawan rendahan dan para investor diangkat tanpa kompensasi untuk mengendalikan pemerintahan kota untuk kepentingan meraka sendiri. Pada akhirnya para ahli hukum ternama juga memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan.

B. Zaman Revolusi Industri

Pada zaman kuno dan pertengahan pertumbuhan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mengikuti evolusi peradaban. Namun ketika terjadi revolusi industri pertumbuhan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menjadi aktivitas yang relatif otonom dengan ciri khasnya sendiri dan dipi-

sahkan dengan kepentingan politik sehari-hari.

Zaman revolusi industri adalah masa dimana kepercayaan tentang perkembangan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih dominan di kalangan para pengambil kebijakan dan penasehatnya. Pada masa ini pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat secara bertahap mulai dilihat sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan sosial. Pengaruh mistik, klenik, dan sihir sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Mulai pada masa ini muncul pengetahuan yang relevan dengan kebijakan menurut ukuran empirisme dan metode ilmiah.

C. Perkembangan pada Abad ke-19

Pada abad 19 di Eropa mulai muncul generasi baru yang menghasilkan pengetahuan tentang kebijakan mulai mendasarkan efektivitas mereka pada dokumen data empiris yang sistematis. Pada masa ini perhatian terhadap pengumpulan fakta secara sistematis dapat diilustrasikan dengan beberapa cara. Misalnya dengan pengembangan statistik dan demografi sebagai bidang spesialisasi.

Pada masa itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhatikan secara khusus pada pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut diorganisir oleh para bankir, ilmuwan, industrialis yang berusaha mengganti cara berfikir lama dalam menghadapi masalah sosial dengan metode baru yang lebih sistematis.

Pada abad 19, metode untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan secara jelas mengalami perubahan dan transformasi yang besar. Pengetahuan mengenai alam dan masyarakat tidak lagi ditentukan menurut kesesuaiannya dengan otoritas, ritual dan prinsip-prinsip filsafat, tetapi dinilai berdasarkan konsistensinya dengan observasi empiris. Tetapi transformasi ini bukanlah merupakan hasil dari komitmen formal terhadap norma-norma empirisme dan metode ilmiah sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ketidakpastian yang datang bersama dengan transisi dari peradaban agraris ke industri.

Latar belakang analisis abad ke-19 dari analisis kebijakan kontemporer melanjutkan bagimana ilmu sosial terapan ditumpangi oleh tujuan kelom-

pok sosial yang dominan. Pengunaan ilmu untuk menemukan dan menguji hukum-hukum alam dan masyarakat dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai pengetahuan yang obyektif. Ilmu hanya dipandang sebagai alat untuk memproduksi pengetahuan.

Akibatnya, pertanyaan tentang tujuan dipandang sebagai nonrasional atau sebagai ekspresi yang sewenang-wenang dari kepentingan pribadi yang berada di luar batas penelitian ilmiah. Sehingga produksi pengetahuan yang terspesialisasi ditetapkan sebagai "ilmu".

D. Pemerintahan Kolonial Belanda di Nusantara

Setelah Napoleon dikalahkan oleh pasukan koalisi, Willem van Oranje kembali menjadi raja di negerinya. naik tahta sebagai Souverein vorst (1814), kemudian sebagai raja (1815). Berdasarkan Groundwet (konstitusi Kerajaan Belanda), kekuasaan tertinggi atas wilayah jajahan berada di tangan raja. Demikian pula dengan kekuasaan undang-undang.

Staten Generaal (parlemen) sama sekali tidak diikutsertakan di dalamnya. Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang Commissaris Generaal, yaitu C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan A.A. Buyskes, untuk mengambil alih jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Mereka diberikan kekuasaan besar mewakili Pemerintahan Agung (Raja). Sejak masa Commissaris Generaal inilah, sebutan Oost Indië, atau Hindia Timur, berganti menjadi Nederlandsch Oost Indië (Hindia Belanda Timur). Akan tetapi tidak lama kemudian nama tersebut berubah kembali menjadi Nederlandsch Indië (Hindia Belanda), seperti terlihat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1816.

Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawan adalah membangun kembali sistem pemerintahan yang baik di Hindia. Tujuannya agar daerah koloni ini segera dapat memberikan keuntungan kepada negeri induknya, yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utang VOC. Akan tetapi kondisi politik di Hindia Belanda yang belum sepenuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.

Perlu diketahui bahwa wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia Belanda itu pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukkan

VOC atau yang diklaim sebagai taklukkan VOC. Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung misalnya, tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukkan VOC. Akan tetapi Singapura dan Malaka termasuk Hindia Belanda karena bekas taklukkan VOC. Namun dalam perkembangannya kemudian wilayah Hindia Belanda mengalami banyak perubahan.

Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya, ada beberapa daerah taklukkan VOC yang menyatakan tidak terikat lagi oleh perjanjian dengan VOC yang telah runtuh. Sikap tersebut secara otomatis menyatakan bahwa mereka juga tidak terikat dengan negara kolonial Hindia Belanda.

Dalam dua dasawarsa pertama pendirian negara kolonial Hindia Belanda, paling tidak ada tiga perlawanan atau pemberontakan yang dinilai sangat mengganggu kewibawaannya, yaitu perlawanan Pattimura di Maluku; perlawanan Diponegoro (de Java oorlog) di Jawa; dan perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat.

Ada pun yang menjadi landasan operasional di Hindia Belanda diatur berdasarkan Regeering Reglement (Peraturan Pemerintah, disingkat RR). Menurut peraturan ini, dalam menjalankan tugasnya gubernur jenderal (anggota Commisaris Generaal) didampingi oleh Raad van Indië yang beranggotakan empat orang. Gubernur jenderal bersama Raad van Indië inilah yang disebut sebagai Pemerintahan Agung di Hindia Belanda.

Sejak tahun 1816, ada dua instansi yang membantu pekerjaan Pemerintahan Agung di Batavia ini, yaitu Generale Secretarie (sekretaris umum) untuk membantu Commisaris General dan Gouvernement Secretarie (sekretaris pemerintahan) untuk membantu Gubernur Jenderal. Namun kedua lembaga itu berumur pendek dan dihapuskan pada tahun 1819. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Algemene Secretarie, yang bertugas membantu gubernur jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hal-hal tertentu, struktur birokrasi pemerintahan Hindia Belanda sama dengan pemerintahan VOC. Adapun perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya berkaitan dengan kewenangan gubernur jenderal.

Apabila pada masa VOC tidak ada aturan khusus yang mengatur kewenangan gubernur jenderal, sehingga dia dapat berimprovisasi sendiri dalam menjalankan pemerintahannya, maka pada masa Hindia Belanda terdapat peraturan yang mengatur kewenangan gubernur jenderal yang tertuang dalam RR.

Begitu pula dalam hal pertanggungjawaban, apabila pada masa VOC gubernur jenderal memberikan laporannya kepada Heeren XVII, maka pada masa Hindia Belanda dia bertanggung jawab langsung kepada raja, melalui menteri jajahan.

Dalam tata pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal didampingi oleh Direksi atau departemen-departemen, yang namanya kemudian menjadi Departementen van Algemeen Bestuur. Dalam perkembangannya, lembaga ini seringkali mengalami perubahan, baik dalam susunannya maupun hierarkinya, akibat keadaan di Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa (termasuk Negeri Belanda).

Salah satu peristiwa yang membawa dampak cukup besar pada tata pemerintahan Hindia Belanda adalah revolusi yang terjadi di Eropa pada tahun 1848. Sejak revolusi itu, dapat dikatakan bahwa di Eropa Barat tidak ada lagi raja yang berkuasa mutlak. Sebaliknya, para penguasa itu kini dibatasi oleh konstitusi. Dalam kasus raja Belanda, kekuasaannya dibatasi oleh Groundswet (konstitusi) tahun 1848.

Penerapan Groundswet 1848 menyebabkan RR di Hindia Belanda berubah dengan terbitnya RR baru tahun 1864. Berdasarkan RR baru ini, Direksi yang berada di bawah gubernur jenderal dibubarkan dan diganti dengan departemendepartemen baru, yang masing-masing berdiri sendiri. Pada tahun 1933, terdapat enam departemen, yaitu sebagai berikut:

1. Departemen van Justitie
2. Departemen van Financien
3. Departemen van Binenland Bestuur
4. Departemen van Onerwijs en Eredeinst
5. Departemen Economische Zaken
6. Departemen Verkeer en Waterstaat.

Selain keenam departemen sipil di atas, terdapat dua departemen militer, yaitu departemen peperangan dan marine (angkatan laut). Direktur dari departemendepartemen sipil diangkat oleh gubernur jenderal sedangkan panglima angkatan darat dan laut diangkat oleh raja.

Meskipun ada upaya untuk melakukan modernisasi struktur birokrasi pemerintahan Hindia Belanda, namun dalam batas-batas tertentu struktur politik sebelumnya masih tetap dipertahankan, demi mempertahankan loyalitas, khususnya loyalitas para elit pribumi. Hal ini terlihat jelas dari struktur dan jabatan dalam organisasi pemerintahannya. Jabatan-jabatan teritorial di atas tingkat kabupaten tetap dipegang oleh orang-orang Eropa/Belanda.

Jabatan tertinggi yang dipegang oleh orang pribumi adalah kepala kabupaten, yaitu bupati. Bupati ini dibantu oleh seorang patih. Di bawah tingkat kabupaten terdapat kewedanaan yang dijabat oleh seorang wedana. Kecamatan, yang dikepalai seorang camat, merupakan wilayah di bawah kewedanaan. Sedangkan jabatan kepala desa pada dasarnya tidak termasuk dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga bukan merupakan anggota korp pegawai dalam negeri Hindia Belanda.

Korps pegawai dalam negeri Hindia Belanda (Departemen van Binnenland Bestuur), terdiri atas pegawai bangsa Eropa dan pribumi. Korp pegawai Eropa disebut Eropees bestuur sementara korps pegawai negeri pribumi disebut inland bestuur. Kedua korp pegawai ini secara umum disebut binnenland bestuur (BB). Dalam bahasa pribumi BB ini disebut Pangreh Praja (Pemangku Kerajaan). Para pejabat pribumi inilah yang disebut kaum priyayi, suatu istilah yang sebelumnya dipakai di kerajaan Jawa.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, kepala desa tidak termasuk kategori priyayi karena tidak termasuk ke dalam barisan BB. Oleh karena itu, kepala desa tidak diangkat maupun digaji oleh pemerintah. Mereka dipilih langsung oleh rakyat dan digaji oleh rakyat pula, yaitu melalui tanah desa yang diserahkan kepadanya selama dia menjadi kepala desa. Tanah jabatan atau tanah gaji ini di beberapa daerah di Jawa disebut tanah bengkok.

Ketika wilayah Hindia Belanda menjadi lebih luas akibat kebijakan politik pasifikasi dan pemantapan (pax nederlandica), kebutuhan tenaga kerja

untuk mengelola administrasi negara semakin meningkat. Dalam hal ini tenaga-tenaga pribumi semakin banyak terserap ke dalam birokrasi pemerintahan.

Selain itu, pengawasan pemerintah pun semakin menukik ke bawah. Meskipun jabatan teritorial dari tingkat kabupaten ke bawah masih tetap dipegang kaum pribumi, namun dengan alasan untuk mendampingi para pejabat itu maka diadakan jabatan-jabatan non teritorial setingkat kabupaten, kewedanaan dan akhirnya juga kecamatan. Apabila di tingkat kabupaten ada jabatan asisten residen, maka untuk tingkat kecamatan ada jabatan controleur, sementara di bawahnya lagi ada jabatan aspirant control

E. Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda

Tahun 1816 Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raffles. Tetapi pada tahun 1814 sudah diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah Pemerintahan Kolonial Belanda.

Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal

Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Willem VI yang terdiri atas tiga orang, yakni: Cornelis Theodorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (anggota).

Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahan Pangeran Willem VI mengeluarkan Undang - Undang Pemerintah untuk negeri jajahan (Regerings Reglement) pada tahun 1815. Salah satu pasal dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pertanian dilakukan secara bebas. Hal ini menunjukkan bahwa ada relevansi dengan keinginan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat un-

tuk mengadopsi beberapa kebijakan yang pernah diterapkan oleh Raffles. Mereka sampai di Batavia pada 27 April 1816. Ketika melihat kenyataan di lapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian.

Kas negara di Belanda dalam keadaan menipis. Mereka sadar bahwa tugas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi persoalan ekonomi baik di Tanah Jajahan maupun di Negeri Induk. Sementara itu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pengelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu.

Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendatangkan keuntungan yang besar bila diserahkan kepada swasta, dan rakyat diberi kebebasan dalam menanam. Sedang kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsung ditangani pemerintah dengan pengawasan yang ketat.

Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat kenyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konservatif, Komisaris Jenderal sepakat untuk menerapkan kebijakan jalan tengah. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan.

Tetapi kebijakan jalan tengah ini tidak dapat merubah keadaan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah gubernur jenderal. Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal. Ia ingin melanjutkan strategi jalan tengah.

Tetapi kebijakan Van der Capellen itu berkembang ke arah sewa tanah dengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat). Kemudian Van der Capellen juga menarik pajak tetap yang sangat memberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya per-

lawanan. Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Du Bus Gisignies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barangbarang yang diekspor.

Yang terjadi justru impor lebih besar dibanding ekspor. Tentu ini sangat merugikan bagi pemerintah Belanda. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas Negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyak tersedot untuk pembiayaan perang di tanah jajahan. Sebagai contoh Perang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi.

Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemisahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang.

F. Sistem Tanam Paksa

Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpin dan tokoh masyarakat. Salah satunya pada tahun 1829 seorang tokoh bernama Johannes Van den Bosch mengajukan kepada raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia.

Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka penanaman dilakukan dengan paksa. Mereka menggunakan konsep daerah jajahan sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk. Seperti dikatakan Baud, Jawa adalah "gabus tempat Nederland mengapung". Jadi dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan.

Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tanam Paksa). Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan

Van den Bosch membuat suatu perkiraan bahwa dengan Tanam Paksa, hasil tanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun. Van den Bosch menyatakan bahwa cara paksaan seperti yang pernah dilakukan VOC adalah cara yang terbaik untuk memperoleh tanaman ekspor untuk pasaran Eropa.

Dengan membawa dan memperdagangkan hasil tanaman sebanyak-banyaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

G. Ketentuan Tanam Paksa

Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Setelah sampai di Jawa Van den Bosch segera mencanangkan sistem dan program Tanam Paksa.

Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Secara rinci beberapa ketentuan Tanam Paksa itu termuat pada Lembaran Negara (Staatsblad) Tahun 1834 No. 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.

- Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan Tanam Paksa.

- Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

- Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.

- Tanah yang disediakan untuk tanaman Tanam Paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

- Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda.
  Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.

- Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.
- Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan Tanam Paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedang pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum.
- Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.

Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

H. Pelaksanaan Tanam Paksa

Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem Tanam Paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sambatan, gotong royong maupun gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabat pemerintah. Oleh karena posisi yang begitu penting itu maka kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan para pamong praja.

Yang jelas pelaksanaan Tanam Paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para

pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Tanam Paksa. Tanam Paksa telah membawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Mereka dipaksa fokus bekerja untuk Tanam Paksa, sehingga nasib diri sendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya di Cirebon (1843 - 1844), di Demak (tahun 1849) dan Grobogan pada tahun 1850.

Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 juta gulden, utang-utang lama VOC dapat dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dibangun.

Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesame manusia. Memang harus diakui beberapa manfaat adanya Tanam Paksa, misalnya, dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak.

I. Sistem Usaha Swasta

Pelaksanaan Tanam Paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai Negara industri. Sejalan dengan hal ini telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa.

Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tanam Paksa. Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah.

Mereka setuju karena Tanam Paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM (Nederlansche Handel Matschappij), yang mendukung pelaksanaan Tanam Paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari

Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan Tanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi.

Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta.

Nederlansche Handel Matschappij: perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, tahun 1850 Pemerintah mulai bimbang. Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (Staten Generaal).

Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya perubahan dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi, sebaliknya perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan lancar.

Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa sudah menjadi pendapat umum.

Oleh karena itu, secara berangsurangsur Tanam Paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan di dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi

kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai imbangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia.

Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan peluang pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- Tahun 1864 dikeluarkan Undang-undang Perbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet). Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan isahkan oleh Parlemen.
- Undang-undang Gula (Suiker Wet). Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta.
- Undang-undang Agraria (Agrarische Wet) pada tahun 1870. Undang- Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain :

a. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang dan sebagainya. Kedua, tanahtanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah.

b. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.

c. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama lima tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa-menyewa tanah ini harus didaftarkan kepada pemerintah.

Sejak dikeluarkan UU Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialism modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai:

- tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing,
- tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa,
- penyedia tenaga kerja yang murah.

Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat.

Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk membantu kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar.

Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta api yang pertama dibangun adalah antara Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api.

Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerahdaerah yang telah dikuasai dan yang akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatra ini, juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan, seperti di daerah pertambangan batu bara di Sumatra Barat.

Di samping angkutan darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan.

Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Belawan di Sumatra Timur, dan Pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) di Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien terutama setelah adanya pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat Bumiputera pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pertanian rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan sebagainya.

Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita.

J. Perkembangan Abad ke-20

Perkembangan ilmu yang mempelajari tentang kebijakan pada abad ini dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu politik, administrasi negara, sosiologi, ekonomi dan disiplin ilmu sosial lainnya yang terkait. Selama abad 20 para ilmuwan kebijakan bukan lagi kelompok yang heterogen seperti bankir, industrialis, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang mengendalikan lembaga statistik kuno dan lembaga penelitian kebijakan lainnya.

Fungsi utama dari ilmuwan sosial pada masa ini adalah mengkaji masalah masalah kebijakan dan merumuskan solusi yang potensial. Adanya perang dunia II dan masalah penyesuaian kembali pasca perang memberi kesempatan para ilmuwan sosial untuk menerapkan nilai-nilai yang dianutnya untuk memecahkan masalah praktis.

Menurut Laswell dalam pengantarnya " ilmu kebijakan" tidak dibatasi oleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang mendasar. Tujuan ilmu kebijakan tidak hanya memberi sumbangan pada pengambilan keputusan yang efisien tapi juga untuk memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi.

Perkembangan ilmu kebijakan setelah perang, sistematika studi kebijakan publik juga keluar dari administrasi negara dan kemudian menjadi disiplin

ilmu di dalam ilmu politik. Ide “analisis” muncul bersama-sama dengan usaha-usaha untuk memisahkan masalah menjadi beberapa komponen yang mendasar. Sejauh analisis dalam arti sempit analisentrik ini mengabaikan aspek-aspek politik, sosial dan administratif dari kebijakan publik. Maka analisis kebijakan di dalam bentuknya yang baru ini dapat diartikan sebagai gerakan meninggalkan tradisi yang telah mapan pada abad 19 sampai abad 20-an.



BAB 3 (TIGA)

Perumusan Kebijakan Publik

Menurut Joko Santoso, S.STP., dalam tulisannya Proses Perumusan Kebijakan Publik, hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk merumuskan kebijakan publik meliputi beberapa hal antara lain:

1. Aktor yang terlibat dalam Isu Kebijakan.
2. Kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor.
3. Tujuan yang ingin diraih oleh setiap aktor.
4. Aktor-aktor mana yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dan diajak untuk bekerjasama.
5. Even atau momentum yang digunakan oleh setiap aktor untuk mengarti kulasikan kepentingan atau menghambat bahkan menggagalkan kepentingan lawannya atau aktor yang kontra.
6. Alat, sarana, saluran yang digunakan oleh setiap aktor untuk mengartikulasikan kepentingannya.
7. Teknik yang digunakan oleh setiap aktor.
8. Pengorbanan dan hasil yang diraih oleh setiap aktor.
9. Penilaian tentang demokratisasi, partisipasi, transparansi, keterbukaan dari proses kebijakan tersebut.

Overview pandangan kaum kapitalis, positivis dan sosio radikal mengenai berbagai macam masalah sosial, ekonomi dan politik :

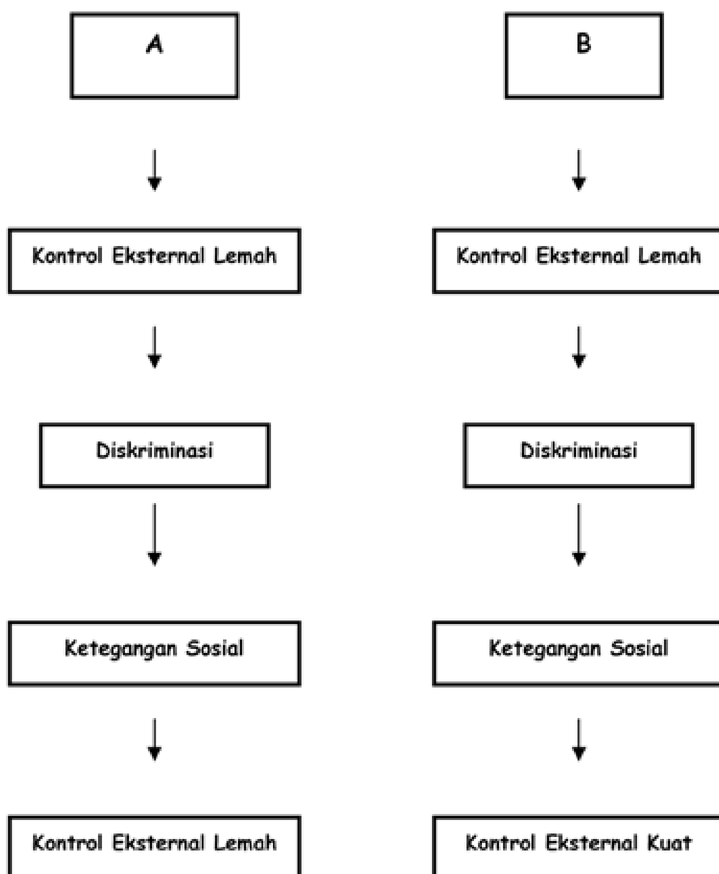
	KAPITALIS	**POSITIVIS**	**SOSIALIS RADIKAL**
SIFAT DASAR MANUSIA	Manusia tidak sama, materialistik dan selalu mencari kekuasaan	Orang bisa khilaf akan tetapi dapat diluruskan dan dididik, self oriented tetapi bisa juga menghargai orang lain	Manusiaa itu makhluk sosial ; materialisme dan self interest itu yang ada pada manusia itu karena tekanan dan pengaruh kapitalisme
PASAR PRIVAT	Efisien; rasional; terbaik untuk diadaptasikan, sifat, hakekat manusia, keras tetapi juga menjaga kebebasan	Efisien; rasional tetapi dalam batas tertentu, peningkatan besarnya kotporasi menyebabkan konsentrasi kekuasaan	Sumber kepincangan sosial, pengejar keuntungan, sehingga upah buruh harus dipertahankan rendah.

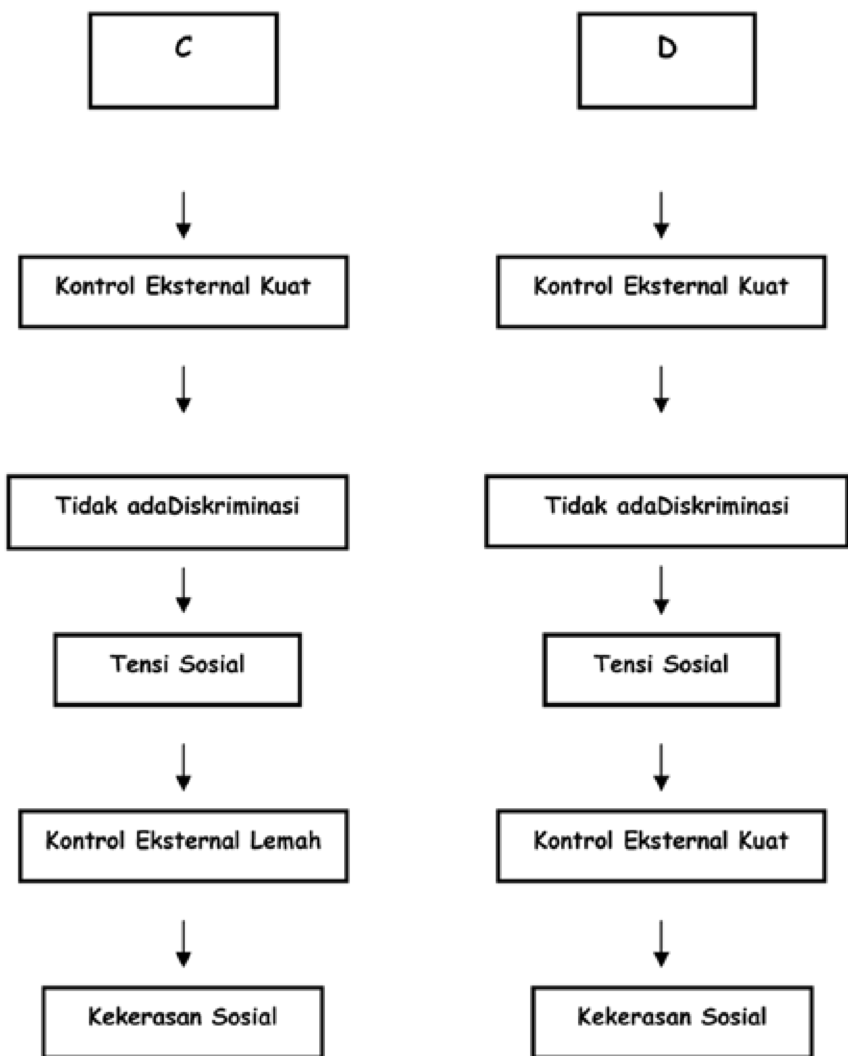
PEMERINTAH	Memiliki peran yang sah dalam mengurangi kerasnya mekanisme padar, usaha-usaha yang idealis dan naif untuk memperbaiki dunia biasanya berakhir dengan *backfire*	Bisa melakukan kekeliruan, tetapi tidak mengandung unsur-unsur terbaik dari hakekat manusia, kerjasama, keadilan dan kemajuan	Terutama bersatu dengan pemilik modal melindungi kekayaan privat dan kemudahannya , keistimewaan swasta, menjaga ketertiban sosial.
KEPARAHAN MASALAH SOSIAL	Terlalu dibesar-besarkan sebetulnya keadaannya semakin baik tetapi harapan tumbuh lebih cepat	Terdapat banyak masalah soaial,tetapi manusia akan mampu mengatasinya	Sangat parah dan bersifat sistemik
SUMBER MASALAH	Terbatasnya kemampuan manusia, dampak kemajuan tekhnologi, merosotnya ikatan family dan solidaritas masyarakat	Kurangnya pengetahuan dan keahlian manusia untuk mengatasi masalah, tidak mementingkan diri sendir dari beberapa orang yang memang jelek	Hakekat dari masyarakt kapitalis dan kepentingan dari sebagian kecil pengusaha dan pemilik modal dikedepankan
PENAFSIRAN TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK YANG ADA	Kegagalan disebabkan oleh terlalu banyak campur tangan pemerintah dan tersentralisir	Terdapat campurtangan antara kekuasaan dan kegagalan, merupakan suatu proses belajar dari masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri	Reformasi yang ada hanya tambal sulam dan tidak tulus, hanya sekedar menghibur kelas bawah, kalupun ada usaha reformasi yang sungguh-sungguh sering dipaksakan dengan kekutan politik.
ARAH KEBIJAKAN PUBLIK YANG DISARANKAN	Swastanisasi dan desntrralisasi	Pikirkan dan lakukan ide-ide serta kebijakan baru yang lebih efektif dan efisien; pemerintah nasional harus mengawasi	Pengendalian modal oleh publik; pemberdayaan si miskin

HUBUNGAN ANTARA PREJUDICE – DISKRIMINASI – TENSI – KEKERASAN

Affiemative action : contoh di Amerrika bahwa dalam organisasi publik ada porsi pegawai dari orang berkulit hitam untuk duduk di pemerintahan meskipun disana bangsa kulit hitam di benci, proporsinya adalah dari prosentase penduduk yang ada.

Dalam konteks Indonesia mestinya hal ini perlu dijadikan pertimbangan di masa depan.





Demokrasi yang dikembangkan di Malaysia dikenal dengan consuciational democracy, Dalam demokrasi seperti ini ketyika ada ketegangan sosial maka yang menyelesaikan adalah elite partai. Sedangkan di Indonesia justru masyarakat di politisir oleh elite partai untuk kepentingan kepentingan tertentu. Alasan mempelajari public Policy adalah untuk memahami hubungan sebab akibat dari sebuah keputusan untuk lebih memahami masyarakat kita.

Santa clause syndrome adalah ketergantungan dari masyarakat karena bantuan masyarakat. Dengan memahami hubungan sebab-akibat dalam public policy akan memudahkan kita untuk menerapkan policy dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Tujuan politiknya adalah untuk menjamin bangsa dan negara kita agar mengadopsi kebijakan yang baru dan mencapai goal yang benar pula.

Environtment of policy termasuk di dalamnya (Thomas Dye) :

1. tingkat urbanisasi
2. karena urbanisasi telah membuat banyaknya pedagang kaki lima (PKL)
3. sistem ekonomi
4. ex : tingkat inflasi, suku bunga
5. educational level
6. ex : kebijakan harus mempertimbangkan tingkat pendidikan
7. wealth
8. inequality
9. setiap public policy harus lebih memperhatikan kesenjangan yang ada
10. komposisi ras
11. religi

Political system dalam public policy termasuk di dalamnya :

1. Govermental form
2. Constitusioanl type
3. Birokrasi
4. Sistem Kepartaian
5. Sistem Kekuasaan
6. Interest group
7. Level of conflict
8. Characteristic of elite
9. Pola partisipasi

Linkage A : Pengaruh Environtment terhadap political system

Sebagai contoh adalah bagaimana tingkat pendidikan masyarakat (lingkungan) berhubungan dengan level of conflict (sistem politik). Di Indonesia

konflik para elite politik telah memicu konflik pada level pendukungnya hal ini bisa dijelaskan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih minim baik secara umum maupun pengetahuan politiknya.

Linkage B : Pengaruh political system terhadap public policy

Contohnya adalah perjuangan kelompok kepentingan (sistem politik) dalam memperjuangkan suatu kebijakan publik, misalnya IDI sebagai kelompok kepentingan yaitu para dokter mempengaruhi proses dan perumusan kebijakan dalam bidang kesehatan.

Linkage C : Pengaruh Environtmen terhadap Public Policy

Terhadap kebijakan transmigrasi saat ini masyarakat di daerah-daerah diluar pulau Jawa yang sebelumnya merupakan daerah tujuan transmigrasi kini mulai menolak program atau kebijakan tersebut. Hal ini terjadi karena di daerah tersebut masyarakat secara umum cenderung tumbuh sentimen kedaerahan, friksi terhadap kaum pendatang dan adanya rasa tidak simpati kepada pendatang yang memperoleh banyak kemudahan dan fasilitas dibidang pertanahan (sementara masyarakat setempat tidak memperolehnya).

Linkage D : Pengaruh Public Policy terhadap Environtmen

Kebijakan publik dalam bidang perburuhan atau ketenagakerjaan telah memicu membuat para buruh yang sebelumnya berada pada fihak yang dipinggirkan membuat para buruh pasca keluarnya kebijakan ketenagakerjaan lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya. Karena seringnya aksi demo, unjuk rasa dan pemogokkan maka hal ini membuat para investor ragu untuk meneruskan investasinya di Indonesia kecenderungan yang terjadi kemudian sebagai implikasinya adalah terjadi relokasi industri dari modal yang mereka investasikan ke negara-negara seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia yang relatif aman bagi investasinya.

Linkage E : Pengaruh Political system terhadap Environtment

Kelompok kepentingan yang memperjuangkan nilai-nilai yang dapat mengangkat derajat hidup mereka seperti kaum tani dan kaum buruh di beberapa negara seperti Jepang dan Australia telah mempengaruhi sistem ekonomi di negara tersebut. Keberpihakan sistem politik terhadap kaum buruh dan kaum tani menjadikan pengaruh yang besar dalam sistem perekonomian negerinya.

Linkage F : Pengaruh Public policy terhadap Political system

Kebijakan publik mengenai otonomi daerah dapat menjelaskan hubungan ini dimana implikasi dari kebijakan tersebut telah membuat perubahan struktur dalam sistem pemerintahan baik pada level daerah maupun pada tingkat propinsi.

A. Kebijakan publik dan didefinisikan

Kebijakan publik didefinisikan sebagai :

1. Hubungan aktivitas satu unit pemerintah dengan lingkungannya Robert Eyestone)
2. Serangkaian kegiatan yang saling berhubungan beserta segenap konsekuensinya (Ricard Rose)
3. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (Thomas Dye)
4. Kemahiran pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial (Ricard Hula)

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian kebijakan publik adalah tidakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Mr. Sugiono bahwa kebijakan publik adalah usaha bersama dari warga masyarakat untuk membagi resources yang ada di dalam masyarakat secara damai dan adil serta sifatnya yang mengikat.

B. Pemahaman Kebijakan

Kebijakan sebagai sebuah istilah dan berorientasi kepada ilmu sosial yang dikembangkan Harold Lasswell dkk sebelum dan segera PD II adalah ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin dan secara eksplisit bersifat normatif. Terhadap Kebijakan yang dikembangkan oleh Lasswell ini sesungguhnya “ilmu kebijakan” tidak terbatas oleh tujuan teoritis akan tetapi juga memiliki tujuan praktis yang mendasar terhadap tujuannya yaitu terhadap pembuatan keputusan yang efisien. Secara umum tekanan dari kebijakan yang dikembangkan ini secara khusus tujuan akhirnya adalah untuk demokrasi dimana tujuan akhirnya adalah perwujudan martabat manusia (nilai) baik secara teori maupun fakta.

Pendapat yang dikembangkan oleh Lasswel dkk ini mendapat tangga-

pan bahwa ilmu dan nilai tersebut sebagai hal yang saling bertentangan. Kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk menyoroti masalah fundamental dan pengambilan kebijakan demi menyesuaikan terhadap perubahan sosial hanya dipandang sebagai pelayan dari demokrasi. Jadi Laswell lebih melihat kebijakan pada dimensi demokrasi dan lebih berorientasi pada tujuan (nilai) yaitu peningkatan harkat hidup manusia.

Dituliskan oleh Joko Santoso, S.STP., kebijakan menurut Willian Dunn bahwa kebijakan sebagai suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah sosial. Dalam orientasinya Dunn lebih menekankan Bagaimana hakekat permasalahannya, makna terhadap pemecahan masalah tersebut dan hasil yang akan diharapkan dari kebijakan tersebut dalam memecahkan masalah-masalah sosial.

Dalam melihat tingkat kemacetan di Jakarta kedua pengikut pakar tersebut akan bertolak pada kebijakan yang berbeda dalam pemecahan masalah yang ada, dimana :

a. Lasswell akan melihat bahwa dalam kemacetan lalu lintas yang terjadi perlu adanya kebijakan baru mengenai sistem pengaturan lalulintas, penambahan jalan (pelebaran), pembangunan jalan tol, pembangunan jalan by pass, kenaikan pajak terhadap kendaraan bermotor untuk mengatur kesempatan warga Jakarta dalam kepemilikan mobil, atau sistem perundangan yang hanya memberikan kesempatan kepada setiap orang hanya dapat memiliki satu buah mobil.

b. Sedangkan William Dunn akan melihat penyebab kemacetan itu terjadi, alternatif kebijakan yang mungkin akan ditawarkan adalah membuat sistem layanan transportasi umum yang sifatnya massal, penambahan dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum.

	BAIK	***JELEK***
Raja	Monarkhie	Tirani
Aristokrasi	Aristokrasi	Oligarkhie
Rakyat	Demokrasi	Anarkhie

Aristokrasi ***: orientasi pada hati dan pikiran***
Demokrasi ***: orientasi pada nafsu dan perut***
Monarkhie ***: orientasi pada masyarakat oleh Raja***
Tirani ***: orientasi pada kepentingan sendiri oleh raja***

Pemerintah melakukan banyak hal, negara harusnya bisa mengatur konflik di dalam masyarakat, negara juga dapat mengorganisasikan masyarakat untuk menghadapi konflik dengan negara lain. Akan tetapi dalam masa damai negara dapat memobilisasi. Michael Douglas menilai mengenai kasus Indonesia bahwa keberhasilan – keberhasilan dan kelemahan – kelemahan sektor publik terhadap public policy adalah :

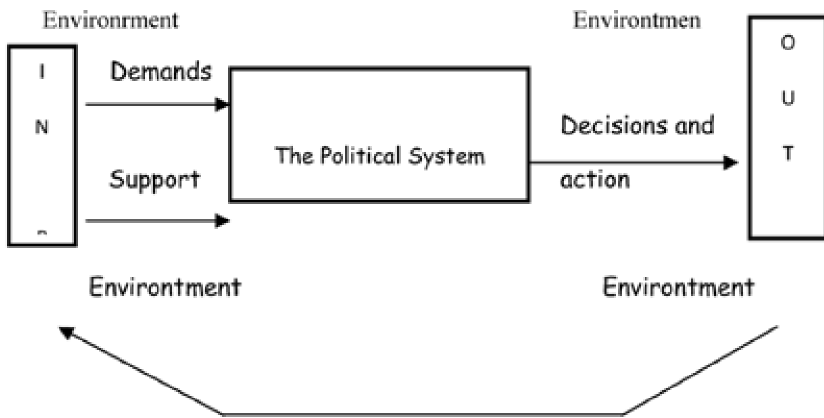
a. ***public services adalah tinggi***
b. ***Human Dignity adalah rendah***
c. ***envorontment adalah rendah***

Dengan demikian public policy bisa bersifat mengatur , mengambil dan membagikan atau semua hal tersebut digabung di dalam kebijakan publik.

C. Analisa Kebijakan Dalam Tindakan

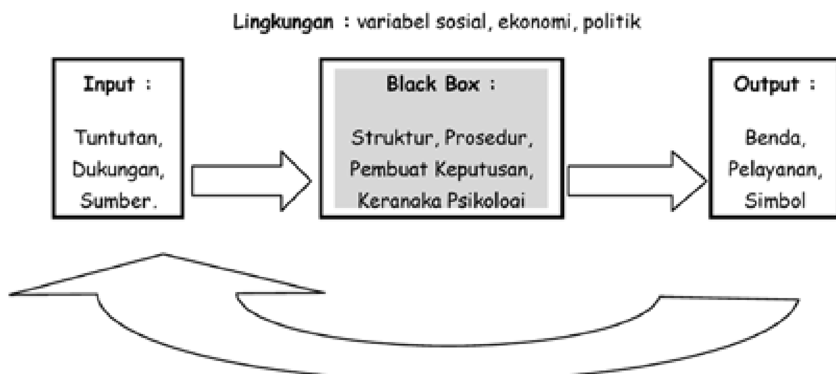
Thomas Dye beranggapan bahwa public policy adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Dye ada berbagai macam Public Policy :

1. System Theory :



Di dalam konsep ini aktivitas politik dan public policy dapat digambarkan dalam ilustrasi diatas. Dalam teori sistem public policy dianggap sebagai output dari sebuah sistem politik . konsep mengenai sistem poitik menyatakan bagaimana isntitusi-institusi dan aktivitasnya mampu merespon dan mentranformasikan kebutuhan yang ada dalam masyarakat untuk menjadi nilai yang mengikat masyarakat secara otoritatif dan memperoleh dukungan darinya.

Model ini dipengaruhi oleh konsep dan teori dalam ilmu komunikasi seperti *(feedback, input, output)* dan percaya bahwa keseluruhan proses bersifat *cyclical.*

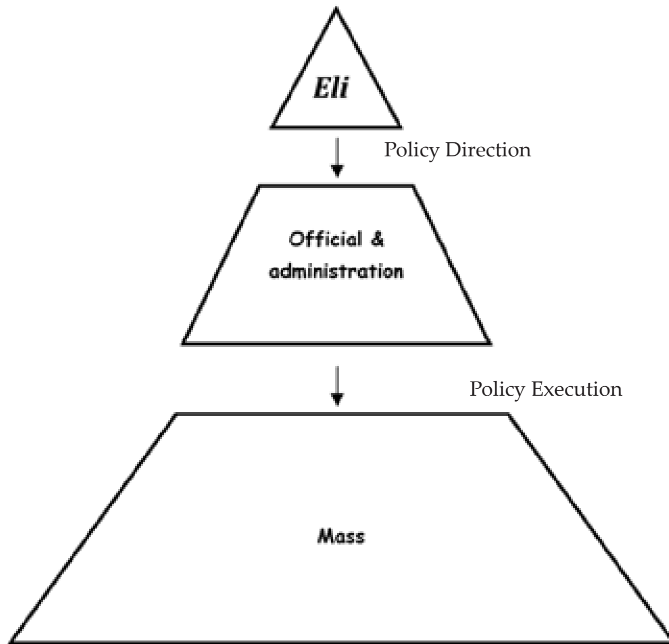


Pertanyaan yang dapat dianalisis dalam theory system ini adalah :

a. dimensi lingkungan apa yang melingkupi sebuah kebutuhan dalam proses masukkan pada suatu sistem politik.
b. karakteristik sistem politik yang bagaimana yang dapat mentransformasikan kebutuhan akan sebuah kebijakan publik
c. bagaimana lingkungan mempengaruhi sistem politik
d. bagaimana bekerjanya sistem politik dalam membuat kebijakan publik
e. bagaimana lingkungan input mempengaruhi the content of public polisy
f. bagaimana implikasi publik policy, kembali menjadi input sebagai feedback, terhadap lingkungan, dan karakteristik sistem politik.

Contoh yang barangkali dapat menjelaskan teori ini adalah dalam kebijakan perburuhan Indonesia. Bahwa kelompok penekan dan oposisi saling berusaha untuk memperjuangkan nilai-nilai kepentingannya kemudian bagaimana kondisi sosial dan perekonomian sebagai lingkungan dari kebijakan ditambah dengan suasana politik yang melingkupinya direspon oleh sistem politik yaitu melalui institusi Dewan (DPR) untuk di proses dan dirumuskan sebagai sebuah kebijakan publik. Dari kebijakan yang dikeluarkan kemudian dalam implementasi kebijakan tersebut bagaimana lingkungan sosial dan ekonomi bereaksi terhadap adanya kebijakan tersebut, sampai kepada akhirnya semuanya menjadi feedback bagi proses input kembali.

2. Elite Theory



Public policy dapat dilihat sebagai preferensi dan nilai dari elite pemerintah. Meskipun sering *public policy* merefleksikan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat terjadi melalui :

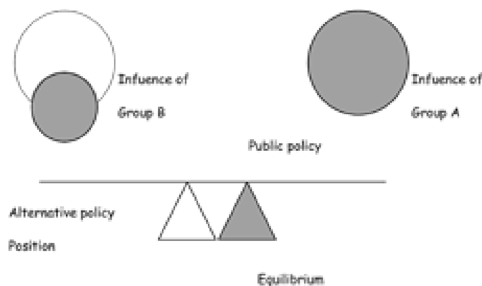
1. public policy dibuat secara incremental dan membawa (mengakomodasikan) nilai-nilai dari kepentingan para elite. Nilai-nilai dari para elit akan sangat mempengaruhi publik. Akan tetapi elitisme tidak berarti bahwa public policy anti terhadap kepentingan (kesejahteraan) masyarakat akan tetapi public policy yang ada merespon kesejahteraan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan para elit daripada kepentingan masyarakat secara umum.

2. para elite melihat sebagian besar masyarakat yang pasive, terjadi sitorsi informasi, sentimen masyarakat dimanipulasi oleh para elite.

Sebagai ringkasan : bahwa dalam model ini diasumsikan masyarakt terbagi dalam dua kelompok besar, mereka yang memiliki kekuasaan (powerfull) dan yang tidak memiliki kekuasaan (powerless) . Elite berkuasa karena mereka lebih pintar, lebih tahu masalah yang dihadapi masyarakat. Hingga kebijakan yang dibuat bersifat topdown. Dengan demikian dapat difahami bahwa model hanya efektif dalam lingkungan dimana masyarakat bersikap pasif serta terjadi distorsi informasi.

Contoh yang dapat menjelaskan teori ini adalah kebijakan subsidi BBM dimana sebenarnya kebijakan tersebut memang berdimensi terhadap kesejahteraan masyarakat akan tetapi sebenarnya yang paling diuntungkan adalah para konglomerat yang memiliki industri, merekalah sebenarnya yang paling diuntungkan atas adanya kebijakan tersebut. Masyarkat telah di manipulasi pemahamannya terhadap subsidi BBM, terjadi distorsi informasi dalam pemahaman masyarakat.

3. Group Theory : Policy as group equilibrium.



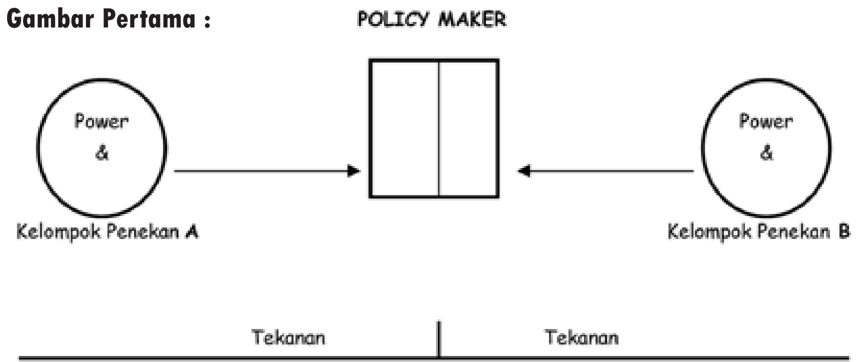
Adalah hasil perjuangan dari kelompok yang berjuang sebagai keseimbangan individu di dalam politik tidak akan berarti kalau tidak mengatasnamakan kepentingan kelompok. Menurut teori ini public policy adalah eguilibrium yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok. Akhirnya pengaruh atau jumlah menjadi penting selain leadership, akses terhadap policy maker, kohesi internal dari kelompok, kekayaan.

Contoh yang dapat menjelaskan teori ini adalah perjuangan para kaum buruh melalui kelompok-kelompok kepentingan yang mereka bentuk (SBSI, SPSI dst) untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam kebijakan perburuhan.

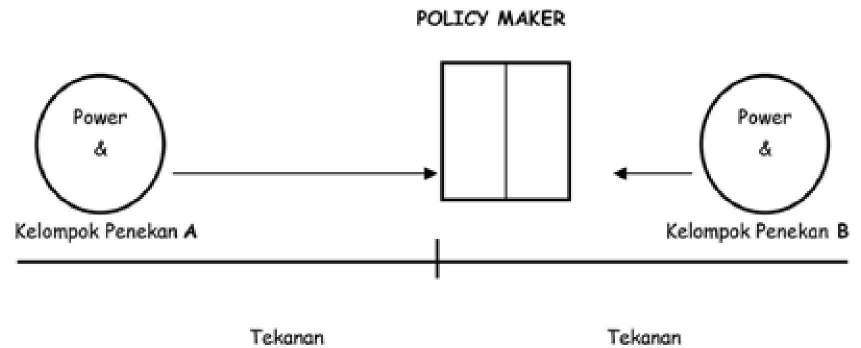
Theory ini dikenal juga dengan sebutan the hydrolic thesis, sebab menyoal peranan kelompok penekan dan lobi-lobi antar kelompok yang ada untuk memutuskan satu hal. Masyarakat diasumsikan sebagai sebuah sistem dimana kelompok yang ada saling menekan dalam hukum aksi reaksi dalam merumuskan dan melaksanakan satu kebijakan publik.

Secara teoritis memang tampak kelompok yang memiliki kekuatan yang sama (seperti gambar pertama) sehingga Content dan context kebijakan itu masih netral. Tetapi sejalan dengan pareto optimum prinsip, dimana ketika memaksimalkan kepentingan sebenarnya saat yang sama adalah meminimalkan kepentingan orang lain, maka sebenarnya ada kelompok yang lebih powerfull dibanding yang lain, sehingga hakekat kebijakan publik busa menjadi tidak netral lagi. (lihat gambar kedua).

Gambar Pertama :



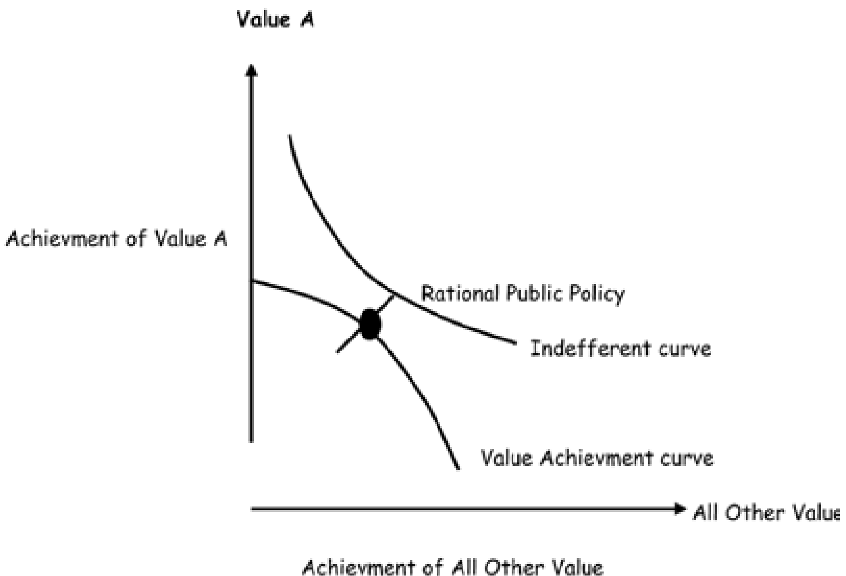
Gambar Kedua :



4. Rationalism : Policy as effisent goal achievment

Nilai yang akan dicapai akan ditimbang dengan yang akan dikorbankan. Akan tetapi seorang policy maker harus mengetahui preferensi nilai masyarakat, dia harus mengetahui alternatif-alternatif kebijakan yang ada, policy maker harus mengetahui konsekuensi-konsekuensi atas setiap alternatif kebijakan. Seorang policy maker harus mengaklkulasikan rasio nilai yang dikorbankan dengan nilai-nilai sosial yang dicapai untuk tiap-tiap alternatif kebijakan sehingga seorang policy maker harus memilih alternatif kebijakan yang efisien.

Contohnya adalah dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan menjadikan Pulau Batam sebagai kawasan industri. Dimana pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas kepada para investor, namun pemerintah pun telah mengkalkulasikan dampak yang akan timbul dari kebijakan tersebut.



Menurut teori ini pilihan atas kebijakan merupakan hasil dari perhitungan tertentu, yang bisa saja tidak ada kaitannya dengan kebijaksanaan lain atau sebelumnya. Mungkin saja suatu kebijakan diambil pemerintah mengarah pada suatu tujuan umum, dan masing2 kebijakan bersifat komplementary terhadap yang lainnya.

5. Incrementalism : Policy as Variations on the past

Model ini melihat sebuah kebijakan sebagai kelanjutan dari pencapaian tujuan kebijakan sebelumnya. Diimajinasikan bahwa ada suatu tujuan besar yang hendak dicapai. Kebijakan yang baru merupakan upaya untuk mencapai sasaran berikutnya, sambil melakukan penyesuaian dengan perkembangan lingkungan,

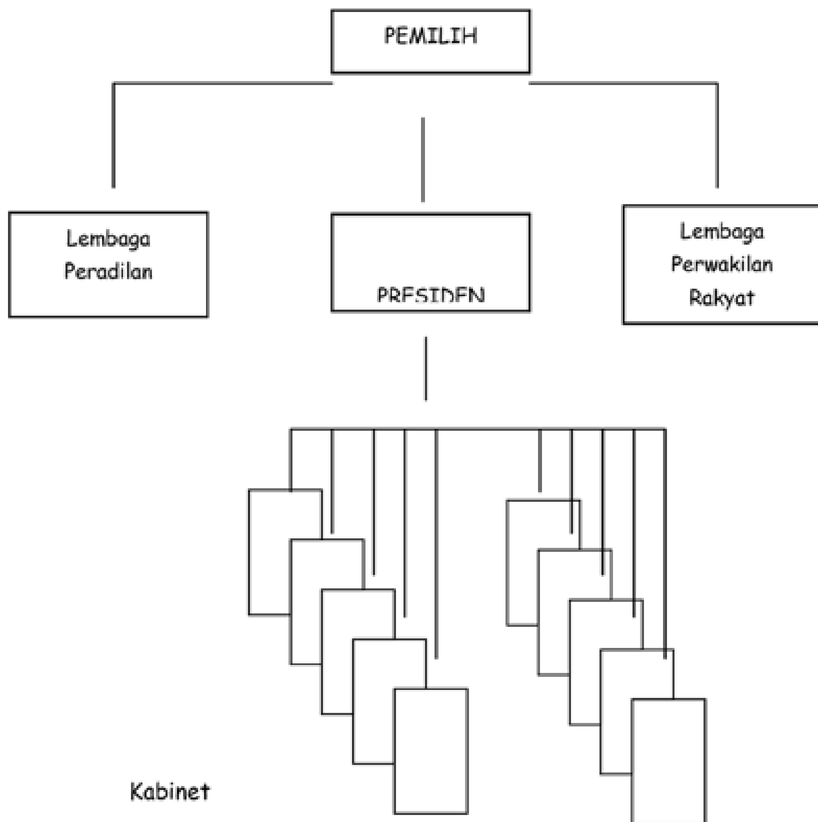
Policy hanya sekedar tambahan, part variasi dari masa lalu, orang lebih senang melakukan model incremental dalam public policy karena :

a. semua orang tidak memiliki banyak waktu, kecakapan dan cara untuk meneliti alternatif kebijakan yang ada.
b. Seorang policy maker telah mendapat legitimasi dari policy maker sebelumnya (dimasa lau)
c. Program terdahulu mungkin sudah memiliki investasi yang banyak
d. Secara politic expedient sesuai selera publik
e. Susah untuk mengetahui goal dan nilai-nilai sosial yang disetujui bersama.

Contohnya adalah kebijakan pemerintah terhadap kurikulum pendidikan dimana kebijakan-kebijakan yang diambil selalu bersifat incremental.

6. Institusionalism ; policy as institusional activity

Model ini menmfokuskan diri pada apa yang seharusnya dilakukan oleh elemen yang ada dalam struktur birokrasi pemerintah, dengan cara melihat chart dari mekanisme kerja sesuai dengan aturan yang ada.



Syarat sebuah masalah dapat diangkat menjadi issue untuk kemudian dijadikan sebagai agenda adalah :

1. Kita harus bisa menghubungkannya dengan simbol-simbol politik Contohnya adalah bagaimana industri pesawat terbang, walau tidak efisien namun dapat tetap berjalan karena keberhasilannya mengaitkan dengan simbol-simbol politik yang ada.
2. Mampu meyakinkan bahwa isu yang ada dampaknya akan besar sekali bila tidak ditangani.
3. Mampu membuat analogi dengan masalah lain yang relevan
4. Mampu dengan tekhnologi untuk mendukungnya.
5. Sebuah issue akan menjadi sebuah agenda kebijakan bila swasta tidak mau dan tidak mampu untuk menangani masalah tersebut.

Issue ————————► terganggunya kepentingan publik
Masalah ————————► kepentingan publik tidak terganggu

PERSPECTIVE IDEOLOGIS TENTANG KRIMINALITAS

	Sebab Terjadinya Kriminalitas	*Orientasi Kebijakan*	*Peran Penegakkan Hukum*
KONSERVATIVE TRADITIONAL	Deviasi Individual	Terapy bagi yang bisa disembuhkan/ Hukuman dan isolasi bagi yang tidak bisa disembuhkan	Tangkap dan hukum
NEO KONSERVATIVE	Rational choice / Resiko rendah / Merosotnya kontrol	Deterrence dan Incapacitation	Takut-takuti kriminal potensial / Yakinkan kembali publik /

	Komunitas informal		Isolasi kriminal
LIBERAL	Blocked oppurtunity	Rehabilitation / Reformasi sosial sedang / moderat	Hanya sekedar penegakkan hukum bukan penegakkan keadilan
RADICAL	Kesenjangan berkaitan kapitalisme	Reformasi luas / kontrol publik terhadap Polisi / perangi white-collar crime	Aparat hanya sekedar pemelihara status quo

Sugiono, Public Policy, 1999

Blocked oppurtunity	:	Terhalangnya kesempatan, misalnya kesempatan kerja
Deference	:	Menakut-nakuti
Incapacity	:	Mengurangi nilai-nilai kriminil
Neokonservative	:	Organisasi Kapitalis yang terdidik

D. Model Sosiologis Untuk Memahami
MASALAH DEMOKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL

MODEL	KONSENSUS		KONFLIK
Mazhab	Developmentalis	Liberalis	Transformatif
Struktur Sosial	Hasil konsensus tidak dipermasalahkan, bahkan dipertahankan	Hasil konsensus tidak dipermasalahkan, bahkan dipertahankan	Hasil pemaksaan. Selalu dipermasalahkan / dipertanyakan
Masalah Demokrasi	Kebodohan, Kemiskinan, Keterbelakangan,	Tatanan (poleksosbud) tidak berfungsi dengan baik	Tatanan (poleksosbud) tidak adil/ demokratis
	Keterpencilan		
Sebab Masalah	Kesalahan para pelaku sebagai sebab	Kurangnya kesempatan bagi partisipasi dan akses sebagai sebab	Struktur sosial yang tidak adil sebagai sebab
Pemecahan Masalah	Mengubah nilai dan norma (budaya dan mentalitas)	Menyediakan dan memperluas kesempatan partisipasi dan akses bagi rakyat	Mengubah struktur demokratisasi. Kekuasaan ada di tangan rakyat
Model Perubuhan	Perubahan mentalitas budaya Menghindari konflik	Perubahan fungsional–struktural Menghindari konflik	Perubahan struktural
Sumber Ilham (motivasi)	Menjalankan tugas	Menegakkan hukum dan aturan (HAM)	Kemampuan akyat melakukan perubahan
Aktor	Pemerintah, elite	Pemerintah, elite	Rakyat sendiri
Gaya Kepemimpinan	Birokratik	Tekhnokratik, Birokratik	Populis, partisipatoris, memberi peluang pemimpin dari bawah
Paradigma	Developmentalis	Reformasi Liberal	Transformasi Sosial

Diadopsi / dimodifikasi dari Anne Hope & Sally Himmel, *Training for Transformation; A Handbook for Community Workers, Book* 3 Mambo Press, Gweru, Zimbabwe, 1984

Proses Perumusan Kebijakan Publik
Oleh: Joko Santoso, S.STP

E. Masalah Publik dan Masalah Kebijakan

"Close the gap between knowledge and policy" (Wayne Parsons, 1997:21. Public Policy: And Introduction to the Theory and Practice of Policy Analys)

Bagai mengurai benang kusut, pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habis-habisnya. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu memiliki kepentingan berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda itu membuat pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut 'menitipkan' suaranya tersebut.

Proses tawar-menawar (bargaining) antar-aktor pembuat kebijakan, dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, seringkali disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan (power) itu sendiri.

Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu-persatu masalah yang ada. Butuh waktu dan tenaga ekstra dari para lembaga pembuat kebijakan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk membuat kebijakan.

Karena, sejatinya setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil assessmentdari masalah publik. Namun, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah semua masalah publik adalah masalah kebijakan ataukah ada yang bukan masalah kebijakan?

Sebuah paradigma kebijakan publik yang kaku (rigid) dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula (Fadillah Putra: 2003).

Itulah sebuah gambaran betapa rumitnya suatu kebijakan publik. Seorang pakar kebijakan kenamaan Barat, William Dunn membedakan antara masalah yang bukan kebijakan dan masalah kebijakan (Dunn: 1995). Menurutnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masalah kebijakan dan masalah non-kebijakan.

Pertama, saling bergantung (interdependence), maksudnya adalah bahwa masalah kebijakan seringkali mempengaruhi masalah kebijakan yang lainnya (complicated). Russel L. Ackroff menyebutnya dengan nama messes, yaitu masalah kebijakan bukan sebuah masalah yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem masalah (Ackroff, 1974:21). Oleh karena rumitnya masalah tersebut, analisis terhadapnya pun tidak sesederhana yang dibayangkan. Pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan komprehensif.

Kedua, yaitu subjektif (subjective), yaitu sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Walaupun sejatinya, sebuah masalah juga bisa bersifat objektif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar.

Para administrator diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customers, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Publik sangat menaruh harapan yang besar kepada para administrator publik, yaitu harapan agar para administrator publik tersebut memberikan pelayanan yang baik kepadanya (good public service) (Irfan Islamy: 1997). Sebuah harapan yang tidak muluk-muluk dan wajar mengingat para administrator publik tersebut sejatinya adalah pelayan publik.

Dalam hal formulasi sebuah kebijakan, fase perumusan masalah merupakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadi fundamen dasar dan langkah awal dalam membuat kebijakan. Langkah awal ini akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan disusun. Jika masalah yang diangkat salah, maka akan dapat berakibat fatal. Untuk itu, tidak jarang banyak kebijakan publik yang pada akhirnya malah menyengsarakan dan bukan berpihak pada rakyat.

Mengingat pentingnya fase ini, maka William Dunn menyebutkan setidaknya ada empat tahap dalam perumusan masalah, antara lain: problem search (pencarian masalah), problem definition(pendefinisian masalah), problem specification (menspesifikasi masalah), dan problem sensing(pengenalan masalah) (William N. Dunn, 1999:226).



Fase Perumusan Masalah Kebijakan (William N. Dunn, 1999:226)

Pencarian masalah menjadi awal ketika para perumus kebijakan akan membuat kebijakan. Para analis kebijakan harus dapat membedakan antara masalah publik dengan masalah privat. Jika seseorang kehabisan bensin dalam sebuah perjalanan memakai kendaraan bermotor, maka hal tersebut dikatakan sebagai masalah privat. Namun, jika terjadi kelangkaan minyak dan gas yang melanda masyarakat luas, maka hal itu disebut sebagai masalah publik. Ilustrasi tersebut menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara masalah publik dengan masalah privat. Para analis kebijakan pun harus siap dihadapkan pada metamasalah.

Tahap selanjutnya yaitu pendefinisian masalah. Tahap ini merupakan penganalisisan dari metamasalah ke masalah subtantif. Di mana terjadi pengkategorian masalah-masalah yang bersifat dasar dan umum. Setelah itu, para analis kebijakan dapat merumuskan masalah formal yang lebih rinci dan spesifik. Melalui spesifikasi masalah proses perpindahan dari masalah subtantif ke masalah formal dapat dilakukan. Ketika masalah telah dispesifikasikan, maka pengenalan masalah menjadi tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, kesulitan akan menghampiri pembuat kebijakan. Kesulitan tersebut terjadi dikarenakan ketidaksesuaian masalah subtantif dengan representasi formal dari masalah yang ada.

Merujuk pada banyaknya persoalan mengenai kebijakan publik, Robert B Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeysekere mencoba merancang apa yang disebutnya dengan ROCCIPI. Mereka menyatakan bahwa suatu masalah dapat muncul akibat dari adanya beberapa hal yang ditesiskan mereka tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal-hal tersebut, menurutnya antara lain:

1. Rule (peraturan)

Peraturan dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia. Entah itu sebagai alih-alih (pembenaran) atau malah sebaliknya. Peraturan di sini menyangkut semua masalah publik atau juga masalah yang ditimbulkan oleh publik. Masalah publik dapat muncul jika:

Pertama, rancunya atau membingungkannya bahasa yang digunakan dalam peraturan, seperti tidak dijelaskannya hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Kedua, beberapa peraturan malah berpeluang menyebabkan perilaku bermasalah. Ketiga, peraturan seringkali memperluas penyebagian-penyebagian perilaku bermasalah, bukan malah menghilangkannya. Keempat, peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan. Kelima, peraturan memberikan wewenang berlebih kepada pelaksana peraturan untuk bertindak represif.

2. Opportunity (kesempatan)

Seorang individu akan dapat melakukan perilaku bermasalah jika kesempatan yang ada terbuka lebar. Artinya adalah bahwa jika kesempatan terbuka maka hal itu dapat mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku menyimpang.

Dalam hal ini, lingkungan menjadi faktor yang dominan penyebab perilaku yang menyimpang. Kemudian, muncul pertanyaan, "apakah lingkungan memberikan kontribusi timbulnya perilaku bermasalah atau malah sebaliknya, perilaku bermasalah yang mempengaruhi lingkungan?"

3. Capacity (kemampuan)

Hal tersebut berkaitan dengan pertukaran yang disebabkan tidak dapat memerintah para individu untuk melakukan hal-hal di luar kemampuannya.

Untuk itu, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi-kondisi dari tiap individu.

4. Communication (komunikasi)

Munculnya perilaku bermasalah dapat diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu peraturan. Ketidaktahuan tersebut dipicu oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik (miss-communication). Permasalahan komunikasi sebenarnya merupakan permasalahan klasik di negeri yang kaya akan budaya dan sangat plural ini.

5. Interest (kepentingan)

Kategori ini dapat digunakan untuk menjelaskan pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat dan manfaat yang ditimbulkannya bisa dalam bentuk material (keuntungan ekonomi) dan juga non-material (pengakuan dan penghargaan).

6. Process (proses)

Merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam menemukan penyebagian perilaku bermasalah yang dilakukan dalam atau oleh suatu organisasi. Beberapa proses yang digunakan untuk merumuskan masalah dalam organisasi antara lain: Pertama, proses pengumpulan input. Kedua, proses pengolahan input menjadi keputusan. Ketiga, prosesoutput, dan yang keempat, proses umpan balik.

7. Ideology (nilai dan/ atau sikap)

Sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Suatu nilai yang berlaku dalam masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Kemungkinan terjadinya konflik sangatlah besar mengingat nilai tersebut hidup dalam masyarakat yang plural dan heterogen (sebuah nilai yang dianut seringkali tidak sesuai dengan pandangan tiap kelompok).

Ketujuh hal tersebut di atas, dimaksudkan untuk mempersempit dan lebih mensytematiskan ruang lingkup pandangan para aktor pembuat kebijakan atau para analis kebijakan dalam mencoba menemukan penyebagian suatu persoalan yang datang dari masyarakat.

Harapan-harapan tersebut hanya akan terwujud manakala semua pihak yang terkait mengenai kebijakan meninggalkan egoisme masing-masing dan lebih mementingkan urusan bersama. Namun, ketika ego kelompok yang lebih dominan, maka harapan di atas hanyalah sebatas angan-angan belaka.

Permasalahan kebijakan menjadi sesuatu hal yang sangat rumit layaknya sebuah benang yang telah kusut. Beberapa tahap harus dilalui para perumus kebijakan dalam memformulasikan kebijakan. Hal tersebut harus ditambah dengan suramnya wajah negeri ini.

Negeri yang akhir-akhir ini tercoreng dengan korupsi, juga dengan kemiskinan yang kian mewarnai wajah negeri seribu pulau ini. Lengkaplah sudah jika potret buram negeri ini harus diburamkan lagi dengan bermacam-macam kebijakan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.



BAB 4 (EMPAT)

Perkembangan Kebijakan di Indonesia dan Praktik Blusukan Jokowi

Ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, masalah kemiskinan, atau tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah-masalah yang akhirnya melahirkan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia sejak sesaat setelah merdeka tahun 1945, hingga kini ketika presiden Joko Widodo berkuasa. Pro dan kontra dipastikan selalu lahir dan dianggap lumrah setelah satu kebijakan diputuskan. Berikut ini gambaran berbagai kebijakan yang lahir dari pemimpin Indonesia sejak masa Presiden Soekarno (Orde Lama) hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

A. KEBIJAKAN PUBLIK MASA PRESIDEN SOEKARNO (ORDE LAMA)

Beberapa contoh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa itu, antara lain: Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959, yakni menurunkan nilai uang. Uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan Rp1000 menjadi Rp100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp1000 menjadi Rp1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi. Kegagalan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ini semakin diperparah dengan pengeluaran pemerintah yang terkesan tidak hemat. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

Semua ketidaktepatan kebijakan yang dilakukan pada masa ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan untuk menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa dikatakan bahwa Indonesia berkiblat ke timur baik dalam hal politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Padahal kemampuan dari pemerintah yang belum menghuni untuk bisa menerapkan sistem ini.

Hal yang perlu dicermati pada era pemerintahan Soekarno adalah kebijakannya tentang dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan pada masa yang pernah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara, yaitu pendidikan sosialisme (1961-1966).

Menteri Pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan mengeluarkan Instruksi Umum yang berisi seruan kepada pengurus upaya membuang system pendidikan colonial dan mengutamakan patriotism. Selain itu, anak yang berusia 8 tahun wajib memperoleh pendidikan Sekolah Dasar. Namun, kebijakan tersebut saat itu menghadapi berbagai masalah, di antaranya jumlah sekolah dan guru yang belum memadai.

Pada saat itu sudah mulai diadakan ujian-ujian negara yang terpusat dengan sistem kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. Pada masa itu, siswa dan guru dituntut berdisiplin tinggi, terutama pada guru yang pada masa itu belum memiliki orientasi material. Pada prinsipnya, konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas social.

Sosialisme Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah, di tingkatan kebijakan, sampai penerapannya di lingkungan pendidikan formal, SMP, SMA, dan perguruan tinggi,merupakan salah satu cara menjalankan tujuan pendidikan bersamaan dengan tujuan negara.

Pemerintah membuat suatu kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut, dan lahirlah mata pelajaran Ilmu Kewargaan Negara atau Civics yang diajarkan di tingkat SMP dan SMA. Sosialisme Indonesia merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran tersebut. Pendidikan sosialisme Indonesia didapat melewati akal dan pengalaman empiris.

Seokarno pernah berkata: “Sungguh, alangkah hebatnya kalau tiap-tiap guru di perguruan taman siswa itu satu persatu adalah Rasul Kebangunan! Hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat ‘menurunkan’ kebangunan ke dalam jiwa sang anak, “ Dari perkataan Soekarno itu sangatlah jelas bahwa pemerintahan orde lama menaruh perhatian serius yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan.

Di bawah menteri pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan pendidikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanuasiaan yang dikenal sebagai “Panca Dharma Taman Siswa” dan semboyan “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” pada 1950 diundangkan pertama kali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian disempurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, dilanjutkan dengan UU No.14/1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional, dan UU No. 19/1965 tentang Pokok-Pokok Sitem Pendidikan Nasional Pancasila. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90 % bangsa Indonesia berpendidikan SD.

Indonesia di era Soekarno (Orde Lama), merupakan negara yang sarat dengan cita-cita sosialisme. Cita-cita sosialisme ini termasuk juga dalam bidang pendidikan. Statuta Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1951 sangat tegas menyatakan bahwa tujuan UGM adalah menyokong sosialisme pendidikan.

Namun pada tahun 1992, di bawah kekuasaan Orde Baru, statuta ini diganti dengan banyak perubahan pada isinya satu perubahannya adalah menghilangkan pasal mengenai tujuan menyokongsosialisme pendidikan Indonesia. Indonesia pada era tersebut sangat mendukung pendidikan sebagai satu alat akselarasi masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita UUD 1945.

Selain kolonialisme dan imperialisme, di mata Soekarno ada tantangan besar lain yang tak kalah pentingnya untuk dilawan, yakni elitisme. Elitisme

mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama rakyat kebanyakan. Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Soekarno, karena melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri.

Kalau dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi Indonesia merdeka.

Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa Marhaneisme"menolak tiap tindak borjuisme" yang, bagi Soekarno, merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Ia berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat.

Sebagaimana dikatakan oleh Ruth McVey, bagi Soekarno rakyat merupakan "padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx," dalam arti bahwa mereka ini merupakan "kelompok yang sekarang ini lemah danterampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi,akan mampu mengubah dunia."Dasar garis politik Persatuan Nasional telah dilukiskan. Bung Karno pada tahun 1926 dalam artikel "Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Kemudian garis politik persatuan nasional tersebut menjiwai dasar negara Pancasila 1 Juni 1945.

Dan ketika Bung Karno memegang kendali pemerintahan setelah Dekret Presiden Juli 1959 garis politik persatuan nasional diwujudkan sebagai politik "Nasakom" – Nasionalis, Agama,Komunis. (sesuai kondisi obyektif waktu itu dalam menghadapi nekolim). Seperti kita ketahui sejak Nopember 1945 sampai Juli 1959 Bung Karno tidak mempunyai kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif), tetapi hanya sebagai Kepala Negara.

Orde Lama merupakan satu fase yang berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah amanat UUD 1945 yangmenyebutkan salah satu cita-cita pembangunan

nasional adalah mencerdaskan bangsa. Di dalam kampus muncul kebebasan akademis yang luar biasa, ditandai dengan fragmentasi politik yang begitu hebat di kalangan mahasiswa. Mahasiswa bebas beroroganisasi sesuai dengan pilihan atau keinginannya [12]. Kebebasan berpendapat,memang sempat muncul juga pembredelan pers oleh Soekarno, namun relatif lebih baik dibandingkan masa Orde Baru yang pada suatu waktu (setelah peristiwa demonstrasimahasiswa 1978) pernah membredel 15 media massa sekaligus.

Inilah salah satu era keemasan bagi gagasan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Karakteristik kebijakan luar negeri Indonesia pada awal terbentuknya sangat ditentukan oleh kondisi bangsa yang masih prematur. Pemikiran- pemikiran politik Soekarno yang cenderung nasionalis radikal (Munawar Ahmad, 2007: 21) dan anti-kolonialis.

Semangat yang menarik selama pemerintahan Orde Lama adalah pergeserannya arah kebijakan politik eksternalnya yang tiba-tiba. Setelah memerdekakan Indonesia, Soekarno lebih condong ke Barat tapi berubah drastis saat mengetahui kenyataan Barat (dalam hal ini Amerika Serikat) tidak mendukung upaya diplomasi RI dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.

Akibatnya, Soekarno mengubah haluan politik eksternalnya ke Blok Timur yang dikenal sebagai lawan sentral Barat. Ini dibuktikanadanya kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet dan China serta dibukanya Poros Jakarta-Peking.Aliran romantisme rupanya sangat mempengaruhi kepribadian Soekarno. Ini terlihat dengan kebijakan luar negerinya yang lebih bersifat konfrontatif.

Baginya wilayah RI adalah sebagai mana pernah dimiliki Negara Kesatuan RI yang pertama yakni saat berada di bawah kekuasaan Majapahit. Akibatnya, Soekarno menganggap Semenanjung Malaya (yang meliputi Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam) sebagai bagian dari RI.

Kepercayaannya semakin tinggi saat dapat mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Politik konfrontatifnya amat kentara saat mendapati realita pembentukan negara Federasi Malaya oleh Inggris. Ia memandang hal tersebut sebagai upaya Barat, terutama Inggris,untuk memben-

tuk alat dalam melestarikan kehadiran dan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia (Mohammad Hatta, 1965: 140).

Perumusan kebijakan saat Orde Lama berkuasa juga sangat ditentukan oleh eskalasi politik internal Indonesia yang sedang bergejolak dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Banyak pergolakan politik baik nasional maupun daerah yang terjadi saat itu. Pemberontakan PKI di Madiun1948, pemberontakan bersenjata PERMESTA di Sulawesi Selatan, PRRI di Sumatra, Darul Islam Di Jawa Barat (Bambang Cipto, 2007: 89) benar-benar menguras energi politik, ekonomi dan birokrasi pemerintahan Soekarno.

Kebijakan pendidikan saat itu dilakukan secara sentralistik, sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (2000:2) bahwa kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan kepada prosesindoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar.

Dengandemikian pendidikan bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, bukan untuk kebutuhan pasar melainkan untuk orientasi politik. Indroktrinasi pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan di suasana perang dingin padasaat itu.

Pendidikan pada masa ini diarahkan untuk memenuhi kemandirian ekonomi Indonesia. Dimana-mana mulai dibuka lembaga-lembaga pendidikan baru (tentunya selain sekolah peninggalan Belanda) dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas pengetahuan rakyat.

Semangat diskriminatif di dalam sekolahformal mulai dikikis. Anak-anak dari kalangan buruh dan tani mulai bisa menikmati dan mengenyam bangku pendidikan. Secara yuridis, pemikuran tentang pendidikan nasional dapat dilacak dalamundang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah (lembaran Negara tahun 1950 nomor 550), yang pelaksanaannya ditegaskandalam UU no.12 th.1954, tentang pernyataan berlakunya UU no.4 th.1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia (lembaran Negaratahun 1954 nomor 38. Tambahan lembaran Negara nomor 550).

Tujuan dan dasar pendidikan pada orde Lama dapat dilihat pada pasal 3 dan 4.Pasal 3:" Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap danwarga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakatdan tanah air "Pasal 4:"Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia".

Dalam praktiknya, pendidikan dan pengajaran berfungsi sebagai media untuk mempertahankan kekuasaan rezim Soekarno. Menurut H.A.R Tilaar sebagaimana dikuti poleh Paul Suparno, pada zaman pra Orde Baru tampak jelas bahwa pendidikan diarahkan kepada kepentingan politik Negara, yaitu membangun nasionalisme, persatuan, dan penggalangan kekuatan bangsa.

Dalam konteks ini system pendidikan lebih diarahkan untuk menolak segala pengaruh asing. Tidak ada kebebasan berfikir, semua diarahkan ke nasionalisme sempit itu. Rezim Orde Lama tumbang seiring adanya gejolak di Jakarta pada akhir bulan September dan awal Oktober 1965.

Demonstrasi besar-besaran terjadi dengan tiga tuntutan:

1. Hapuskan cabinet dari unsure PKI,
2. Bubarkan PKI
3. Turunkan harga-harga.

Tapi lagi-lagi sangat disayangkan, konsep pendidikan ini akhirnya berakhir ketika pada tahun 1965 terjadi pembumihangusan gerakan kiri di Indonesia yang dilakukan oleh kekuatan militer di bawah pimpinan Soeharto dibantu oleh AS dan sekutunya.

B. Kebijakan Publik Masa Presiden Soeharto (Orde Baru)

Pada masa kepemimpinan presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Presiden Soeharto yang dikenal juga sebagai bapak pembangunan. Pada masa ini dikenal dengan sebutan Orde Baru/ Orba yang menerapkan sistem Demokrasi Pancasila.

Kebijakan perekonomian pada masa Orde Baru sebenarnya telah dirumuskan pada sidang MPRS tahun 1966. Pada sidang tersebut telah dikeluar-

kan Tap. MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan tersebut adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955.

Berdasarkan ketetapan tersebut, Presiden Suharto mempersiapkan perekonomian Indonesia sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Peraturan 3 Oktober 1966, tentang pokok-pokok regulasi
2. Mengeluarkan Peraturan 10 Pebruari 1967, tentang harga dan tarif
3. Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia
4. UU No. 1 Tahun 1967 , tentang Penanaman Modal Asing
5. UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

Di samping langkah-langkah tersebut di atas, Presiden Suharto juga melakukan pendekatan dengan negara-negara maju untuk penundaan pembayaran utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempatan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri.

Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI (Internasional Govermental Group on Indonesia) untuk memberikan pinjaman dana kepada Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru memang banyak menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat.

Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun, Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi.

Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara. Ini disebabkan

karena kekuatan politik yang besar oleh elite penguasa pada saat itu yaitu presiden Soeharto, yang berhasil membangun kekuatan politik yang berpihak kepadanya.

Hal ini berhasil, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN. APBN pada masa pemerintahan Orde Baru disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih ke arah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.

Pada dasarnya kebijakan ini sangat bagus, karena pinjaman yang digunakan akan membuahkan hasil yang nyata. Akan tetapi, dalam APBN tiap tahunnya cantuman angka pinjaman luar negeri selalu meningkat. Tetapi hal ini juga bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1977, Presiden menyatakan bahwa dana-dana pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri harus meningkat. Padahal, ketergantungan yang besar terhadap pinjaman luar negeri akan menimbulkan akibat-akibat. Di antaranya akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu derelgulasi perbankan dan reformasi perpajakan.

Akan tetapi, kebijakan demikian membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Akibatnya, kebijakan untuk mengurangi bantuan luar negeri tidak dapat terjadi karena jumlah pinjaman luar negeri terus meningkat.

Padahal pada saat bersamaan persentase pengeluaran rutin untuk membayar pinjaman luar negeri terus meningkat. Hal ini jelas menggambarkan betapa APBN pada masa pemerintahan Orde Baru sangat bergantung pada pinjaman luar negeri. Sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat terpenuhinya keinginan pemerintah untuk meningkatkan tabungannya (ekonomikro.blogspot.com).

Dari penjelasan langkah-langkah kebijakan ekonomi pada masa orde baru, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, bisa kita lihat bagaimana peran model elit di sini sangat kental terasa dalam setiap kebijakan dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sektor ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya suatu kestabilan politik yang diciptakan oleh elite penguasa pada waktu itu, yaitu Presiden Soeharto, sehingga proses pengambilan kebijakan dan tindakan yang dilakukan di setiap sektor khususnya dalam sektor perekonomian dan pembangunan yang menjadi sektor tujuan utama pemerintahan saat itu bisa tercapai dengan cepat dan menjadi kesepakatan bersama antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Di sinilah peran elite penguasa dalam konteks model elit bisa terlihat manfaatnya dalam perumusan maupun pengimplementasian kebijakan pemerintah. Tetapi di sini juga bisa terlihat bagaimana dominasi elit untuk mempengaruhi asumsi publik dan pengarahan setiap kebijakan apakah berdasarkan kepentingan publik ataukah hanya berdasarkan kepentingan kelompok atau bahkan individu elit itu sendiri.

Di mana kebijakan yang dibuat pada saat itu memang banyak mempengaruhi perbaikan taraf hidup di dalam masyarakat, tetapi hal ini menjadi sangat bermasalah pula pada kehidupan di masa depan. Dengan kurangnya pertimbangan yang ada, seperti proses pembangunan dan peningkatan perekonomian yang sangat bergantung pada pinjaman luar negeri, yang diakibatkan dari adanya prinsip yang digunakan yaitu prinsip berimbang, yang saat itu merupakan pilihan prinsip yang sangat tidak tepat.

Karena hanya memberikan perhatian pada sektor perekonomian dalam negeri saja. Padahal proses perekonomian dan pembangunan yang ada di dalam negeri merupakan proses yang terjadi karena adanya bantuan hutang luar negeri. Hal ini membuat tidak adanya proses yang berkala untuk mengem-

balikan hutang luar negeri yang ada. Malah justru membuat keadaan yang serba ketergantungan dengan hutang luar negeri. Ketergantungan pinjaman luar negeri ini sangat berdampak pada proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang terhambat. Selain itu juga, menimbulkan adanya resiko kebocoran,korupsi, dan penyalahgunaan. Yang dalam realitanya benar-benar terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Dalam hal ini seperti diamini oleh jajaran pemerintahan saat itu , yang hampir seluruh jajaran pemerintahan melakukan tindak korupsi di dalam tubuh pemerintah.

Yang dalam perkembangannya, pertumbuhan pembangunan dan perekonomian saat itu yang sangat pesat, hanya menjadi sebuah kesejahteraan sesaat, yang berdampak panjang hingga saat ini pada masa reformasi, yaitu hutang luar negeri yang begitu besar, dan praktik KKN yang bersumber pada masa orde baru, dalam prosesnya hingga sekarang seperti menjadi suatu budaya di dalam pemerintahan dan masyarakat yang sulit sekali untuk dihapuskan atau diminimalisasi kemungkinannya.

Awal dari orde baru bergulir di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, nama orde baru diciptakan demi membedakan dengan pemerintahan orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Perbedaan nama rezim itu bukan saja secara harfiah, maupun perbedaan sang pemimpin orde. Tapi juga berimplikasi kepada pergeseran secara fundamental misi dari pemerintah serta metode yang tepat untuk mencapai misi tersebut. Radius Prawiro yang mantan Deputi menteri untuk urusan Bank Sentral merangkap Gubernur Bank Indonesia(1966-1973), dalam bukunya Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi menyatakan bahwa, misi orde baru dapat disarikan sebagai pembangunan ekonomi.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi, termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro menjadi ujung tombak, padahal pada zaman orde lama ekonomi dianaktirikan, tanpa kebijakan ekonomi yang jitu dan terencana, mustahil ekonomi Indonesia bisa sehat kembali. Faktor politik, budaya dan sosial juga berperan penting dalam membangun budaya ekonomi baru itu.

Pada Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), memilihSoeharto sebagai pejabat Presiden. Setahun kemudian MPRS memilih Soeharto sebagai presiden. Pada Juni 1968, presiden Soeharto mengangkat kabinet baru. R.E. Elson dalam bukunya Soeharto, Sebuah Biografi Politik menuliskan bahwa di antara tugas-tugas pertamanya sebagai presiden adalah membentuk kabinet baru, yang diberi nama Kabinet Pembangunan Pertama untuk membedakan kabinet itu dari kabinet-kabinet sebelumnya yang menekankan berbagai aspek rekayasa sosial yang berorientasi ideologi.

Presiden Soeharto mendukung penuh tim ekonomi pemerintah dan rekomendasi mereka sekalipun kebijakan yang diambil tidak populer secara politis. Staf ahli ekonomi Presiden Soeharto terkenal sebagai para teknokrat atau sering disebut "mafia Berkeley" karena beberapa anggotanya alumni University of California at Berkeley. Tim ini terpisah dari kabinet yang anggotanya terdiri dari Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Selanjutnya beberapa tim menyusul seperti Rachmat Saleh, Arifin Siregar, J.B. Sumarlin dan Radius Prawiro. Orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional.

Menyoal dunia pendidikan, orde baru mengusung ideologi "keseragaman" sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTANAS, UMPTN, menjadi seleksi penyeragaman intelektualitas peserta didik. Selain itu, masa ini juga diwarnai dengan ideologi militeralistik dalam pendidikan yang bertujuan untuk melanggengkan status quo penguasa. Pendidikan militeralistik diperkuat dengan kebijakan pemerintah dalam penyiapan calon-calon tenaga guru negeri.

Soeharto mempercayakan Widjojo Nitisastro sebagai pemimpin informal dari tim ekonomi ini. Radius Prawiro menyatakan ada 3 hal nilai yang menonjol dalam menciptakan tatanan ekonomi baru, yaitu gotong royong, trilogi pembangunan, dan Pragmatisme. Banyak cara gotong royong yang telah diterjemahkan ke dalam tindakan politik dan kebijakan lainnya. Dalam masa sulit, pemerintah telah mengimbau warga negara untuk mendukung kebijakan yang merupakan langkah terbaik bagi kepentingan nasional meskipun kebijakan tersebut menuntut pengorbanan dari banyak individu.

Terutama saat awal orde baru, gotong royong punya dua arti praktis. Pertama, konsep ini merupakan alternatif budaya terhadap paham komunisme.

Gotong royong menjadi basis ideologi yang berakar pada budaya bangsa untuk memajukan kebijakan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial, toleran terhadap kesejahteraan individu, dan tidak bertentangan dengan ekonomi pasar bebas. Kedua, gotong royong punya pengaruh memoderatkan proses perumusan kebijakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh hubungan erat antara gotongroyong dengan dua konsep budaya Indonesia lainnya; musyawarah yang berarti dialog,dan mufakat yang berarti konsensus.

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto "membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia". Pada tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). Depdiknas di bawah Menteri Wardiman Djojohadiningrat (kabinet pembangunan VI) mengedepankan wacana pendidikan "link and match" sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu.

Sense of education ala Soekarno kemudian dilanjutkan lebih inovatif lagi pada periodesasi kepemimpinan Soeharto. Di zaman pemerintah Orde Baru misalnya, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat teknis.

Dari sisi ideologi, pendidikan sebenarnya telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan Presiden Soeharto,sebenarnya masalah pen-

didikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yang ada. Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI baru) sejak tahun 1931 (PNI lalu pecah menjadi Partai Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia), konsep pentingnya pendidikan telah diajukan Hatta dalam Pasal 4 Konstitusi PNI, yaitu untuk mencerdaskan rakyat dalam hal pendidikan politik, pendidikan ekonomi, dan pendidikan sosial (pidato Bung Hatta dalam reuni Pendidikan Nasional Indonesia yang diterbitkan di Bogor tahun 1968).

Namun, sejalan dengan pemerintahan Soeharto yang otoriter, tampaknya isu tentang pendidikan mulai dikesampingkan, terutama mungkin terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan politik benar-benar dilakukan sepenuhnya. Sejak saat itu kita lebih melihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintahan soeharto untuk melakukan indoktrinasi.

Kita masih ingat bagaimana, khususnya dalam sejarah, berbagai macam pelajaran sejarah yang ada secara tumpang tindih diberikan berkali-kali, dari SD, SMP, dan SMA, bahkan perguruan tinggi dalam bentuk P4. Masalahnya, isi pelajaran sejarah yang ada tidak lebih dari justifikasi mengenai G30-S-PKI, Serangan Fajar, atau berbagai pembenaran konstitusional terhadap kebijakan pemerintah saat itu.

Tidak heran apabila sistem pendidikan yang adadi Indonesia amat tersentralisasi dengan 80 persen dari kurikulum yang ada ditentukan oleh pusat (Ibrahim, 1998). Contoh lain, dalam hal dana instruksi presiden (inpres) Yang lebih memprihatinkan, pendidikan dinilai hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan.

Dalam konteks demikian, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, dan besar kepala, tanpa memiliki kecerdasan emosional dan spiritual yang memadai. Makna

pendidikan substansial, yaitu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jati dirinya secara “utuh”dan “paripurna” melalui sebuah proses yang dialogis, interaktif, efektif, menarik, dan menyenangkan, nyaris tak pernah bergaung dalam dunia pendidikan kita. Dari tahun ketahun, atmosfer pembelajaran di sekolah tak lebih “memenjarakan” peserta didik untuk bersikap serba patuh, pendiam, miskin inisiatif dan kreativitas.

Sebagaimana sistem politik yang ada pada era ini, maka manajemen pendidikan dilaksanakan secara sentralistis. Semua kebijakan sampai detail ditentukan oleh pusat. Sekolah sebagai lembaga yang langsung melaksanakan proses pembelajaran tidak memiliki kewenangan yang memadai.

Kebijakan ini memiliki implikasi perencanaan dan upaya peningkatan mutu bersifat top-down. Akibatnya, peningkatan mutu tidak ada disekolah-sekolah, dan hanya ada di pusat. Namun sejauh itu, sampai orde baru berakhir diganti orde reformasi peningkatan mutu juga belum terujud. Karena peningkatankualitas sekolah tidak bisa dilaksanakan dengan pendekatan fungsi produksi.

Peningkata mutu sekolah bersifat interaktif dan kontekstual, yang sangat terpengaruh oleh kondisi sekolah sebagai suatu entitas yang utuh dan mandiri.Sejalan dengan pemerintahan Soeharto yang otoriter, tampaknya isu tentang pendidikanmulai dikesampingkan, terutama terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan politik benar-benar dilakukan sepenuhnya.

Sejak saat itu kita lebihmelihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintahan Soehartountuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat. Dalam konteks ini, sudah saatnya para pelaku dan pemerhati pendidikan perlu mencoba menyelami dunia politik dan seluk beluknya. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif untuk memengaruhi para pengambil keputusan (politikus) di bidang pendidikan.

Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi menjadi objek politisasi pendidikan dan terkungkung dalam dunianya,melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan ikut menjadi agen perubahan. Rezim Orde Baru amat

yakin akan terjadi mukjizat yang meneteskan hasil pembangunan kepada rakyat miskin (trickle down effects).

Kejayaan politik dan ekonomi ternyata tak langgeng karena modal utama pembangunan, yaitu manusia, terabaikan. Kondisi itu berlanjut hingga kini karena bangsa kita kurang memiliki modal manusia berkualitas yang diperlukan guna menopang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Sepertinya, pemerintah selama ini tetap tak sadar akan fungsi ekonomi politik pendidikan. Sehingga, akses terhadap pendidikan dan kesehatan amat buruk dan ini membuat sepertiga atau separuh penduduk Indonesia masih rentan terhadap masalah kemiskinan, kesehatan dan korupsi.

Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman. Tilaar (2002:3) menjelaskan pendidikan di masa ini diarahkan kepada uniformalitas atau keseragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pakaian seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi sosial masyarakat, semuanya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogen. Pada masa ini tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat, sehingga melahirkan disiplin semu dan melahirkan masyarakat peniru.Pada masa ini pertumbuhan ekonomi yang dijadikan panglima.

Pembangunan tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga melahirkan sistem yang tidak peka terhadap daya saing dantidak produktif. Berbagai layanan publik tidak mempunyai akuntabilitas sosial olehkarena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemennya.

Bentuk pembangunan pada saat itu mengingkari kebhinekaan serta semakin mempertajam bentuk primordialisme. Penerapan pendidikan tidak diarahkan lagi pada peningkatan kualitasmelainkan pada target kuanti

Dalam sistem pendidikan yang ada, berkembanglah ideologi pasar sebagai konsekuensi Indonesia berada dalam peta kapitalisme global. Pendidikan direndahkan posisinya sebagai alat elevasi sosial untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ilmu direndahkan menjadi deretan angka-angka indeks prestasi (IP).

Akses masuk semakin terbatas karena formasi sosial tidak memungkinkan warga masyarakat kebanyakan (miskin) menginjak bangku sekolah yang lebih tinggi. Kecenderungan mahasiswa berasal dari kalangan menengah ke atas terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian majalah Balairung UGM pada tahun 2000 membuktikan terjadi tren penurunan anak buruh, petani, dan anak guru yang menginjak bangku kuliah di UGM. Karena pada saat yang sama indoktrinasi dari negara juga berlangsung, muncul kritik-kritik dari kalangan pengamat pendidikan yang kritis namun liberal yang memandang terjadinya paradoks dalam dunia pendidikan karena sama sekali tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Banyak muncul ketidakpuasan dan perlawanan dari dalam kalangan akademisi pendidikan terhadap intervensi negara dalam kurikulum pendidikan. Ketidakpuasan muncul karena mereka menganggap tidak efisien. Ketidakpuasan dan perlawanan dari dalam kampus ini menyemai bibit perlawanan mahasiswa.

Pada tahun 1994 misalnya berdiri Dewan Mahasiswa UGM yang tegas menolak korporatisme negara terhadap kampus. Langsung atau tidak langsung,. Demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 merupakan imbas dari kebijakan pendidikan yang korporatis dan tidak demokratis di perguruan-perguruan tinggi. Kemandirian suatu bangsa tidak bisa ditawar-tawar. Bangsa yang tidak mandiri dalam banyak hal, akan sulitmaju, terutama menyangkut kebutuhan pokok suatu bangsa. Masalah ketidak mandirian itu pula yang membuat bangsa Indonesia tetap tidak stabil, terutama dari sisi ekonomi.

Dari sisi ideologi, pendidikan sebenarnya telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utamadalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Di awal pemerintahannya, Soeharto ketika itu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan utama pemerintah.

Dalam era ini dikenal sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar terjadi suatu loncatan yang sangat signifikan dengan adanya INPRES Pendidikan Dasar. Tetapi

sayang sekali INPRES Pendidikan Dasar belum ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas tetapi baru kuantitas. Dalam era pembangunan nasional selama lima REPELITA yang ditekankan ialah pembangunan ekonomi sebagai salah satu dari TRILOGI pembangunan. Maka kemerosotan pendidikan nasional telah berlangsung. Selain itu sistem ujian negara (EBTANAS) telah berubah menjadi bumerang yaitu penentuan kelulusan siswa menurut rumus-rumus tertentu.

Akhirnya di tiap-tiap lembaga pendidikan sekolah berusaha untuk meluluskan siswanya 100%. Hal ini berakibat pada suatu pembohongan publik dan dirinya sendiri dalam masyarakat. Oleh sebab itu era Orde Baru pendidikan telah dijadikan sebagai indikator palsu mengenai keberhasilan pemerintah dalam pembangunan.

Dari hasil manipulasi ujian nasional sekolah dasar kemudian meningkat ke sekolah menengah dan kemudian meningkat ke sekolah menengah tingkat atas dan selanjutnya berpengaruh pada mutu pendidikan tinggi. Walaupun pada waktu itu pendidikan tinggi memiliki otonomi dengan mengadakan ujian masuk melalui UMPTN, tetapi hal tersebut tidak menolong.

Pada akhirnya hasil EBTANAS juga dijadikan indikator penerimaan di perguruan tinggi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi maka pendidikan tingginegeri mulai mengadakan penelusuran minat dari para siswa SMA yang berpotensi.

Cara tersebut kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi lainnya. Di samping perkembangan pendidikan tinggi dengan usahanya untuk mempertahankandan meningkatkan mutunya pada masa Orde Baru muncul gejala yaitu tumbuhnya perguruan tinggi swasta dalam berbagai bentuk. Hal ini berdampak pada mutu perguruan semakin menurun walaupun dibentuk KOPERTIS-KOPERTIS sebagai bentuk birokrasi baru.

Ada beberapa kebijakan pokok dalam pendidikan pada masa orde baru, yaitu :

Yaitu penyesuaian isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber dayamanusia yang diperlukan. Kebijakan ini secara eksplisit muncul pada pelita I, II, III, I dan V. Setelah perluasan kesempatan belajar,

sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan buta aksara. Kenyataan bahwa masih banyak penduduk yang buta huruf ditanggapi pemerintahan Soeharto dengan pencanangan penuntasan buta huruf pada 16 Agustus 1978. Tekniknya adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau "kejar". Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tujuannya, mereka akan mampu membaca serta menulis huruf dan angka Latin.

Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan dalam setiap kejar bersifat fleksibel. Hingga saat ini program kejar yang sudah semakin berkembang masih tetap dijalankan.

Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik penduduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk 80 juta jiwa,Indonesia masih memiliki 39,1 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus butahuruf. Sepuluh tahun kemudian, menurut sensus tahun 1980, persentase itu menurunmenjadi hanya 28,8 persen.

Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9 persen.Sasaran yang terungkap dalam lima Pelita dalam PJPT I menunjukkan runtutan sasaranyang sistematis; dimulai dengan sektor agraris dan secara bertahap sampai dengan sektor industri.

Sayangnya, dalam prakteknya, sektor agraris seakan-akan ditinggalkan begitusaja, dan diganti sepenuhnya dengan industrialisasi. Tampak pemerintah begitu berambisimengikuti pola Barat, yaitu industrialisasi. Perjalanan dunia pendidikan Indonesiaternyata kembali terulang pada masa pemerintahan

Orde Baru, di mana terjadi Liberalisasi Ekonomi tahap kedua. Focus pembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi daripada pembangunan manusia. Departemen Pendidikan pun tumbuh menjadi kementerian yang termarjinalisasi dibandingkan dengan departemen lain.

Rosser (2002) mencatat, padatahun 1980-an Menteri Sekretaris Negara (saat itu dipimpin Sudharmono dan Ginandjar Kartasasmita) dan Menteri

Riset dan Teknologi (saat itu dipimpin BJ Habibie) merupakan kementerian yang memegang peran utama dalam perencanaan pembangunan. Corak politik pemerintah yang demikian itu selanjutnya menimbulkan paling kurang enam masalah pendidikan.

1. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum memperoleh pendidikan.
2. Mutu lulusan pendidikan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan mutu lulusan pendidikan di negara lain.
3. Pendidikan diIndonesia belum menjadi pranata sosial yang kuat dalam memberdayakan sumber daya manusia Indonesia.
4. Pendidikan di Indonesia belum berhasil melahirkan lulusan yang mengamalkan keimanan, ketakwaan, aklak mulia dan budi pekerti luhur.
5. Pendidikan belum mampu mendorong lahirnya masyarakat belajar (learning society) dalam rangka pelaksanaan konsep belajar seumur hidup.
6. Dunia pendidikan kurang sejalan dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan lokal.

Dahulu kualitas pendidikan bangsa kita itu diatas negara-negara tetangga seperti Malaysia, tapi saat ini menapa justru terjadi sebaliknya. Sudah dari zaman Soeharto sebenarnya bukannya sekarang. Pak Soeharto kan yang pertama kali mengadakan SPP.Jadi seolah pendidikan itu tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang yang mampu.

Sejak pelita I disadari pentingnya memberikan kesempatan yang sama dan lebih luas tentang pendidikan untuk semua warga negara. Kebijakan pemerataan dan perluasan pendidikan dilaksanakan melalui wajib belajar Sekolah Dasar. Sejak awal kekuasaannyasebagai Presiden RI, Soeharto berupaya menggarap pendidikan sebagai hal yang harus dibenahi secara serius. Tiga hal yang cukup populer di masyarakat adalah program wajib belajar, pembangunan SD inpres, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar.

Dengan mencanangkan "wajib belajar 9 tahun", termasuk juga yang tak kalah populer adalahdibukanya program SD Inpres untuk daerah-daerah terpencil dan terisolir diberbagai belahan daerah di Indonesia. Program wajib belajar dicanangkan pada 2 Mei 1984, diakhir Pelita (Pembangunan Lima

Tahun) III. Dalam sambutannya saat itu, Soeharto menyatakan, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak usia 7-12 tahun di belahan bumi Indonesia mana pun dalam-menikmati pendidikan dasar.

Seremonial pencanangan dilakukan secara besar-besaran diStadion Utama Senayan, Jakarta.Program ini memang telah direncanakan saat Pelita II. Tidak murni seperti kebijakanwajib belajar di negara lain yang memiliki unsur paksaan dan ada sanksi bagi yangmengabaikan.

Pemerintah hanya mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yang sudah cukup umur ke sekolah. Negara bertanggung jawab terhadap penyediaan saranadan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti gedung sekolah, peralatan sekolah, disamping tenaga guru dan kepala sekolah. Karena tidak ada sanksi, dalam prosesnyahingga kini, masih ditemukan anak-anak pada kelompok usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah.

Upaya pelaksanaan wajib belajar 9 tahun pada kelompok usia 7-15 tahun dimulai saatdiresmikannya Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994.Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1Tahun 1994.

Program wajib belajar yang dimulai Soeharto di akhir Pelita III diakui telahmeningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pendidikan dasar.Sebelum wajib belajar dicanangkan, upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar didahului dengan dikeluarkannya Inpres No 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD.

Barangkali tidak semua kita masih ingat bagaimana, Bank Dunia pada tahun-tahun akhir 1970-an dan awal tahun 1980-an memberikan resep untuk meningkatkan efektivitas pendidikan guru dengan merombak kurikulum IKIP yang semula mirip kurikulum Universitas menjadi khas IKIP, dimana kurikulum baru ini terlalu berlebih-lebihan menekankan pembelajaran dan mengurangi secara besar-besaran materi bidang studi. Para pedagog yang tidak sefaham dengan resep ini dengan sinis mengatakan bahwa “di kurikulum IKIP yang baru ini, “bagaimana cara memegang kapur pun diajarkan”.

Dari kebijakan ini hasilnya luar biasa, mutu guru lulusan IKIP merosot-tajam. Guru menguasai berbagai pendekatan dan metodologi mengajar, tetapi tidak menguasai apa yang harus diajarkan.Kebijakan ke dua dalam peningkatan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru lewat projek peningkatan mutu guru yang dilakukan dengan model pelatihan guru yang sangat terencana mulai dari teori, praktik sampai on the job training di sekolah-sekolah masing-masing.

Mereka yang dilatih di pusat menjadi guru inti, yang bertugas mengembangkan pelatihan bagi para guru di daerah masing-masing. Proses ini, berhasil melatih dan meningkatkan kualitas kemampuan professional ribuan guru.Sayangnya, ketika beberapa tahun proyek telah usai dan evaluasi dilakukan oleh lembagaindependen, kesimpulan sangat menarik. Yakni, pelatihan telah berhasil meningkatkankualitas profesional guru tetapi tidak berhasil meningkatkan mutu siswa. Karena peningkatan kualitas kemampuan professional guru belum menjamin peningkatan kualitas pembelajaran. Terdapat faktor sekolah sebagai suatu entitas yang utuh.

Sejak pelita I s.d pelita V mutu pendidikan terus-menerus dijadikan salah satu kebijakan pokok. Peningkatan mutu pendidikan di era orde baru cenderung secara patuhmelaksanakan kebijakan Bank Dunia.(Zamroni, 2009). Atmosfer pembelajaran dalamdunia persekolahan kita terpasung dalam situasi monoton, kaku, dan membosankan,sehingga gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral sepertiyang didambakan oleh masyarakat.

Paling tidak ada dua argumen yang dapat dikemukakan. Pertama, diterapkannya sistem single-track yang “membutakan” peserta didik dari persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya, sehingga tidak memiliki sikap kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hidup. Kedua, para pengambil kebijakan menjadikan dunia pendidikan meminjam istilah Zamroni sebagai engine of growth; penggerak dan loko pembangunan.

Agar proses pendidikan efisien dan efektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan danteori-teori.Namun, disadari atau tidak,

kebijakan semacam itu justru membikin dunia pendidikan menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi denganmunculnya berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional yang ditandai dengan melimpahnya pengangguran terdidik. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah di era orde baru juga menekankan ketersediaan fasilitas, seperti pergedungan dan ruang kelas, laboratorium, dan buku teks disamping pembaharuan kurikulum.

Sesuai dengan gerakan pembangunan telah disadari sejak pelita I akan langkanya tenaga-tenaga terampil. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan mendapat prioritassejak pelita I s.d pelita V. Hingga awal tahun 90-an menurut Dody Heriawan Priatmoko, paling tidak ada 3 permasalah pendidikan di Indonesia, yakni : Pertama, adalahkurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikanhanya terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Kedua, adalah rendahnya tingkat Relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yangmenganggur. Data BAPPENAS yang dikumpulkan sejak 1990 menunjukan angka penganggur terbuka yang di hadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47 %, Diploma.

C. KEBIJAKAN PUBLIK PADA ERA REFORMASI

Pada masa reformasi yang lahir dari tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan yang dilatarbelakangi oleh keadaan yang parah saat itu, yaitu dampak dari krisis moneter. Keadaan tersebut membuat orang nomor satu di Indonesia, Soeharto yang menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun menyatakan mundur dari jabatannya. Oleh karena kondisi itu, dimulailah era reformasi yang diinginkan rakyat dengan diangkatnya presiden BJ. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.

Pada masa ini tidak hanya sektor ketatanegaraan yang mengalami perubahan, sektor perekonomian juga mengalami perubahan. Sehingga stabilitas politik yang sudah terjalin selama 32 tahun terpaksa mengalami perubahan agar menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Akan tetapi, selama masa kepemimpinan presiden BJ. Habibie, belum ada manuver-manuver yang tajam di dalam sektor perekonomian. Karena kondisi saat itu lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan untuk menciptakan kestabilan politik pasca tergulingnya pemimpin orde baru, Soeharto.

Masa pemerintahan Habibie ini hanya berlangsung selama satu tahun, karena naiknya Habibie menggantikan Soeharto ini diterima dengan hati kecewa dan cemas di kalangan yang amat luas di kalangan masyarakat. Kabinet yang dibentuk oleh Habibie diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, diantaranya adalah :

Pembebasan Tahanan Politik

Secara umum tindakan pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisiyang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi.

Contohnya : pembebasan tahanan politik kaum separatis tokoh PKI, Amnesti diberikan kepada Mohammad Sanusi dan orang-orang lain yang ditahan setelah Insiden Tanjung Priok, selain itu Habibie mencabut Undang-Undang Subversi dan menyatakan mendukung budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Orde Baru.

Kebebasan Pers

Dalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, banyak bermunculan media massa, kebebasan berasosiasi organisasi pers sehingga organisasi alternatif seperti AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) dapat melakukan kegiatannya, tidak ada pembredelan-pembredelan terhadap media tidak seperti pada masa Orde Baru, kebebasan dalam penyampaian berita, dimana hal seperti ini tidak pernah dijumpai sebelumnya pada saat kekuasaan Orde Baru. Cara Habibie memberikan kebebasan pada Pers adalah dengan mencabut SIUPP.

Pembentukan Parpol dan Percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999

Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan di bidang politik lainnya di antaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Menjelang Pemilu 1999, Partai Politik yang terdaftar mencapai 141 dan setelah diverifikasi oleh Tim 11 Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 98 partai, namun yang memenuhi syarat mengikuti Pemilu hanya 48 Par-

pol saja. Selanjutnya tanggal 7 Juni 1999, diselenggarakan Pemilihan Umum Multipartai.

Penyelesaian Masalah Timor Timur

Sejak terjadinya insident Santa Cruz, dunia Internasional memberikan tekanan kepada Indonesia dalam masalah hak asasi manusia di Tim-Tim. Habibie mengambil sikap pro aktif dengan menawarkan dua pilihan bagi penyelesaian Timor-Timur yaitu di satu pihak memberikan setatus khusus dengan otonomi luas dan dilain pihak memisahkan diri dari RIS sebulan menjabat sebagai Presiden habibie telah membebaskan tahanan politik Timor-Timur, seperti Xanana Gusmao dan Ramos Horta.

Sementara itu di Dili pada tanggal 21 April 1999, kelompok pro kemerdekaan dan pro intergrasi menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan oleh Panglima TNI Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan Uskup Baucau Mgr. Basilio do Nascimento. Tanggal 5 Mei 1999 di New York Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama disaksikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakan melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur untuk mengetahui sikap rakyat Timor-Timur dalam memilih kedua opsi di atas.

Tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman. Namun keesokan harinya suasana tidak menentu, kerusuhan di mana-mana. Suasana semakin bertambah buruk setelah hasil penentuan pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999 yang menyebutkan bahwa sekitar 78,5 % rakyat Timor-Timur memilih merdeka. Pada awalnya Presiden Habibie berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Timur lebih memilih opsi pertama, namun kenyataannya keyakinan itu salah, di mana sejarah mencatat bahwa sebagian besar rakyat Timor-Timur memilih lepas dari NKRI.

Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya

Presiden Habibie – dengan Instruksi Presiden No. 30/1998 tanggal 2 Desember 1998 – telah mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN, namun pemerintah dinilai gagal dalam melaksanakan agenda Reformasi untuk memeriksa harta Soeharto

dan mengadilinya. Hal ini berdampak pada aksi demontrasi saat Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 Nopember 1998, dan aksi ini mengakibatkan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat. Karena banyaknya korban akibat bentrokan di kawasan Semanggi maka bentrokan ini diberi nama ”Semanggi Berdarah” atau ”Tragedi Semanggi”

Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban Trisakti

Pemberian gelar Pahlawan Reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugrahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan mahasiswa sebagai pelopor gerakan Reformasi.

Bidang Ekonomi

Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Kemudian di awal tahun selanjutnya kembali pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi.

Untuk masalah distribusi sembako utamanya minyak goreng dan beras, dianggap kebijakan yang gagal. Hal ini nampak dari tetap meningkatnya harga beras walaupun telah dilakukan operasi pasar, ditemui juga penyelundupan beras keluar negeri dan penimbunan beras.

Pada Bidang Manajemen Internal ABRI

Pada masa transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, banyak perubahan-perubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran konsep dan organisatornya. ABRI telah melakukan kebijakan-kebijakan sebagai langkah perubahan politik internal, yang berlaku tanggal 1 April 1999.

Kebijakan tersebut antara lain: pemisahan POLRI dari ABRI, Perubahan Stat Sosial Politik menjadi Staf Teritorial, Likuidasi Staf Karyawan, Pengu-

rangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II, pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada, kometmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu dan perubahan Staf Sospol menjadi komsos serta pembubaran Bakorstanas dan Bakorstanasda.

Perubahan di atas dipandang positif oleh berbagai kalangan sebagai upaya reaktif ABRI terhadap tuntutan dan gugatan dari masyarakat, khususnya tentang persoalan eksis peran Sospol ABRI yang diimplementasikan dari doktrin Dwi Fungsi ABRI.

Kondisi Sosial

Kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 90-an semakin meluas dan brutal, konflik antar kelompok sering terkait dengan agama seperti di Purworejo juni 1998 kaum muslim menyerang lima gereja, di Jember adanya perusakan terhadap toko-toko milik cina, di Cilacap muncul kerusuhan anti cina, adanya teror ninja bertopeng melanda Jawa Timur dari malang sampai Banyuangi. Isu santet menghantui masyarakat kemudian di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri seperti Aceh, begitu juga dengan Papua semakin keras keinginan membebaskan diri. Juli 1998 OPM mengibarkan bendera bintang kejora sehingga mendapatkan perlawanan fisik dari TNI.

Pada tanggal 14 Oktober 1999 Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR namun terjadi penolakan terhadap pertanggungjawaban presiden karena Pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rezim Orba. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR Amien Rais menutup Rapat Paripurna sambil mengatakan, ”dengan demikian pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak”. Pada hari yang sama Presiden habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari pencalonan presiden.

Selanjutnya pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya. Padahal banyak sekali warisan masalah-masalah yang diwariskan masa pemerintahan orde baru, seperti masalah KKN yang membudaya, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Justru terjadi masalah yang melibatkan presiden pada skandal Bru-

neigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati Soekarno Putri.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, banyak masalah-masalah yang menuntut adanya sebuah pemecahan yang dilakukan demi memperbaiki sektor ekonomi dan penegakan hukum. Pada masa ini, Megawati Soekarno Puteri mengeluarkan beberapa kebijakannya dalam sektor perekonomian, antara lain :

1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
2. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
3. Pada masa ini juga, ada sebuah realisasi untuk menangani permasalahan korupsi, seperti terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi terbentuknya komisi ini belum memberikan suatu gebrakan yang signifikan dalam usaha menangani permasalahan korupsi yang sangat serius dan menjadi perbincangan publik pada masa itu. Permasalahan korupsi ini juga sangat berdampak pada kestabilan perekonomian dan perkembangan pembangunan di Indonesia, karena banyaknya para investor yang ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Permasalahan korupsi ini juga lah yang membuat kepercayaan dunia Internasional terhadap Indonesia menjadi berkurang.

D. SBY YANG PRO-POOR, PRO-JOB, PRO GROWTH, dan PRO ENVIRONMENT

Selanjutnya pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dikeluarkan beberapa kebijakan yang cukup kontroversial. Di antaranya mengurangi subsidi anggaran dana BBM yang disebabkan karena

harga minyak dunia yang mengalami kenaikan dan selanjutya dana subsidi tersebut dialihkan kepada sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan, serta bidang-bidang lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama kemudian melahirkan kebijakan kontroversial kedua yakni BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang memberikan uang langsung kepada rakyat miskin. Meski menyenangkan masyarakat miskin secara langsung, toh kebijakan ini dilnilai sebagian kalangan sebagai kebijakan yang tidak efektif karena banyak rakyat miskin yang tidak tersalurkan dana kebijakan ini, selain itu juga kebijakan ini menimbulkan berbagai masalah sosial.

Dalam upaya peningkatan pendapatan perkapita, pada masa kepemimpinan Presiden SBY mengundang investor untuk hadir di Indonesia yang selanjutnya memberikan janji untuk dapat memperbaiki iklim investasi yang ada di Indonesia. Usaha ini dilaksanakan dengan salah satu contoh diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Hal ini diharapkan bisa memberikan pengarahan yang baik kepada kepala-kepala daerah untuk dapat mengerti dan memahami dunia investasi sehingga bisa melakukan hal yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin inilah yang mendasari kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.

Bukan hanya itu, pada periode ini pemerintah juga melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil di antaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada praktiknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini. Pada pertengahan bulan Oktober 2006, Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.

Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin semakin menajam dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi.

Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Kapabilitas sistem politik dapat diartikan sebagai kemampuan sistem politik yang dapat digunakan untuk mematangkan pembangunan politik di suatu negara. Menurut Almond keamampuan sistem politik terhadap kapabilitas sistem politik pada umumnya terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif, simbolis, dan responsif. Sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi bisa kita lihat bagaimana kemampuan sistem politik era pemerintahan SBY dengan menggunakan teori Almond sebagai berikut:

Kemampuan ekstraktif merupakan kemampuan mengelola sumber-sumber material dan manusia dari lingkungan dalam maupun luar. Eksploitasi terhadap hasil sumber daya alam indonesia sebenarnya telah lama di lakukan oleh negara luar yaitu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport di tanah Papua hasil dari kekayaan alam tersebut diangkut tiap hari oleh kaum kapitalis seperti emas, timah, logam, uranium, dan lain-lain dalam jumlah besar.

Kemampuan regulatif adalah kemampuan mengontrol, mengendalikan perilaku individu atau kelompok dalam sistem politik. Kemampuan Sistem Politik dalam mengontrol perilaku-perilaku individu atau kelompok pada

era SBY memang tidak bisa mengatakan sepenuhnya buruk karena para individu atau kelompok telah dicoba untuk diberantas, tetapi pada sisi lain individu atau kelompok yang mampu mengganggu kestabilan negara kian hari makin marak bersemi.

Kemampuan distributive, kemampuan mengalokasikan berbagai jenis barang, jasa, kehormatan, status dan kesempatan. Pada era SBY sebenarnya dana alokasi untuk didistribusikan kepada rakyat sudah cukup banyak namun akibat lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, dana alokasi tersebut tidak sampai sasaran, tapi berhenti pada kantong celana oknum elit yang tidak bertanggungjawab (koruptor). Contoh kecilnya, ketersediaan gedung sekolah dan kesehatan bagi masyarakat serta tenaga pengajar dan medis.

Kemampuan simbolis adalah kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya.

Misalnya adalah lagu-lagu nasional, upacara-upacara, penegasan nilai-nilai yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik. Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap warga negara.

Dalam konteks kekinian, sistem politik di indonesia saat ini tidak melahirkan pemimpin yang memiliki jiwa kemimpinan, karismatik dan relegius. Seperti kita ketahui sosok pemimpin seperti Ir. Soekarno, yang karismatik dan Gusdur sebagai tokoh agama.

Kemampuan responsive, tanggap tidaknya terhadap tuntutan atau tekanan sistem politik dalam daya tanggap terhadap masyarakat.

Seperti halnya, Reformasi yang telah melahirkan demokrasi namun belum juga mensejahterakan bangsa ini. Demokrasi sebagai sistem politik era pemerintah SBY hanya sebatas prosedural semata. Lemahnya respon pemerintah terhdap keluhan rakyat ternyata bukan hanya dalam negeri saja tetapi juga di luar negeri.

Domestik dan internasional adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah dalah hal bagaimana ia berinteraksi dilingkungan domestik maupun luar negeri. Dalam konteks kontemporer kemampuan domestik sistem politik

masih lemah sehingga relasi antara pemerintah dan masyarakat kurang harmonis, hal ini tergambar dari berbagai aksi ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah selama ini. (Sumber: Astari Prananingrum blog)

E. Kebijakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh, gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya.

Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Pun penegakan hukum di bidang lain, utamanya tindak korupsi. Banyak kasus yang akhirnya terungkap ke publik dan hampir setiap hari televisi penuh dengan laporan terbaru terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik atau pejabat daerah, tak terkecuali politisi dari partai yang dipimpinnya. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan keterbukaan SBY dalam menanggapinya dinilai sangat baik.

Sayangnya beberapa kalangan juga dengan keras mengkritik kepemimpinan SBY yang dinilai lamban dan lemah dalam beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan

terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan konstitusionil, antara lain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai lain.

F. Kebijakan Ekonomi

Selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth, dan kemudian juga ditambahkan dengan pro environment benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.

Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sektor riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki tahun kedua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita antara USS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun.

Beberapa contoh upaya kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan pembangunan tersebut di atas, sesuai dengan masa kepemimpinan elite politik atau presiden yang berkuasa pada masanya, memberikan beberapa penekanan yang jelas terhadap gambaran yang dikemukakan oleh model elite ini. Bahwa keadaan pemerintahan yang terjalin itu memang sangat terpengaruh oleh elite politik yang berkuasa, karena arahan-arahan atau instruksi-instruksi yang menghasilkan berbagai kebijakan, merupakan titik

tolak dari kerangka pemikiran elite politik yang sedang berkuasa. Di mana arahan-arahan yang diberikan secara mendasar tersebut, memberikan pengarahan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan administrator untuk bisa terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sehingga sukses atau tidaknya suatu kebijakan yang diharapkan atas kepentingan rakyat, itu tergantung bagaimana pola pikir dan arahan yang dilakukan oleh pemerintah apakah menuju pada kepentingan rakyat banyak, ataukah hanya mementingan kepentingan individu dan kelompoknya saja. Setelah sepuluh tahun bekerja, estafet kepemimpinan pun akhirnya harus diserahkan kepada penggantinya, yakni Joko Widodo yang menang tipis atas rivalnya Prabowo Subyanto pada Pemilihan Presiden 2014.

G. Kebijakan Pendidikan

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan.

Pemerintah memperkenalkan model Manajemen Berbasis Sekolah. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang

berkualitas, maka dibuat sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi. Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara."

Pada pemerintaan SBY tahun 2004-2009, anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan Kompetensi guru, dan sebaginya. Hanya dalam pelaksanaannya leading sector yang menangani bidang pendidikan dalam hal ini Departemen Pendidikan nampaknya gagap dengan anggaran yang besar tersebut, sehingga banyak program yang belum menyentuh, hanya sekedar menghabiskan dana dengan hanya mengadakan kegiatan seminar-seminar saja.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 2 ayat (1).

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Pasal (4) Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. BAB 1 Pasal 1 Dalam pasal ini menyebutkan yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB 11 Pasal 2 Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

a. Standar isi;
b. Standar proses;
c. Standar kompetensi lulusan;
d.Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f. Standar pengelolaan;
g. Standar pembiayaan; dan
h. Standar penilaian pendidikan.

Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan guru besar

BAB 1 Pasal 1 Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Periode 2004-2009 pemerintahan SBY-Kalla telah menetapkan sasaran pokok pembangunan lima tahun 2004-2009 sebagai berikut; menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,7 persen dari angkatan kerja (9,9 juta jiwa) di tahun 2004 menjadi 5,1 persen (5,7 jutajiwa) pada tahun 2009, mengurangi tingkat kemiskinan dari 16,6 persen dari total penduduk (36,1 juta jiwa) menjadi 8,2 persen (18,8 juta jiwa) di tahun 2009, dan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut ditargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen per tahun selama periode 2004-2009.

Pada masa pemerintahan SBY – Boediono (2009-2014), memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda dari masa pemrintahan sebelumnya,

Periode 2009-2014, SBY banyak melakukan perubahan kebijakan khususnya di bidang perekonomian antara lain adalah mengganti pola kebijakan perekonomian yang selama ini mengarah ke Amerika Serikat (arah ini sudah di anut sejak era Orba –sebut saja America's Way), ke arah China (China's Way). Satu hal yang paling menonjol dalam "China's Way" adalah agresivitas yang dimulai dalam membangun infrastruktur dan serta langkah nyata dan konsisten tanpa pandang bulu dalam mencegah dan membasmi korupsi. SBY melakukan pembangunan berkelanjutan selama masanya menjabat sebagai presiden 2 kali berturut-turut.

Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan tersebut adalah kebijakan subsidi BBM, pembentukan perumahan murah bagi rakyat yang akan menampung rakyat miskin yang hidup di kolom jembatan, juga golongan rakyat lain yang belum punya rumah layak, Kebijakan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) daerah yang dijalankan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 dalam konteks jangka panjang, pembangunaan perdesaan didorong keterkaitannya dengan pembangunan perkotaan secara sinergis dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi.

Dari sisi program nasional, Presiden SBY mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp 100 juta per desa untuk program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa.

SBY juga telah mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat. Pengembangan itu didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan maupun berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian daerah, serta peningkatan kesehatan masyarakat.

H. PRAKTIK BLUSUKAN dan KEBIJAKAN JOKOWI

Kemenangan Jokowi bisa dikatakan tidaklah sespektakuler yang pernah dibayangkan orang sebelumnya. Meskipun begitu, kenyataannya dia sudah berhasil duduk sebagai orang nomor satu di republik ini. Jokowi terkenal

karena gaya blusukannya, berkeliling dari pemukiman ke kepemukiman lain, jalan-jalan tanah kampung, dan jalan berbatu-batu desa, hingga melewati gang-gang sempit dalam kota. Jokowi bertemu, mendengar dan melihat langsung keluhan, keinginan dan aspirasi warganya. Bahkan pengawasan mendadak langsung pada sejumlah bawahan, kelurahan, kecamatan sampai kantor walikota langsung didatangi. Gaya kerja seperti ini akhirnya dikenal dengan sebutan 'blusukan'.

Blusukan berasal dari bahasa Jawa dialek Solo, berarti perjalanan ke tempat-tempat jauh. Sementara dalam bahasa Inggris, blusukan diterjemaahkan sebagai visite impromtu (kunjungan bersifat spontan) ketika pers asing memberitakan Jokowi bersama Zuckerberg ke Tanah Abang. Sebenarnya ada perbedaan antara menyamar dan berkunjung. Walaupun keduanya dimaksudkan untuk mengunjungi suatu tempat, tetapi identitas pelaku tidak diketahui oleh orang yang ditemuinya. Sedangkan blusukan, pelaku melakukannya untuk suatu tujuan tertentu, dalam hal ini sebagai cara pemimpin langsung menjumpai warganya untuk mengetahui persoalan-persoalan dalam kehidupannya yang kemudian berkaitan atas kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Dalam bekerja, Jokowi punya cara tersendiri, selain blusukan, dia juga kerap makan siang sebagai bagian dari diplomasi atau lobi. Sambil makan siang Jokowi akan mendengarkan keluhan-keluhan dan keinginan-keinginan warganya. Berdiskusi dan bertukar pikiran tentang persoalan-persoalan yang dihadapi warga dan pemerintahan yang selanjutnya dikenal dengan 'lobi makan siang'. Kesederhanaannya dan cara berpakaian, cara bertutur sampai cara mengambil keputusan.

Pemimpin yang langsung menerima, merasakan, melihat dan mendengar kebutuhan masyarakat. Dari lapangan masalah muncul, dari sana pula keputusan diambil. "Tinggal, eksekusinya saja," demikian Jokowi mengemukakan ketika masih menjabat gubernur DKI Jakarta.

Penguasaan lapangan dan praktik langsung di lapangan, langsung penyelesaiannya di lapangan. Pelayanan aparatur pemerintahan ditujukan untuk kejahteraan warga masyarakat. Kini pelayanan diperluas sebagai "pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di

seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan," pidato pelantikan presiden "Di bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi."

I. DARI CERITA RAKYAT SAMPAI BERITA NYATA

Dikisahkan, apa yang dilakukan Jokowi bukanlah yang pertama dilakukan oleh para pemimpin. Beberapa pemimpin lain juga melakukan hal yang sama, bedanya hanyalah pada waktu itu tidak dikuntit oleh para wartawan media cetak dan elektronik. Kita harus menyadari bahwa sekarang adalah era paskaindustri/era informasi.

Dalam arti, informasi menjadi komoditas yang bernilai ekonomi dan Jokowi melipatgandakan peristiwa blusukan para pemimpin lain. Bahkan seorang Soeharto terkenal dengan Kelompecapir (kelompok pendengar pembicara dan pemirsa). Pada era Soeharto para petani dan nelayan (kelompok yang sering mengikuti acara ini) akan bertanyajawab dengan Pak Presiden. Keluhan-keluhan dan keinginan disampaikan langsung kepada Bapak Pembangunan.

Beberapa acara menggunakan "teleconfference" (pertemuan jarak jauh dengan media tv terhubung secara langsung dan pembicaraan dengan telepon) pada tahun 1980-an. Walaupun demikian, protokoler, jadwal dan isi acara secara detail telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Kegiatan acara berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kelompok tani nelayan ke kelompok tani nelayan masyarakat yang lain, dari tema ke tema lain. Tentunya dengan maksud dan keperluan yang berbeda. Pada era ini Indonesia mencapai swasembada pangan.

Soekarno bahkan lebih tegas menyebut dirinya sebagai penyambung lidah rakyat. Banyak cerita tentang aksi blusukan Soekarno. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, lebih khas lagi, karena dia sambil melakukan penyamaran dan cerita tersebut diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi di Yogyakarta.

Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab R.A. juga melakukan kunjungan langsung kepada rakyat. Kisah terkenalnya adalah beliau dengan Nenek Tua dan Ibu dengan Anak yang Menangis. Dalam kisah-kisah raja juga adanya yang menyamar menjadi rakyat jelata dengan maksud yang sama. Kisah

Abunawas dan baginda Harun Al Rasyid (Seribu Satu Malam) juga mengisahkan hal serupa. Bagaimana sang Baginda yang diakali oleh Abunawas sehingga ia terpaksa menyamar menjadi rakyat jelata. Oleh karenanya, dapat berinteraksi dengan warga sehingga dapat langsung mendengar dan melihat langsung.

Raja Abdullah dari Amman Yordania, melakukan penyamaran sebagai wartawan media cetak. Ia ingin mengetahui perilaku birokratnya dan apa yang dipikirkan rakyatnya terhadap birokrat. Beberapa kisah raja-raja yang menyamar untuk berbagai keperluan dan maksud tujuan. Dikisahkan dalam banyak cerita rakyat mengenai raja-raja yang langsung mendengar dan melihat kondisi rakyatnya. Raja atau pangeran yang harus melepaskan pakaian kebesaran diganti dengan pakaian orang biasa dengan pakaian biasa sebagaimana rakyat memakainya. Kesetaraan berpakaian ini membuat raja tidak lagi dikenali. Sehingga rakyat dapat berbicara apa saja tanpa rasa sungkan dan rasa takut, ketika ditemuinya. Cerita rakyat mengandung pesan moral dan nilai yang menjadi panduan berperilaku.

J. SERVANT LEADER DALAM KECERDASAN SPIRITUAL

Zohar dan Marshall adalah orang yang memberikan perluasan pada kecerdasan dengan menambahkan kecerdasaan spritual sebagai bagian dari aspek kecerdasan manusia. Kecerdasan intelektual mendapatkan sejumlah tantangan karena terlalu sempit melihat aspek kecerdasan manusia, hanya pada aspek verbal dan hitungan. Howard Gadner pembuka untuk melihat kecerdasan sebagai multi aspek. Ia melihat bahwa banyak orang sangat pintar tidak pada sisi matematika (hitung-hitungan) dan bahasa (verbal) yang tidak dapat diukur oleh kecerdasaan intelektual dengan skor kecerdasaan intelektual yang terkenal disebut IQ (intellegence quotient).

Hal yang diukur oleh kecerdasaan intelektual lebih diandalkan pada ranah akademik. Tetapi kita dapat menyaksikan orang-orang seperti ; Susi Susanti, Alan Budikusuma, Taufik Hidayat (peraih emas olimpiade nomer bulutangkis), Basuki Abdullah, Raden Saleh (pelukis), Sunaryo, I Nyoman Nuarte (perupa), Bing Slamet, Benyamin S (pelawak legendaris), Gesang, Ibu Sud dan Ibu Kasur adalah orang-orang yang tidak dapat dijelaskan oleh term IQ. Selanjutnya Goleman memberikan perluasan pada kecakapan interpersonal dan intrapersonal sebagai kecerdasaan emosi. Zohar dan

Marshall (2000), kecerdasan spiritual adalah "kecerdasan yang diarahkan dan pemecahan masalah dari makna dan nilai; kecerdasan yang kita dapat menempatkan tindakan kita dan kehidupan dengan lebih luas, lebih kaya, makna-konteks yang ada; kecerdasan yang kita dapat menilai, tindakan atau jalur kehidupan lebih bermakna daripada yang lain."

"Kita dapat menggunakan SQ melebihi kecerdasan spiritual tentang religi. SQ membuat kita lebih merasakan, untuk mempersatukan perbedaan, di luar batas ekspresi aktual. SQ dapat menempatkan kita selalu berhubungan dengan memaknakan dan esensi spirit di belakang semua agama-agama besar. Orang yang memiliki SQ tinggi harus mempraktikkan agama, tetapi tanpa picik, ekslusif, fanatik atau prasangka, " Zohar dan Marshall (2000). Ada enam jalur kecerdasan spiritual yaitu :

1. Jalur kewajiban
2. Jalur pemeliharaan
3. Jalur pengetahuan
4. Jalur tranformasi personal,
5. Jalur persaudaraan
6. Jalur kepemimpinan pelayanan

Jalur kepemimpinan pelayanan, daripada pemimpin sebagai bos. Kepemimpinan pelayanan (servant leadership) adalah orang yang melayani kemanusiaan dengan menciptakan cara-cara baru untuk umat berhubungan dengan yang lainnya.

Mereka meletakkan kesejahteraan masyarakat lebih tinggi daripada kesejahteraan dirinya dan mengarahkan masyarakat pada arah yang baru. Kepemimpinan abdi adalah jalur spiritual yang tertinggi. Energi memotivasi untuk berjalan adalah kekuasaan.

Penggunaan, salah penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan diklasifikasikan sebagai kecerdasan spiritual yang rendah. Kecerdasan spiritual pemimpin pelayanan menciptakan visi baru dan membawa kemungkinan-kemungkinan baru untuk kesejahteraan. Mereka membuat suatu yang mustahil menjadi peluang.

1. Definisi kecerdasan spiritual bersandar pada konsep spiritual yang berbeda dari religi (agama). Danah Zohar mendefisinikan 12 prinsip yang mendasari kecerdasan spiritual :
2. Kesadaran-diri (self-awarness) : mengetahui apa yang diyakini dan nilai, apa yang sangat memotivasi diri.
3. Spotanitas : hidup dan merespon pada setiap peristiwa.
4. Memiliki visi dan panduan nilai: bertindak berdasarkan prinsip dan keyakinan yang tinggi, dan hidup menyandarkan padanya.
5. Keseluruhan (holism) : melihat pola yang besar, hubungan dan koneksi; mempunyai rasa memiliki.
6. Keharuan : memiliki kualitas "merasakan-dengan" dan empati yang mendalam.
7. Merayakan perbedaan : menilai orang lain dari perbedaan.
8. Kemandirian : berdiri menghadap keramaian dan memiliki pendirian sendiri.
9. Kerendahan hati : memiliki rasa sebagai pemain dalam drama besar kehidupan, satu tempat yang sesuai atau benar di dunia yang besar.
10. Cenderung mengajukan pertanyaan mendasar "mengapa." Kebutuhan mengerti sesuatu dan mendapat pengertian yang mendasar.
11. Kemampuan membingkai ulang: berdiri di belakang situasi dan masalah dan melihat gambaran yang lebih besar atau konteks yang lebih luas.
12. Menggunakan kesengsaraan (adversity) dengan positif: belajar dan tumbuh dari kesalahan, kemunduran dan penderitaan.
13. Berartinya kerja: merasakan terpanggil untuk melayani, dan untuk memberikan sumbangsih.

K. PEMERINTAHAN YANG MELAYANI

Apakah alasan Jokowi melakukan blusukan? Ada beberapa alasan yang sering dikemukan Jokowi mengenai blusukannya.

a) Langsung melihat permasalahan di lapangan
b) Perintah di lapangan langsung dapat dilaksanakan
c) Memberikan semangat pada aparaturnya,
d) Mencegah pejabat-penjabat di bawahnya memberikan laporan yang tidak sesuai

e) Inspeksi mendadak untuk memastikan birokrasi harus melayani
f) Melatih mata bathin, dan rasa spiritualnya

Ironisnya, bukan hasil blusukannya yang hangat diperbincangkan melainkan sebatas aksi blusukannya yang dipampang kepada masyarakat. Bahkan terkesan didramatisasi sedemikian rupa seolah segala macam persoalan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan atraksi blusukan tersebut.

Lalu apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi bersinggungan dengan kegiatan blusukan yang dilakukannya? Sejak 20 Oktober 2014 dirinya mengucap sumpah dan janji sebagai kepala negara hingga 100 hari masa kerjanya, belum banyak janji kampanye yang direalisasikan selain kebijakan-kebijakan kontroversial yang mengemuka.

Berikut beberapa kebijakan Jokowi yang sama sekali tidak bersinggungan dengan blusukan yang dia lakukan dan bahkan hanya ganti jaket dari pemerintahan terdahulu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikenal sebagai partai yang paling getol menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selama 10 tahun terakhir sebagai oposisi. Setiap kali Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan harga BBM naik, PDIP selalu menolak. Penolakan PDIP atas kenaikan harga BBM bukan hanya dilakukan di mimbar parlemen.

PDIP juga membuat spanduk penolakan BBM, bahkan menurunkan massa untuk menolak kenaikan harga BBM. Misalnya pada 27 Maret 2012. Massa PDIP di berbagai daerah turun ke jalan untuk menolak kenaikan harga BBM. Aksi juga digelar di bundaran HI, Jakarta.

Pada 19 Juni 2013, PDIP kembali lantang menolak kenaikan harga BBM sekaligus menurunkan massa. Begitu getolnya PDIP menolak kenaikan BBM hingga media memberinya judul PDIP Tolak Kenaikan Harga BBM Sampai Titik Darah Penghabisan. Namun, setelah resmi dinyatakan menang Pilpres, Jokowi dan PDIP segera mewacanakan kenaikan harga BBM. Menurut Megawati, menaikkan harga BBM adalah satu-satunya cara menyelamatkan

keuangan negara. Tentu saja, cara pandang ini dikritik oleh banyak pihak. Sebab, naiknya harga BBM akan membuat rakyat semakin terbebani.

2. Meminta SBY naikkan harga BBM. Bukan hanya mewacanakan menaikkan harga BBM. Yang lebih kontroversial, PDIP meminta Presiden SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Tentu saja, permintaan ini ditolah mentah-mentah oleh SBY. Meskipun Jokowi menemui langsung SBY beberapa waktu lalu, SBY tetap pada pendirian bahwa pemerintahannya tidak akan menaikkan harga BBM.

Sedikitnya ada 4 alasan mendasar mengapa pemerintah SBY menolak menaikkan harga BBM. Dua sikap ini, mau menaikkan harga BBM dan meminta SBY menaikkan harga BBM, membuat PDIP menuai kritik tajam dari banyak pihak, mulai dari para pakar hingga "wong cilik." Penolakan dan protes tersebut dapat dengan mudah dilihat di media sosial. Bahkan, sejumlah pendukung Jokowi mengaku kecewa telah memilihnya karena belum dilantik sudah mewacanakan BBM naik.

3. Menjual pesawat kepresidenan. Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, mengusulkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menjual pesawat kepresidenan. Langkah itu, menurutnya, perlu diambil sebagai bentuk efisiensi untuk menyelamatkan perekonomian.

Usul itu sontak mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan para netizen. Mereka pun mengaitkan usulan itu dengan track recordpemerintahan megawati yang pernah menjual sejumlah aset nasional. Di samping itu, pesawat kepresidenan tersebut baru saja dibeli oleh pemerintah. Sedangkan PDIP sendiri pada saat kampanye menyewa pesawat pribadi untuk Jokowi.

4. Di luar kebijakannya membentuk kabinet kerja dengan 34 kementerian yang dianggap tidak sesuai janji kampanye akan membentuk kabinet ramping, Presiden Jokowi mengeluarkan beberapa kartu atas nama kepentingan rakyat.

Kartu-kartu tersebut antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya 'ganti baju' dari kebijakan Presiden SBY.

Bahkan seorang politikus menyebut, KIP pada masa SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIS merupakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014.

KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY. Masalah anggaran Kartu Sakti juga sempat menjadi polemik. Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014.

5. Pada 17 November 2014, pemerintahan Jokowi mengeluarkan kebijakan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi yang semula Rp6500 menjadi Rp8500 yang akhirnya mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan harga bahan pokok pangan, kebijakan diambil saat tren harga minyak dunia sedang melemah.

6. Pada 20 November 2014, Jokowi melantik politikus NasDem, HM. Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantikan Basrief Arief. Kebijakan Jokowi melantik pria berkumis yang pernah menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum ini menuai kritikan berbagai elemen masyarakat dan para aktivis yang menganggap hal tersebut blunder bagi Jokowi.

Menurut salah seorang aktivis, selain blunder, Jokowi juga melakukan tiga kesalahan dalam melantik Prasetyo, di antaranya: Rasa Partai. Dalam hal memilih nama calon seorang Jaksa Agung, Jokowi sebaiknya tidak meminta nama ke partai politik, sebaliknya harus meminta nama ke lembaga publik terlebih dahulu agar mendapat nama jaksa agung yang diinginkan publik. Kesalahan kedua, Jokowi dinilai tidak transparan dalam memilih jaksa agung.

Hal itu terlihat dari tak jelasnya proses seleksi calon jaksa agung yang katanya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kesalahan ketiga adalah, Jokowi terlalu buru-buru dalam memilih jaksa agung.

Bahkan Prasetyo sendiri mengakui penunjukkan dirinya sebagai pimpinan di Korps Adhyaksa, sebutan bagi Kejaksaan Agung, dilakukan Jokowi secara mendadak. Sebelum dilantik, Prasetyo merupakan politikus Partai NasDem yang menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Prasetyo tak sepenuhnya politikus. Sebelum menjadi anggota Dewan, Prasetyo adalah jaksa.

Ia menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada 2005-2006 serta pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Selama menjadi jaksa, tak ada rekam jejak yang menonjol dari pria yang diusung Partai NasDem. Hal ini membuat kompetensi Prasetyo diragukan oleh lembaga-lembaga antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch.

7. Pada 29 Desember 2014, Jokowi menerbitkan Keppres No.214/M2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Keppres ini menjadi kebijakan yang juga banyak menimbulkan kontroversi mengingat Hasban Ritonga berstatus terdakwa kasus sengketa lahan di Jalan Pancing, Medan, Sumatera Utara dan pada 22 Oktober 2014 sempat ditahan di Mabes Polri. Benar saja, pada akhir Januari 2015, oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, Hasban Ritonga dibebastugaskan sementara dari jabatannya hingga proses hukum yang menimpnya berkekuatan tetap.

8. Kebijakan Jokowi yang kembali mengguncang negeri ini adalah ketika dirinya mengusulkan Komjen Pol. Budi Gunawan yang disebut-sebut punya rekening gendut sebagai pengganti Sutarman sebagai Kapolri.

Menyusul usulan sang presiden, pada 13 Januari 2015 KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Buntut dari kebijakan Jokowi tersebut adalah penangkapan atas komisioner KPK, Bambang Widjoyanto dan Ketua KPK Abraham Samad.

Untuk meredam kontroversial di tengah masyarakat, Jokowi kembali mengeluarkan kebijakan baru, yakni melantik Jenderal Pol. Drs. Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ironisnya, ketika kasus hukum Budi Gunawan belum ditetapkan oleh KPK, dia pun dilantik menjadi Wakapolri mendampingi Badrodin Haiti.

9. Pada 19 Januari 2015, Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres dan salah seorang di antaranya adalah politikus dari Partai NasDem, Jan Darmadi. Jan Darmadi disorot Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola, melalui akun facebooknya sebagai bos judi.

Hal itu mengemuka beberapa jam setelah pelantikannya. Saat itu muncul pesan berantai yang menyebutkan Jan Darmadi alias Apiang Jinggo memiliki bisnis judi petak 9, Copacabana, Jakarta Theater, Lofte Fair Hailai di Jakarta Utara. Disebutkan pula bahwa di era 1970-an ketika judi dihalalkan, Jan akrab dengan Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta kala itu. Sepak terjang Jan konon terus berlanjut meski judi dilarang pada 1978.

10. Kebijakan yang mengejutkan masyarakat Indonesia lagi-lagi dibuat Jokowi pada 16 Januari 2015, yakni mengumumkan penurunan harga BBM menjadi Rp6600/liter untuk premium dan Rp6400/liter untuk solar. Kebijakan ini selain menyenangkan juga membuat bingung di tengah harga bahan kebutuhan pokok dan tarif angkutan sudah terlanjur melonjak.

11. Kebijakan lain yang sangat mencengangkan adalah ketika Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Jokowi menginstruksikan untuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara.

Perpres tersebut ditandatangani oleh Jokowipada 20 Maret 2015, tentang kenaikan tunjangan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kendaraan perorangan, dari Rp 116.650.000,- menjadi Rp 210.890.000,- Untuk itu Jokowi mengaku tidak tahu menahu adanya kenaikan tunjangan uang muka (down payment/DP) mobil pribadi pejabat negara.

Menurutnya kenaikan itu seharusnya urusan kementerian terkait. "Tidak semua hal itu saya ketahui 100%. Artinya hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini," kata Jokowi.

12. Hal mencengangkan lain adalah ketika pada 24 November 2014, Jokowi mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan melarang menteri cabinet mendatangi panggilan DPR RI. "Baru sebulan kerja, dipanggil-pang-

gil. Apa sih," kata Jokowi masa itu. Pernyataan yang kemudian dianggap sebagai kebijakan presiden tersebut lantas saja menuai kritik tajam baik dari masyarakat, dari sejumlah anggota DPR, hingga pakar hokum tata negara. Dengan melarang menghadiri rapat dengan DPR, Jokowi dinilai melakukan pembangkangan konstitusi.

Sebab system ketatanegaraan kita mengatur, lembaga kepresidenan dan parlemen berkedudukan setara dan harus bersama-sama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam pemerintahan, presiden menjalankan ranah eksekutif sementara parlemen (DPR) menjalankan fungsi legislatif, termasuk di dalamnya mengawasi pemerintah dalam menjalankan programnya selain fungsi penganggaran dan legislasi.

Proses pengambilan kebijakan sangat penting dalam tahapan pengelolaan kebijakan, baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Ada banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan kebijakan mengingat pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari para ahli terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai.

Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki. Ada tiga teori utama yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sebuah kebijakan yaitu teori rasional komprehensif yang mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai.

Teori incremental yang tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan. Dan, teori mixed scanning yang menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori incremental. Ketiga teori ini tertera dalam buku karya Profesor James E. Anderson, berjudul Public Policy Making. Selain itu, Anderson juga mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan.

Pertama nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan, maupun ideologi. Kedua afiliasi partai politik; ketiga kepentingan konstituen; keempat opini masyarakat; kelima penghormatan terhadap pihak lain; dan keenam adalah aturan kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, selain aspek-aspek yang sudah disebutkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan.

Para politisi harus mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan para ilmuwan juga harus mengetahui tentang kebijakan. Sehingga, terjadi persamaan persepsi di dalam komunitas yang mana kebijakan yang dihasilkan dapat dijalankan. Tidak ada hal yang bersifat publik. Ada banyak ragam dari perbedaan publik yang dapat menghasilkan, membentuk situasi atau dapat dibentuk dari isu-isu berbeda.

Untuk analisa yang mendalam dan bijaksana harus melihat ke publik yang mana? kapan? Itu berarti bahwa tidak ada rumusan yang sederhana untuk suatu keterlibatan. Manusia sangat mampu dalam memahami permasalahan rumit dan teknologi. Waktu dan pembuat kebijakan dan ilmuwan dikejutkan oleh sebagian orang, apa yang dapat dipahami oleh manusia bila diperlukan dari kompleksitas pemilihan sumber daya dengan penerapan prinsip biologi sintetis.

Hal ini membutuhkan masukan dari para ahli dan membutuhkan waktu untuk cerminan dan diskusi, namun patut dilakukan. Orang ingin dapat berpartisipasi dalam keputusan sekitar kebijakan yang melibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Itu tidak berarti semuanya ingin, atau ada yang ingin terlibat sepanjang waktu, tapi orang ingin tahu bahwa hal ini benar terjadi dan banyak yang ingin berpartisipasi secara langsung. Begitu mereka terlibat, mereka ingin bahwa masukannya didengar dan mereka ingin diberitahu hasilnya dari keterlibatan mereka.

Pembuat kebijakan dan para ahli hanya manusia. Mereka juga dapat memahami akan adanya potensi bias, konflik kepentingan dan semua kesalahan yang dapat berpengaruh kepada semuanya dan berharap mendapat

pengakuan serta penanganan yang transparan. Pembuat kebijakan dan para ahli harus dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dua arah mutlak diperlukan, perihal menyampaikan sesuatu dan mendengarkan hal yang disampaikan keduanya sangat penting.

Musyawarah masyarakat dapat membantu mengurangi risiko gagalnya kebijakan yang telah diusulkan. Demi menghindari kemungkinan dari rasa malu, menggali informasi awal dari kebijakan tertentu dapat menemukan ide dari pihak oposisi sehingga dapat berpengaruh terhadap sebuah keputusan.

Ada banyak cara untuk berhubungan dengan orang Orang memiliki berbagai macam cara dalam mengemukakan pandangannya agar didengar oleh orang lain, mulai dari proses demokrasi secara formal atau secara langsung. Publik dengan pemikiran yang kuat atau ketertarikan tertentu cenderung sangat terlihat. Tapi, ada cara lain agar pendapatnya lebih diterima oleh beragam orang sehingga dapat berkontribusi.



BAB 5 (LIMA)

Pemimpin Dunia yang Fenomenal dengan Kebijakannya

Amerika Serikat atau United State of America atau secara umum dikenal dengan Amerika saja merupakan sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri atas 50 negara bagian dan satu distrik federal. Hampir setiap kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat memengaruhi keseimbangan dunia, entah itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

Bahkan saat Amerika Serikat membuat kebijakan yang ditujukan untuk internal alias untuk negara Amerika sendiri, tidak menutup kemungkinan keseimbangan dunia akan terpengaruh. Itu artinya, apa pun kebijakan yang akan dibuat oleh Presiden Amerika Serikat, negara-negara lain di dunia harus bersiap menghadapi pengaruhnya.

Saat ini Amerika Serikat menikmati status sebagai negara super power yang kekuatan militer dan ekonominya belum ada yang mampu menandingi. Sejak kemenangannya di Perang Dunia II ditambah lagi kemampuannya muncul sebagai pemenang di Perang Dingin, praktis Amerika Serikat tumbuh menjadi negara yang sangat kuat dan mampu menyebarkan pengaruh yang luas baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Lihat saja pengeluaran Amerika Serikat untuk militer di atas 700 milyar dollar, 40% dari total pengeluaran militer dunia, atau dengan kata lain Amerika Serikat hanya akan kalah secara substansial dengan seluruh kekuatan dunia yang bergabung menjadi satu.

Secara ekonomi, Amerika Serikat pun masih menjadi nomor satu. Total GDP berkisar 14 trilyun dollar yang dimilikinya hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan ekonomi China, India, dan Jepang apabila digabungkan. Dengan demikian wajar apabila beberapa pengamat mengatakan Amerika Serikat di dalam urusan internasional banyak bertindak seolah sebagai polisi dunia, dengan bermodalkan kekuatan ekonomi dan militernya tersebut. Terlepas

dari kehebatan Amerika Serikat, beberapa negara memiliki pemimpin yang kebijakannya mampu mengguncang dunia. Berikut beberapa pemimpin dunia dari masa ke masa yang membuat kebijakan dan kebijakan tersebut sangat berpengaruh bagi kemajuan negaranya, bahkan juga berpengaruh bagi negara-negara di sekitarnya.



Joseph Stalin Vissarionovich Komunisme Internasional dan Kebijakan Kolektivisasi Tanah Pertanian

Joseph Stalin Vissarionovich atau Stalin merupakan orang kepercayaan Lenin dan juga orang yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan komunisme di Rusia. Oleh karena itu tidak aneh ketika Lenin meninggal pada tahun 1924 Stalin langsung mendapat kepercayaan untuk menempati posisi penting di dalam partai dan struktur pemerintahan. Namun, di sisi lain kematian Lenin juga memicu perpecahan dalam Partai Komunis.

Perpecahan ini membagi tubuh partai menjadi dua kubu, yaitu kubu Stalin dan kubu Trotsky. Persaingan untuk mendapatkan kekuasaan berlangsung di antara kedua kubu ini. Namun pada akhirnya, seperti yang telah disebutkan di atas, Stalin mendapatkan posisi untuk menggantikan Lenin sebagai pemimpin Partai Komunis Uni Soviet dan pemimpin Negara.

Kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Stalin dapat disebut pula dengan Stalinisme. Stalinisme merupakan sebuah sistem hubungan kemasyarakatan dan politik kekuasaan yang mendominasi pemerintahan diktator Stalin. Dalam Stalinisme terdapat ide tentang Komunisme Internasional yang bertujuan untuk menjaga roda kekuasaan yang dimiliki olehnya dengan jalan memperkuat sistem birokrasi, meningkatkan kadar represi massal, upaya penghapusan demokrasi, dan persamaan nasional.

Stalin menjalankan pola pemerintahan yang totaliter dan tersentralisir. Stalin menciptakan struktur birokrasinya dengan menempatkan seluruh elemen Negara di bawah pengawasannya. Misalnya saja lembaga-lembaga seperti Komita Sentral (CK) PKUS, Dewan Komisariat Rakyat (Dewan Menteri),

Komite Keamanan Negara (GKO), dan menduduki posisi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata.

Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa rezim totaliter yang dijalankan oleh Stalin tidak memberikan kesempatan sedikitpun bagi kebebasan ide dan berpikir bagi warganya. Ketiadaan kebebasan berpikir dan memunculkan ide membuat posisi Rusia di kawasan Eropa semakin termarginalisasi karena memiliki ideologi yang bertolak belakang.

Keadaan semacam ini juga diyakini menjadi factor utama yang menyebabkan pemerintahan sosialisme runtuh. Seperti yang telah disebutkan di atas, Stalin menjalankan represi massal dalam kadar intensitas yang cukup tinggi untuk menjaga rezim yang dibangun olehnya. Represi massal ini dilakukan untuk membungkam perkembangan ide warga Negara, terutama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip rezim yang dijalankan oleh Stalin. Untuk menjalankan teror terhadap lawan-lawan politiknya Stalin membentuk polisi rahasia.

Polisi rahasia Rusia, atau yang banyak dikenal dengan nama KGB memiliki tugas untuk mengawasi aktivitas warga Negara. Bila aktivitas tersebut dinilai dapat mengancam stabilitas rezim, pemerintah akan mengambil tindakan keras terhadap pihak yang bersangkutan.

Salah satu tindakan yang mungkin akan diberikan terhadap penentang pemerintah yaitu misalnya saja dengan cara menyebarkan ancaman dan teror. Jutaan warga Negara yang tidak bersalah ditangkap secara sewenang-wenang karena dianggap telah melawan kebijakan pemerintah.

Orang-orang itu tidak saja ditangkap, namun juga disiksa, dieksekusi, dideportasi secara brutal, atau dijebloskan dalam penjara dengan peraturan yang kejam dan menempati kamp-kamp pekerja paksa yang ada di suatu tempat yang disebut dengan Gulag (Glavnoe Upravlenia Lagerei).

Di dalam kamp kerja paksa ini terdapat semacam kamp konsentrasi yang disebut dengan Kontslager. Kontslager tersebar di seluruh penjuru Uni Soviet. Tindakan tersebut diyakini menjadi faktor pendorong terjadinya peristiwa holocaust di Rusia.

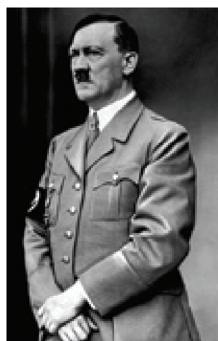
Selain itu terdapat pula kebijakan kolektivisasi tanah pertanian yang menyebabkan hilangnya kepemilikan 25 juta petani swasta terhadap tanah pertanian. Sekitar 200 ribu lahan pertanian diorganisasikan di bawah pengawasan pemerintah. Tujuan dari kolektivisasi pertanian ini yaitu untuk mewujudkan industrialisasi yang tidak terlepas dari pengawasan dan kontrol dari Negara. Selain kontrol terhadap lahan pertanian, pemerintah juga melakukan sejumlah pengawasan terhadap kegiatan ekspor produk, produk pertanian itu sendiri, dan biaya dari hasil ekspor yang digunakan Negara untuk mendanai impor teknologi. Kebijakan kolektivisasi lahan pertanian yang dilakukan oleh Stalin membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial ekonomi di Uni Soviet. Bahkan kebijakan ini diyakini menjadi faktor yang bertanggungjawab atas kematian jutaan petani Ukraina akibat paceklik pada tahun 1930.

Kebijakan Stalinisme terus berjalan di Rusia hingga Stalin meninggal pada tahun 1953. Namun dampak dari Stalinisme memiliki pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Rusia pada masa-masa selanjutnya. Stalinisme mengklaim prinsip-prinsip yang sama dengan Leninisme, yaitu pemerataan tingkat kesejahteraan dengan dihapuskannya hak kepemilikan individu menjadi kepemilikan kolektif yang pengorganisasiannya diawasi dan dikontrol oleh Negara. Namun pada kenyataannya, pada masa Stalin, pemerataan yang menjadi basis tujuan sosialisme itu sendiri tidak terimplementasikan secara nyata. Kemiskinan dan kesengsaraan hanya dialami oleh masyarakat pada tingkat sosial yang rendah, sedangkan di sisi lain, para elit partai mendapatkan hak-hak khusus misalnya saja melalui pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dengan fasilitas yang memadai, perjalanan ke luar negeri dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kaum elite politik jelas-jelas menjadi nilai pembeda yang pada akhirnya menimbulkan fragmentasi dalam masyarakat Uni Soviet pada masa itu.

Prinsip kepemilikan kolektif jelas-jelas telah dilanggar, sehingga pada akhirnya merusak bangunan sosialisme yang ada di Uni Soviet. Pada akhirnya, kebijakan otoriter Stalin justru membawa hambatan bagi kreativitas dan inisiatif yang berlaku hampir di segala bidang dan tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana dan keputusan dengan perubahan

lingkungan domestik dan kondisi internasional yang dinamis. Kebijakan Stalin juga diyakini gagal dalam melakukan antisipasi terhadap kesempatan yang mungkin dicapai dan masalah yang akan dihadapi oleh Uni Soviet[10]. Pada akhirnya elemen-elemen tersebut terintegrasi dan membentuk landasan politik, ekonomi, dan sosial Rusia yang pada masa-masa selanjutnya cenderung terbelakang dan tertinggal dari Negara-negara di sekitarnya. Hingga berdampak pada kehancuran tatanan politik Rusia pada masa perang dingin yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet.

Adolf Hitler
Eugenetika dan Ladang Khusus Reproduksi Manusia



Adolf Hitler yang lahir di Austria pada 20 April 1889 merupakan seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) atau NSDAP alias Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional. Hitler menjabat sebagai Kanselir Jerman sejak 1933 hingga 1945 dan diktator Jerman Nazi (bergelar Führer und Reichskanzler) mulai tahun 1934 hingga 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Hitler adalah veteran Perang Dunia I dengan banyak gelar. Dia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman (pendahulu NSDAP) pada tahun 1919, dan menjadi ketua NSDAP tahun 1921. Tahun 1923, ia melancarkan kudeta di Munich yang dikenal dengan peristiwa Beer Hall Putsch. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler.

Di penjara, Hitler menulis memoarnya, Mein Kampf yang berarti Perjuanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyat dengan mengecam Perjanjian Versailles dan menjunjung Pan-Jermanisme, antisemitisme, dan anti-komunisme melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi.

Setelah ditunjuk sebagai kanselir pada tahun 1933, ia mengubah Republik Weimar menjadi Reich Ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan otokratik. Tujuan Hitler adalah mendirikan Orde Baru hegemoni Jerman Nazi yang absolut di daratan Eropa. Sampai saat itu, kebijakan luar dan dalam negerinya ber-

tujuan mencapai Lebensraum atau ruang hidup bagi kaum Jermanik. Hitler memerintahkan Jerman dipersenjatai kembali dan Wehrmacht menginvasi Polandia pada bulan September 1939, menyebabkan pecahnya Perang Dunia II di Eropa.

Dari dalam diri Hitler, tumbuh ‘kekuatan’ yang mendapat inspirasi dari teori Darwin bahwa untuk mempertahankan hidup manusia harus bertarung. Ia menerjemahkan impiannya dengan menyerang Austria, Cekoslowakia, Perancis, Rusia, dan lain-lain. Malah terbersit nafsu menguasai seluruh dunia. Ia melansir konsep eugenetika yang menjadi dasar pijakan pandangan evolusionis Nazi. Eugenetika berarti ‘perbaikan’ ras manusia dengan membuang orang-orang berpenyakit dan cacat serta memperbanyak individu sehat. Sehingga menurut teori itu, ras manusia bisa diperbaiki dengan meniru cara bagaimana hewan berkualitas baik dihasilkan melalui perkimpoian hewan yang sehat. Sedangkan hewan cacat dan berpenyakit dimusnahkan.

Tak lama setelah berkuasa, Hitler menerapkan teori itu dengan tangan besi. Orang-orang lemah mental, cacat, dan berpenyakit keturunan dikumpulkan dalam ‘pusat sterilisasi’ khusus. Karena dianggap parasit yang mengancam kemurnian rakyat Jerman dan menghambat kemajuan evolusi, maka atas perintah rahasianya, dalam waktu singkat mereka semua dibabat habis. Masih dalam eforia teori evolusi dan eugenetika, Nazi menghimbau muda-mudi berambut pirang bermata biru yang diyakini mewakili ras murni Jerman biar berhubungan seks tanpa harus menikah.

Pada 1935, Hitler memerintahkan didirikannya ladang-ladang khusus reproduksi manusia. Di dalamnya tinggal para wanita muda yang memiliki ras Arya. Para perwira SS (Schutzstaffel) sering mampir ke sana buat mesum dengan dalih eugenetika. Para bayi yang lahir kemudian disiapkan menjadi prajurit masa depan ‘Imperium Jerman’. Menurut Charles Darwin, karena ukuran tengkorak manusia membesar saat menaiki tangga evolusi, maka di seluruh Jerman dilakukan pengukuran buat membuktikan tengkorak bangsa Jerman lebih besar dari ras lain. Mereka yang tak sebesar ukuran resmi, begitupun yang gigi, mata, dan rambut di luar kriteria evolusionis langsung dihabisi.

Di bawah pemerintahan Hitler, pada tahun 1941 pasukan Jerman dan se-

kutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman terpaksa bertahan dan mengalami serangkaian kekalahan dalam pertempuran. Pada hari-hari terakhir perang, saat Pertempuran Berlin berlangsung tahun 1945, Hitler menikahi kekasih lamanya, Eva Braun. Tanggal 30 April 1945, kurang dari dua hari kemudian, keduanya bunuh diri agar tidak ditangkap Angkatan Darat Merah, lalu mayat mereka dibakar. Kebijakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang selama Perang Dunia II, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis non-Arya yang pemusnahan sistematisnya diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekan terdekatnya.

Mao Zedong
Konflik Antagonis dan Konflik Non-Antagonis



Mao Zedong yang lahir di Hunan, 26 Desember 1893 adalah seorang tokoh filsuf dan pendiri negara RRC (Republik Rakyat Cina). Antara tahun 1934 – 1935 Mao memegang peran utama dan memimpin Tentara Merah Cina menjalani 'Mars Panjang'. Lalu sejak tahun 1937 Mao ikut menolong memerangi Tentara Dai Nippon yang menduduki banyak wilayah Cina. Akhirnya Perang Dunia II berakhir dan perang saudara berkobar lagi. Dalam perang yang melawan kaum nasionalis ini, Mao menjadi pemimpin kaum Merah dan akhirnya menang pada tahun 1949. Pada 1 Oktober tahun 1949, Republik Rakyat Cina diproklamasikan dan pemimpin Cina nasionalis, Chiang Kai Shek melarikan diri ke Taiwan.

Mao membedakan dua jenis konflik, konflik antagonis dan konflik non-antagonis. Konflik antagonis menurutnya hanya bisa dipecahkan dengan sebuah pertempuran saja sedangkan konflik non-antagonis bisa dipecahkan dengan sebuah diskusi. Menurut Mao konflik antara para buruh dan pekerja dengan kaum kapitalis adalah sebuah konflik antagonis sedangkan konflik antara rakyat Cina dengan Partai adalah sebuah konflik non-antagonis.

Pada tahun 1956 Mao memperkenalkan sebuah kebijakan politik baru di mana kaum intelektual boleh mengeluarkan pendapat mereka sebagai kompromi terhadap Partai yang menekannya karena ingin menghindari pen-

indasan kejam disertai dengan motto: “Biarkan seratus bunga berkembang dan seratus pikiran yang berbeda-beda bersaing.” Tetapi ironisnya kebijakan politik ini gagal: kaum intelektual merasa tidak puas dan banyak mengeluarkan kritik. Mao sendiri berpendapat bahwa ia telah dikhianati oleh mereka dan ia membalas dendam. Sekitar 700.000 anggota kaum intelektual ditangkapinya dan disuruh bekerja paksa di daerah pedesaan.

Mao percaya akan sebuah revolusi yang kekal sifatnya. Ia juga percaya bahwa setiap revolusi pasti menghasilkan kaum kontra-revolusioner. Oleh karena itu secara teratur ia memberantas dan menangkapi apa yang ia anggap lawan-lawan politiknya dan para pengkhianat atau kaum kontra-revolusioner. Peristiwa yang paling dramatis dan mengenaskan hati ialah peristiwa Revolusi Kebudayaan yang terjadi pada tahun 1966.

Pada tahun 1960-an para mahasiswa di seluruh dunia memang pada senang-senangnya memberontak terhadap apa yang mereka anggap The Establishment atau kaum yang memerintah. Begitu pula di Cina. Bedanya di Cina mereka didukung oleh para dosen-dosen mereka dan pembesar-pembesar Partai termasuk Mao sendiri.

Para mahasiswa dan dosen mendirikan apa yang disebut Garda Merah, yaitu sebuah unit paramiliter. Dibekali dengan Buku Merah Mao, mereka menyerang antek-antek kapitalisme dan pengaruh-pengaruh Barat serta kaum kontra-revolusioner lainnya. Sebagai contoh fanatisme mereka, mereka antara lain menolak berhenti di jalan raya apabila lampu merah menyala karena mereka berpendapat bahwa warna merah yang merupakan simbol sosialisme tidak mungkin mengartikan sesuatu yang berhenti.

Maka para anggota Garda Merah ini pada tahun 1966 sangat membabi buta dalam memberantas kaum kontra revolusioner sehingga negara Cina dalam keadaan amat genting dan hampir hancur; ekonominyapun tak jalan. Akhirnya Mao terpaksa menurunkan Tentara Pembebasan Rakyat untuk menanggulangi mereka dan membendung fanatisme mereka. Hasilnya adalah perang saudara yang baru berakhir pada tahun 1968.

Masa Revolusi Kebudayaan Cina juga bertepatan dengan masa-masa pemberontakan G-30-S PKI di Indonesia di mana beberapa kalangan di Indo-

nesia menuduh orang-orang dari Republik Rakyat Cina sebagai dalangnya. Mao menyangkalnya dan hubungan antara Indonesia dan RRT yang sebelumnya hangat menjadi sangat dingin sampai hubungan diplomatik dibuka kembali pada tahun 1990, jauh setelah Mao meninggal dunia.

Pada tahun 1958 Mao meluncurkan apa yang ia sebut Lompatan Jauh ke Depan di mana daerah pedesaan direorganisasi secara total. Di mana-mana didirikan perkumpulan-perkumpulan desa (komune). Secara ekonomis ternyata ini semua gagal. Komune-komune ini menjadi satuan-satuan yang terlalu besar dan tak bisa terurusi. Diperkirakan kurang lebih hampir 20 juta jiwa penduduk Cina kala itu tewas secara sia-sia. Politik adalah perang yang dilakukan tanpa pertumpahan darah dan perang adalah politik yang dilakukan dengan pertumpahan darah

Menurut masyarakat china, Mao Zedong adalah orang yang berani , tegas , dan adil. Semua jasa-jasa kepahlawanan Mao akan terus dikenang oleh rakyat RRC. Mao bisa pula dikatakan seorang filsuf Cina yang pengaruhnya paling besar dalam Abad ke-20. Mao meninggal di beijing 9 september 1976, pada usia 82 tahun dan meski sudah tiada, harus diakui bahwa Mao sudah merombak total seluruh Cina.

Salah satu segi perombakan secara umum adalah modernisasi negeri, khususnya industrialisasi, peningkatan taraf pendidikan yang luar biasa cepat serta perbaikan tingkat kesehatan rakyat. Segi keberhasilan lain Mao adalah perubahan sistem ekonominya dari sistem kapitalis ke sistem sosialis. Secara politik, sudah barang tentu penggarapan ini dilaksanakan lewat cara-cara totaliter yang keras.

Tetapi perlu diingat, lewat indoktrinasi dan penataran yang intensif dan tak kenal lelah, Mao berhasil bukan saja menggerakkan suatu revolusi ekonomi dan politik tetapi juga revolusi sosial. Hanya dalam tempo seperempat abad telah dapat dilakukan perombakan dalam hal kesetiaan terhadap kefamilian yang sempit menjadi kesetiaan terhadap bangsa secara keseluruhan. Perombakan ini mempunyai makna yang teramat penting mengingat sepanjang sejarah sistem kesetiaan dan ikatan kefamilian di Cina teramatlah kokohnya. Dan Republik Rakyat Cina menjadi semakin terbuka.

Idi Amin Dada Oumee
Rasialisme Demi Kemakmuran Rakyat Uganda



Jenderal Idi Amin Dada Oumee atau lebih dikenal dengan nama Idi Amin lahir di Koboko, Uganda, 1925 merupakan seorang diktator militer Uganda yang memerintah pada 25 Januari 1971 hingga 13 April 1979.

Ketika Idi Amin mulai berkuasa, Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional. Pada bulan Agustus 1972, semua orang Asia berwarga negara Inggris (60.000 jiwa) diberi waktu sembilan puluh hari untuk angkat kaki dari Uganda.

Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena ia ingin memberikan "kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda". Yang kalang kabut tentu saja Inggris yang para pejabatnya buru-buru menghubungi Australia, Selandia Baru, dan negara-negara persemakmuran Inggris lainnya untuk membicarakan penampungan, apalagi Kenya dan Tanzania menolak memberikan penampungan terhadap para pengungsi.

Sepuluh hari kemudian ditetapkan aturan tambahan bahwa orang asing yang sudah menjadi warga negara Uganda harus pergi dari Uganda. Jumlahnya sekitar 23.000 jiwa. Sudah tentu warga negara keturunan asing yang lahir di Uganda kebingungan. Jika mereka pergi, status mereka adalah tanpa negara atau stateless.

itambah lagi, India, Pakistan, dan Bangladesh (negara asal mereka) menolak menerima kembali mereka. Ditambah pula dengan kebijakan nasionalisasai perusahaan-perusahaan milik orang-orang Eropa di Uganda. Idi Amin memang benar benar membuat banyak orang pusing.

Akibat keputusan ini, timbul krisis ekonomi parah di Uganda. Sekitar 90% perdagangan dan industrinya dikuasai orang-orang Asia. Orang Uganda sendiri masih sangat agraris tradisional dan kurang kecakapan, modal, dan

ketrampilan. Sebenarnya, rencana pengusiran orang Asia sudah direncanakan oleh Milton Obote karena dirasakan terlalu mencengkram ekonomi Uganda, tetapi masih menargetkan waktu lima tahun, dengan alasan mempersiapkan orang Uganda.

Pemerintahan Uganda sedemikian kacaunya sehingga Komisi Hukum Internasional PBB melapor kepada sekjen PBB saat itu, Kurt Waldheim pada 7 Juni 1974, yang isinya: 'Uganda adalah negeri tanpa hukum'. Salah satu puncak krisis adalah minta suakanya Menteri Keuangan Emmanuel Wakheya ke Inggris karena tidak tahan lagi terhadap keputusan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan rezim militer Idi Amin.

Pada awal 1977, William Johnshon menulis laporan kepada harian Bangkok Post yang isinya: 'Setelah empat tahun berkuasa, Idi Amin telah mengubah kehidupan Uganda yang buruk. Dulu negeri Uganda pengekspor teh dan kopi, namun karena sistem administrasi dan transportasi yang buruk, ratusan karung kopi teronggok di gudang menunggu diekspor, semetara puluhan ribu ton diselundupkan ke Kenya.

Uganda dulunya sebagai salah satu negeri tersubur di Afrika, kini hasil pertanian begitu langkanya sampai penduduk kota menanam tebu dan pisang. Sabun, gula, dan gandum diperlakukan seperti emas saking langkanya. Sementara di pedesaan hasil panen begitu melimpah, penduduk kota tidak dapat menikmati hasilnya. Lima tahun lalu beroperasi 298 bus yang dijalankan pemerintah, kini cuma 11 yang masih jalan.'

Pada bulan April 1979, Idi Amin berhasil digulingkan oleh tentara nasionalis Uganda yang dibantu Tanzania. Sebelumnya Idi Amin dengan bantuan Libya mencoba menyerang Kagera, provinsi utara Tanzania. Idi Amin akhirnya terbang mengungsi ke Libya yang kemudian meminta suaka ke Jeddah, Arab Saudi serta menetap di sana.

Menurutnya, angka kematian 100.000 sampai 300.000 orang yang dianiya dan dibunuh adalah akibat kesalahan bagian intelijen. Bahkan Biro Riset Nasional mengancam akan membunuhnya. Menurut Idi Amin, banyak hal-hal buruk yang disembunyikan ketika dia berkuasa. Ketika dia tahu keberadaan biro itu, semua sudah terlambat.

Namun, semasa Idi Amin belum jatuh, David Martin dalam artikelnya di South China Morning Post membeberkan bagaimana Idi Amin mengetahui sepak terjang oknum-oknumnya. Ia mengaku tidak ingin jadi Presiden, tentaranyalah yang memintanya, namun mengenai pengusiran orang Asia dia mengatakan, “Mereka terlampau berkuasa dan mencemooh kaum kami”.

Idi Amin mempunyai empat orang istri. Istri pertamanya adalah Sarah atau Mama Malian yang dinikahinya pada tahun 1958, yang kedua Kay, yang ketiga Norah, dan yang keempat Medina, yang dinikahinya pada tahun 1971.

Pada awal tahun 1974 ia ceraikan tiga isterinya yang pertama sehingga tinggal Medina. Pada 1 Agustus 1975, ia menikah dengan Sarah, seorang pembalap pasukan berani mati Angkatan Darat Uganda. Empat bulan kemudian, dia menikahi Babirye putri seorang usahawan Uganda. Waktu itu Idi Amin sudah mempunyai 34 orang anak.

Pada tanggal 20 Juli 2003, menjelang kematiannya di Rumah sakit Raja Faisal di Jeddah, istrinya memohon kepada Presiden Uganda Yoweri Museveni agar Idi Amin dikuburkan di negaranya, namun permintaan ini ditolak. Idi Amin meninggal di Arab Saudi pada tanggal 16 Agustus 2003 dan dimakamkan di Jeddah.

Pada tanggal 17 Agustus 2003, David Owen mengatakan dalam wawancara oleh Radio BBC bahwa ketika menjabat sebagai Sekertaris Kementrian Luar Negeri Inggris (1977-1979), dia memerintahkan agar Idi Amin dibunuh untuk mengakhiri rezim terornya. Usulnya ditolak, namun alasan Owen adalah rezim Idi Amin sangatlah buruk, sangat mengerikan bila dia dibiarkan berkuasa terlalu lama.

Benito Mussolini
Diktator Italia yang Fasis

Benito Amilcare Andrea Mussolini merupakan seorang diktator Italia yang menganut faham fasis. Mussolini adalah diktator Italia pada periode 1922-1943 yang dipaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri Italia pada 28 Juli 1943 setelah serangkaian kekalahan Italia di Afrika. Setelah ditangkap, Mussolini diisolasi. Dua tahun kemudian, Mussolini dieksekusi di Como,



Italia utara. Mussolini mengakhiri sebuah dekade seperti di Jerman yang dilakukan diktator Adolf Hitler dengan Nazi-nya.

Mussolini lahir di Predappio, Forlipada 29 Juli 1883. Ayahnya bernama Alessandro, seorang pandai besi dan ibunya bernama Rosa seorang guru sekolah. Seperti ayahnya, Mussolini menjadi seorang sosialis. Tahun 1902 Mussolini beremigrasi ke Swiss. Karena sulit mencari pekerjaan tetap, akhirnya Mussolini pindah ke Italia.

Pada 1908 ia bergabung dengan surat kabar Austria di kota Trento. Keluar dari situ, ia jadi editor sebuah koran sosialis la Lotta di Class . Di sini antusiasmenya pada Karl Heinrich Marx makin besar. Tahun 1910, Mussolini menjabat sekretaris partai sosialis tingkat daerah di Forlì dan kepribadiannya berkembang menjadi antipatriot.

Ketika Italia menyatakan perang denganKerajaan Ottoman tahun 1911, Mussolini dipenjara karena propaganda perdamaiannya. Ini bertentangan dengan kinerjanya kemudian. Setelah ditunjuk jadi editor koran sosialis Avanti, Mussolini pindah ke Milan, tempatnya membangun dirinya dengan kekuatan berpangaruh atas para pemimpin buruh sosialis Italia. Ia percaya, para proletar bisa dibuhul dalam gerakan fascio. Agaknya inilah cikal bakal gerakan fasis yang lahir di saat perekonomian Italia memburuk akibat perang dan pengangguran merebak di mana-mana.

Pada Maret 1919, fasisme menjadi suatu gerakan politik ketika ia membentuk Kelompok untuk Bertempur yang dikenal sebagai baju hitam, yakni kumpulan penjahat, kriminal, dan preman yang bertindak sebagai tukang pukul para cukong. Penampilan mereka seram dan tiap hari terlibat perkelahian di jalan-jalan. Setelah gagal pada Pemilu 1919, Mussolini mengembangkan paham kelompoknya, sehingga mulai mendapat pengaruh.

Mereka, kaum fasis, menolak parlemen dan mengedepankan kekerasan fisik. Anarki pecah di mana-mana. Pemerintah liberal tak berdaya mengh-

adapinya. Mussolini membawa ‘geng’nya, sejumlah besar kaum fasis yang bertampang sangar, untuk melakukan Berbaris ke Roma. Melihat rombongan preman berwajah angker memasuki Roma, Raja Vittorio Emanuele III ciut.

Mussolini kemudian diundang ke istana lalu diberi posisi sang Pemimpin. Pada Oktober 1922, Raja memintanya membentuk pemerintahan baru. Jadilah Italia dikelola pemerintahan fasis. Gebrakan pertamanya setelah memegang kekuasaan, adalah menyerang Ethiopia dengan merujuk pada pandangan rasis Charles Robert Darwin, “Ethiopia bangsa kelas rendah, karena termasuk kulit hitam. Jika diperintah oleh ras unggul seperti Italia, itu sudah merupakan akibat alamiah dari evolusi.” Bahkan ia bersikeras bahwa bangsa-bangsa berevolusi melalui peperangan. Sehingga jadilah Italia waktu itu salah satu bangsa yang ditakuti sepak terjangnya.

Yang meresahkan, ketika Mussolini menduduki Abbesinia tahun 1937, kontan dunia tersentak. Teman akrabnya di Eropa adalah Adolf Hitler dan mereka membuat aliansi, yang menyeret Italia ke dalam Perang Dunia II di pihak Jerman pada 1940. Namun, pasukannya akhirnya kalah di Yunani, Afrika, dan Uni Soviet (Rusia), dan Italia sendiri akhirnya diserbu oleh pasukan Britania Raya dan Amerika Serikat pada 1943. Pada saat itu Mussolini telah diturunkan dari jabatannya oleh raja Victor Emmanuel III dan ditahan di Campo Imperatore, sebuah resor pegunungan terpencil di Abruzzo.

Tak lama kemudian, pasukan khusus Jerman berhasil membebaskan dan mengembalikannya berkuasa di Italia Utara. Tetapi, pada praktiknya Mussolini memerintah sebagai pemimpin boneka, yang sebenarnya berkuasa adalah orang-orang Nazi Jerman. Akhir riwayatnya tiba tak lama kemudian. Ketika akhirnya Fasis Italia dikalahkan pada tahun 1945, ia bersama istri sirinya, dan tiga orang pendukungnya ditangkap dan kemudian ditembak mati oleh kelompok perlawanan Italia (tepatnya kelompok komunis) di sebuah desa bernama Giulino di Mezzegra dan mayat mereka digantung terbalik dan dipertontonkan kepada publik di pompa bensin di Piazza Loreto, Milan.

Sebelum digantung, mayat mereka dibawa ke tempat tersebut lalu ditembaki berkali-kali, diludahi, dilempari batu, dan ditendangi oleh rakyat yang

marah terhadap sepak terjang Mussolini dan Partai Fasis-nya. Hal ini bertujuan untuk meruntuhkan semangat juang orang-orang fasis dan sebagai pembalasan atas penggantungan beberapa partisan di tempat yang sama oleh otoritas Poros.

Beberapa saat kemudian, kaum partisan menangkap seorang loyalis dan salah satu pimpinan kaum fasis, Achille Starace dan ia diperlihatkan mayat Mussolini. Ia memberi penghormatan kepada pemimpinnya tersebut sesaat sebelum ditembak mati dan ia sendiri turut digantung bersama mayat Mussolini. Mayat Mussolini kemudian dikuburkan di makam tak bertanda di Mussoco.

Setahun kemudian, di hari Paskah, sisa-sisa pendukungnya menggali kuburnya kembali dan kemudian disembunyikan di suatu tempat bernama Certosa de Pavia, dekat Milan. Masalah mayat Mussolini sempat menjadi kontroversi di Italia saat itu dan akhirnya, mayat Mussolini ditemukan dan "disimpan" selama 10 tahun sebelum dikuburkan di Predappio, Emilia-Romagna, tempat kelahirannya.

Pol Pot
Prinsip Kemandirian dan Kematian 20% Rakyat Kamboja



Saloth Sar atau yang lebih dikenal dengan nama Pol Pot, adalah mantan Perdana Menteri Demokratik Kamboja. Selama menjadi Perdana Menteri, Pol Pot dikenal otoriter dan kejam baik kepada rakyat maupun pejabat. Ketika Pol Pot berkuasa, sekitar 21% penduduk Kamboja tewas karena pembantaian, kerja paksa, maupun kelaparan. Kediktatoran dan kekejaman Pol Pot membuatnya masuk dalam jajaran 15 Diktator Kelas Dunia dan 10 Orang Terkejam Sepanjang Masa.

Pol Pot lahir di Kampong Thom tahun 1928. Dia adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara dari keluarga keturunan Cina yang cukup kaya. Saudara perempuannya yang bernama Roeung merupakan selir Raja Sisowath Monivong, sehingga ia memiliki akses untuk keluar masuk istana raja. Pol Pot sempat

medapatkan kesempatan untuk bersekolah di Lycee Sisowath, namun prestasinya tidak begitu bagus. Selanjutnya, Pol Pot mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Paris di bidang Teknik Radio tahun 1949-1953, walaupun pada akhirnya gagal menyelesaikan studinya karena alasan prestasi. Di sana, Pol Pot bergabung dengan Partai Komunis Perancis dan sebuah organisasi komunis rahasia yang bernama ‘Lingkaran Marxis’.

Kegagalan Pol Pot dalam studinya membuat dia kembali ke tanah air. Pol Pot adalah anggota pertama Marxis Circle yang kembali ke Kamboja sehingga ia ditugasi untuk mengevaluasi berbagai partai pemberontak di Kamboja.

Pol Pot kemudian juga bergabung dengan United Khmer Isaarak Front, sebuah perkumpulan yang menentang kekuasaan Perancis di Kamboja. Pemerintahan Pangeran Sihanouk juga memiliki tujuan yang yang sama dengan perkumpulan tersebut. Tahun 1954, Perancis dipaksa angkat kaki dari Kamboja. Pada tahun itu, Pol Pot menjadi anggota Khmer People’s Revolutionary Party yang merupakan partai komunis pertama di Kamboja. Kebenciannya terhadap kaum intelektual tumbuh dengan subur. Partai ini sempat berkonflik dengan Vietnam yang ingin memegang kendali atas kelompok anti pemerintahan Sihanouk.

Tahun 1960, Pol Pot bersama pengikutnya mendirikan Partai Pekerja Kamboja dimana ia didaulat menjadi Sekretaris Umum. Tiga tahun setelahnya, ia naik pangkat menjadi Sekretaris Partai menggantikan Samouth yang beberapa waktu setelahnya hilang secara misterius. Tiga belas tahun selanjutnya, Pol Pot dan anggota partai lainnya menjalankan fungsi organisasi di hutan belantara yang jauh dari keramaian. Tahun 1966, Partai Pekerja Kamboja berubah nama menjadi Partai Komunis Kamboja.

Partai Komunis Kamboja menggerakan banyak demonstrasi menentang pemerintahan sihanouk. Desember 1969 hingga January 1970, Pol Pot dan partainya merencanakan penggulingan Sihanouk. Tahun 1970, Pol Pot berhasil menggulingkan Sihanouk yang kemudian digantikan oleh Lon Nol.

April 1975, suasana Phnom Penh memanas karena terjadi perang memperebutkan kekuasaan Negara Demokratik Kamboja antara pihak Pol Pot

yang beraliansi dengan partai-partai komunis lain dengan pendukung Sihanouk. Setahun kemudian, kubu Sihanouk kalah dan Pol Pot diangkat sebagai Perdana Menteri Kamboja, setelah dia terpilih lagi menjadi sekretaris partai. Namun demikian, kekuasaan Pol Pot banyak ditentang oleh pemimpin-pemimpin partai yang telah terpengaruh oleh Vietnam.

Pol Pot akhirnya harus menghabisi kawan sendiri demi kestabilan posisinya. Selain kejam pada kawan sendiri, Pol Pot juga menunjukkan kediktatorannya sebagai pemimpin dengan memerintahkan rakyat untuk pindah ke perkotaan dan bekerja. Perintah Pol Pot ini menyebabkan terjadinya ledakan penduduk di ibukota yang dalam waktu singkat populasi di sana bertambah sekitar satu juta jiwa.

Program kerja paksa membuat rakyat menderita kelaparan, dan parahnya mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pol Pot bertanggung jawab atas kematian sekitar 20% populasi penduduk Kamboja karena sikap otoriternya. Karena pada masa pemerintahannya, siapapun yang menjadi ancaman disingkirkan dengan kejam.

Tercatat 2 juta orang dari 8 juta populasi Kamboja dieksekusi selama pemerintahan Pol Pot. Kegagalan ekonomi memicu krisis kelaparan di seluruh negeri. Namun, bantuan dari luar tidak diterima karena prinsip kemandirian yang menjadi dasar Khmer Merah.

Penyerangan Vietnam kepada rezim Pol Pot menjadi awal mula kehancurannya. Tahun 1979, Pol Pot didakwa hukuman mati karena pembantaian penduduk yang dilakukannya. Keputusan ini dikeluarkan oleh pemerintahan yang baru, yaitu Republik Kamboja, yang terbentuk atas pertolongan Vietnam. Pada Desember 1979, ia dicopot dari jabatannya sebagai ketua partai. Tidak banyak yang tahu kabar Pol Pot setelah itu. Setelah beberapa tahun bersembunyi, Pol Pot ditangkap pada tahun 1997.

Pol Pot menjadi tahanan rumah dan akhirnya meninggal dunia pada 15 April 1998 karena gagal jantung. Namun, ada dugaan bahwa ia meninggal karena bunuh diri, sebab permintaan pemerintah untuk melihat jenazahnya ditolak dan jenazahnya dikremasi di Anlong Veng, zona Khmer Rogue beberapa hari kemudian. Hal ini semakin menguatkan rumor yang beredar.

Augusto Pinochet
Kebijakan Pasar Bebas Neoliberal



Lahir di Valparaiso, 25 November 1915, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte atau singkatnya Augusto Pinochet adalah seorang jenderal dan dikenal sebagai seorang diktator dari Chili. Pinochet adalah kepala junta militer yang berkuasa di Chili pada periode 1973 - 1990. Pinochet meraih kekuasaan dengan cara kudeta sesaat setelah pemilu demokratis yang memilih Presiden Salvador Allende yang sosialis.

Dia tampil sebagai presiden Republik pada 1974 - 1990 (dari 1981 hingga terbentuknya sebuah Konstitusi 1980) yang baru. Sekitar 3.000 orang Chili terbunuh selama masa pemerintahannya. Pinochet memperkenalkan banyak kebijakan pasar bebas neoliberal.

Pada awal tahun 1972, Pinochet diangkat menjadi Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Pada bulan Agustus 1973, ia diangkat sebagai Komandan Kepala Angkatan Darat Chili oleh Presiden Salvador Allende. Pada tanggal 11 September 1973, Pinochet memimpin kudeta yang mengakhiri pemerintahan Allende yang terpilih secara demokratis.

Pada bulan Desember 1974, junta militer Pinochet diangkat sebagai Presiden dengan keputusan bersama, kecuali Jenderal Angkatan Udara Gustavo Leigh yang tidak setuju. Dari awal memerintah, Augusto Pinochet menerapkan langkah-langkah keras terhadap lawan-lawan politiknya.

Melalui Operasi Jakarta, presiden AS, Richard Nixon menggunakan CIA untuk membantu junta militer Chili dalam mengkudeta Presiden Salvador Allende dan menaikan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Chile, Augusto Pinochet Agurte. Sejak 1974-1990, tidak kurang dari 2025 kasus pelanggaran HAM dilakukan oleh rezim Pinochet melalui dinas rahasianya DINA

(semacam Kopkamtib-nya Chile) telah terjadi. 1068 berupa kasus pembunuhan dan 957 kasus orang hilang.

Menurut berbagai laporan dan investigasi ditemukan 1200-3200 orang tewas, 80.000 orang diasingkan, dan sampai 30.000 disiksa oleh rezim Augusto Pinochet. Profesor Clive Foss, dalam The tiran 2500 tahun Absolute Power dan Korupsi (Quercus Publishing 2006), memperkirakan bahwa 1500 orang Chili terbunuh atau hilang selama rezim Pinochet.

Sementara 200,000 orang lain pergi ke pengasingan, terutama ke Argentina dan Peru, dan diterapkan untuk suaka politik atau menerima pelatihan lebih lanjut di kamp gerilya di Kuba, Jerman Timur, dan di tempat lain. Namun, beberapa individu kunci dalam pengasingan mereka diikuti oleh rahasia DINA polisi, dalam rangka Operasi Burung Kondor, yang menghubungkan militer Amerika Selatan bersama pemerintah terhadap lawan-lawan politik.

Kudeta yang dilakukan Pinochet terhadap Allende, bila dicermati amat mirip dengan yang terjadi di Indonesia yaitu setidaknya antara lain pada :

1. Beredarnya dokumen yang meresahkan tentang perencanaan pembunuhan beberapa jenderal dan komandan-komandan militer. Hal itu selain terjadi di Chile (dokumen rencana ‘Z’) juga Indonesia (Beredarnya daftar pejabat AD yang akan dibunuh dikalangan tokoh-tokoh buruh, politisi dan elit militer Chili).

2. Disebarnya isu yang menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan poltitik dalam negeri. Di Chile masyarakat terutama serikat buruh militan dan jenderal-jenderal konservatif mendapat kiriman kartu-kartu kecil di mana tercetak kata-kata “Jakarta Se Acerca” (Jakarta Sudah Mendekat). Diduga sangat kuat kedua kudeta tersebut sama-sama di dukung CIA.

Presiden Augusto Pinochet diberi kerangka hukum melalui plebisit yang sangat kontroversial pada tahun 1980, yang menyetujui sebuah konstitusi baru yang disusun oleh sebuah komisi yang ditunjuk pemerintah. Sebuah plebisit pada tahun 1988 (yang melihat suara 56% terhadap melanjutkan kepresidenannya) menyebabkan pemilihan demokratis untuk Kepresidenan

dan Parlemen. Setelah mengundurkan diri pada tahun 1990, Augusto Pinochet melanjutkan kariernya di dunia politik sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat Chili hingga 10 Maret 1998, ketika pensiun Augusto Pinochet menjadi senator seumur hidup sesuai dengan Konstitusi 1980.

Pemerintah baru juga menerapkan reformasi ekonomi, termasuk privatisasi industri beberapa negara dikendalikan dan rollback lembaga kesejahteraan banyak negara. Kebijakan-kebijakan ini dihasilkan apa yang telah disebut sebagai keajaiban 'Chili', tapi kebijakan pemerintah meningkat secara dramatis kesenjangan ekonomi dan beberapa atribut efek buruk dari krisis moneter 1982 dalam ekonomi Chili tepat untuk kebijakan ini. kebijakan ekonomi Pinochet dilanjutkan dan diperkuat oleh pemerintah setelahnya secara berturut-turut setelah tahun 1990.

Augusto Pinochet adalah seorang tokoh sangat polarisasi di dalam dan di luar negeri. Kebijakan-nya yang keras ditentang oleh kaum kiri dan moderat banyak yang menyerang pelanggaran hak asasi manusia yang menyatakan bahwa Augusto Pinochet disukai hanya karena kepentingan elit.

Sebaliknya, banyak orang kaum kanan melihatnya sebagai benteng melawan Marxisme dan mereka juga percaya bahwa Augusto Pinochet merupakan salah satu pemimpin yang bisa menjadikan Chile sebagai negara paling makmur dibanding negara-negara maju di Amerika Latin.

Pada tahun 2004, Chili Juan Guzmán Hakim memutuskan bahwa Augusto Pinochet harus diadili dan kemudian menjadikannya tahanan rumah. Pada saat kematiannya di 10 Desember 2006, sekitar 300 tuduhan pidana masih tertunda untuk melawan dirinya di pengadilan.

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, penghindaran pajak, dan penggelapan di bawah pemerintahannya dan setelahnya. Selama menjabat, Augusto Pinochet dituduh telah mengumpulkan kekayaan sebesar US $ 28 juta atau lebih.

Napoleon Bonaparte Egomaniac yang Semodel dengan Hitler

Napoleon Bonaparte merupakan sosok yang selalu menimbulkan kontro-



versi bagi banyak orang. Mereka yang hidup pada jaman itu ataupun setelahnya hampir selalu menghadapi dilema dalam menilainya, apakah ia seorang yang bengis dan bar-bar dan suka membunuh orang ataukah seorang pemimpin yang selalu mendapat simpati dari pengikutnya? Napoleon Bonaparte dikabarkan selalu memberi racun kepada tentaranya yang terluka setiap usai berperang.

Tidak jelas, apakah itu disebabkan karea ia tak peduli kepada mereka atau justru karena ia tak tega melihat mereka menderita terlalu lama? Konon ia juga selalu membawa bekal sedikit di setiap peperangan dari yang semestinya diperlukan pasukannya.

Apakah itu karena ia kejam dan tak punya belas kasih atau justru karena ia seorang yang realistis? Napoleon Bonaparte mungkin saja berpikir bahwa akan banyak tentara yang mati dalam peperangan sehingga jumlah pasukan berkurang.

Jendral dan Kaisar Perancis yang tenar, Napoleon I, keluar dari rahim ibunya di Ajaccio, Corsica, tahun 1769. Nama aslinya Napoleon Bonaparte. Corsica masuk wilayah kekuasaan Perancis cuma lima belas bulan sebelum Napoleon lahir, dan pada saat-saat remajanya Napoleon seorang nasionalis Corsica yang menganggap Perancis itu penindas. Tetapi, Napoleon dikirim masuk akademi militer di Perancis dan tatkala dia tamat tahun 1785 pada umur lima belas tahun dia jadi tentara Perancis berpangkat letnan.

Kesempatan pertama Napoleon menampakkan kebolehannya adalah di tahun 1793, dalam pertempuran di Toulon (Perancis merebut kembali kota itu dari tangan Inggris), tempat Napoleon bertugas di kesatuan artileri. Pada saat itu dia sudah tidak lagi berpegang pada paham nasionalis Corsicanya, melainkan sudah menganggap diri orang Perancis.

Sukses-sukses yang diperolehnya di Toulon mengangkat dirinya jadi brigjen dan pada tahun 1796 dia diberi beban tanggungjawab jadi komando

tentara Perancis di Italia. Di negeri itu, antara tahun 1796-1797, Napoleon berhasil pula merebut serentetan kemenangan yang membuatnya menjadi seorang pahlawan tatkala kembali ke Perancis.

Pada tahun 1798 Napoleon Bonaparte memimpin penyerbuan Perancis ke Mesir. Langkah ini ternyata merupakan malapetaka. Di darat, umumnya pasukan Napoleon berhasil, tetapi Angkatan Laut Inggris di bawah pimpinan Lord Nelson dengan mantap mengobrak-abrik armada Perancis dan di tahun 1799 Napoleon meninggalkan pasukannya di Mesir dan pulang ke Perancis.

Begitu sampai di Perancis, Napoleon yang jeli itu dapat berkesimpulan bahwa rakyat Perancis lebih terkenang dengan kemenangan-kemenangannya di Italia ketimbang kegagalan ekspedisi Perancis ke Mesir. Berpegang pada fakta ini, hanya sebulan sesudah dia menginjak bumi Perancis, Napoleon Bonaparte ambil bagian dalam perebutan kekuasaan bersama Albe Sieyes dan lain-lainnya.

Kup ini melahirkan sebuah pemerintah baru yang disebut “Consulate” dan Napoleon menjadi Konsul pertama. Kendati konstitusi sudah disusun dengan cermat dan diterima lewat persetujuan plebisit rakyat, ini cuma kedok belaka untuk menutupi kediktatoran militer Napoleon yang dengan segera mampu menyikut dan melumpuhkan lawan-lawannya. Naiknya Napoleon Bonaparte ke tahta kekuasaan betul-betul menakjubkan

Tepatnya di bulan Agustus 1793, sebelum pertempuran Toulon, Napoleon samasekali tidak dikenal orang. Dia tak lebih dari seorang perwira rendah berumur dua puluh empat tahun dan bukan sepenuhnya orang Perancis. Tetapi, kurang dari enam tahun kemudian –masih dalam usia tiga puluh tahun– sudah menjelma jadi penguasa Perancis yang tak bisa dibantah lagi, posisi yang digenggamnya selama lebih dari empat belas tahun.

Di masa tahun-tahun kekuasaannya, Napoleon melakukan perombakan besar-besaran dalam sistem administrasi pemerintahan serta hukum Perancis. Misalnya, dia merombak struktur keuangan dan kehakiman, dia mendirikan Bank Perancis dan Universitas Perancis, serta menyentralisir administrasi. Meskipun tiap perubahan ini punya makna penting, dan dalam beberapa hal punya daya pengaruh jangka lama khususnya untuk Perancis,

tidaklah punya pengaruh yang berarti buat negeri lain. Tetapi salah satu perombakan yang dilakukan oleh Napoleon punya daya pengaruh yang melampaui batas negeri Perancis sendiri. Yaitu, penyusunan apa yang termasyhur dengan sebutan Code Napoleon. Dalam banyak hal, code ini mencerminkan ide-ide Revolusi Perancis. Misalnya, di bawah code ini tidak ada hak-hak istimewa berdasar kelahiran dan asal-usul, semua orang sama derajat di mata hukum.

Berbarengan dengan itu code tersebut cukup mendekati hukum-hukum lama dan adat kebiasaan Perancis sehingga diterima oleh rakyat Perancis dan sistem pengadilannya. Secara umum, code itu moderat, terorganisir rapi dan ditulis dengan ringkas, jelas, serta dapat diterima, tambahan pula mudah difahami. Akibatnya, code ini tidak hanya berlaku di Perancis (hukum perdata Perancis yang berlaku sekarang hampir mirip dengan Code Napoleon itu) tetapi juga diterima pula di negeri-negeri lain dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan keperluan setempat.

Politik Napoleon senantiasa menumbuhkan keyakinan bahwa dialah seorang yang membela Revolusi Perancis. Tetapi, di tahun 1804 dia sendiri pula yang memperoklamirkan diri selaku Kaisar Perancis. Tambahan lagi, dia mengangkat tiga saudaranya keatas tahta kerajaan di beberapa negara Eropa.

Langkah ini tidak bisa tidak menumbuhkan rasa tidak senang pada sebagian orang-orang Republik Perancis yang menganggap tingkah itu sepenuhnya merupakan pengkhianatan terhadap ide-ide dan tujuan Revolusi Perancis. Tetapi, kesulitan utama yang dihadapi Napoleon adalah peperangan dengan negara-negara asing.

Pada tahun 1802, di Amiens, Napoleon Bonaparte menandatangani perjanjian damai dengan Inggris. Ini memberi angin lega kepada Perancis yang dalam tempo sepuluh tahun terus-menerus berada dalam suasana perang. Tetapi, di tahun berikutnya perjanjian damai itu putus dan peperangan lama dengan Inggris dan sekutunya pun mulai lagi.

Walaupun pasukan Napoleon berulang kali memenangkan pertempuran di daratan, Inggris tidak bisa dikalahkan kalau saja armada lautnya tak ter-

lumpuhkan. Malangnya untuk Napoleon, dalam pertempuran yang musykil di Trafalgar tahun 1805, armada laut Inggris merebut kemenangan besar. Karena itu, pengawasan dan keampuhan Inggris di lautan tidaklah perlu diragukan lagi. Meskipun kemenangan besar Napoleon (di Austerlitz melawan Austria dan Rusia) terjadi enam minggu sesudah Trafalgar, hal ini sama sekali tidak bisa menghapus kepahitan kekalahan di sektor armada laut.

Pada tahun 1808 Napoleon membuat ketololan besar melibatkan Perancis ke dalam peperangan yang panjang dan tak menentu ujung pangkalnya di Semenanjung Iberia, tempat tentara Perancis tertancap tak bergerak selama bertahun-tahun. Tetapi, kekeliruan terbesar Napoleon adalah serangannya terhadap Rusia. Di tahun 1807 Napoleon bertemu muka dengan Czar, dan dalam perjanjian Tilsit mereka bersepakat menggalang persahabatan abadi. Tetapi, persepakatan dan persekutuan itu lambat laun rusak, dan pada tahun 1812 bulan Juni Napoleon memimpin tentara raksasa menginjak-injak bumi Rusia.

Hasil dari perbuatan ini sudah sama diketahui. Tentara Rusia umumnya menghindar dari pertempuran langsung berhadapan dengan tentara Napoleon, karena itu Napoleon dapat maju dengan cepatnya. Di bulan September Napoleon menduduki Moskow. Tetapi, orang Rusia membumihanguskan kota itu dan sebagian besar rata dengan tanah.

Sesudah menunggu lima minggu di Moskow (dengan harapan sia-sia Rusia akan menawarkan perdamaian), Napoleon akhirnya memutuskan mundur, tetapi keputusan ini sudah terlambat. Gabungan antara pukulan tentara Rusia dan musim dingin yang kejam, tak memadainya suplai pasukan Perancis mengakibatkan gerakan mundur itu menjadi gerakan mundur yang morat-marit. Kurang dari sepuluh persen tentara raksasa Perancis bisa keluar dari bumi Rusia hidup-hidup.

Negara-negara Eropa lain, seperti Austria dan Prusia, sadar benar mereka punya kesempatan baik menghajar Perancis. Mereka menggabungkan semua kekuatan menghadapi Napoleon,dan pada saat pertempuran di Leipzig bulan Oktober 1813, Napoleon kembali mendapat pukulan pahit hingga sempoyongan. Tahun berikutnya dia berhenti dan dibuang ke Pulau Elba, sebuah pulau kecil di lepas pantai Italia. Pada tahun 1815 dia melarikan diri

dari Pulau Elba, kembali ke Perancis, disambut baik dan kembali berkuasa. Kekuatan-kekuatan Eropa segera memaklumkan perang dan seratus hari sehabis duduknya lagi ia di tahta kekuasaan, Napoleon mengalami kekalahan yang mematikan di Waterloo. Sesudah Waterloo, Napoleon dipenjara oleh orang Inggris di St. Helena, sebuah pulau kecil di selatan Samudera Atlantik. Di sinilah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir tahun 1821 akibat serangan kanker.

Karier militer Napoleon menyuguhkan paradoks yang menarik. Kegeniusan gerakan taktiknya amat memukau, dan bila diukur dari segi itu semata, bisa jadi dia bisa dianggap seorang jendral terbesar sepanjang jaman. Tetapi di bidang strategi dasar dia merosot akibat bikin kekeliruan-kekeliruan besar, seperti misalnya penyerbuan ke Mesir dan Rusia.

Kesalahan strateginya terlihat bodoh sehingga Napoleon tak layak dijuluki pemimpin militer kelas wahid. Apakah anggapan kedua ini tidak adil? Sesungguhnya, ukuran kebesaran seorang jendral terletak pada kemampuannya mengelak dari berbuat kesalahan-kesalahan yang menuntun ke arah kehancuran.

Hal semacam itu tak terjadi pada diri Alexander Yang Agung, Jengis Khan dan Tamerlane yang tentaranya tak pernah terkalahkan. Berhubung Napoleon pada akhirnya dapat dikalahkan di tahun 1815, Perancis memiliki daerah lebih kecil ketimbang yang pernah dipunyainya di tahun 1879, saat pecahnya Revolusi.

Napoleon tentu saja seorang “egomaniac” dan sering dianggap semodel dengan Hitler. Tetapi, ada perbedaan yang ruwet diantara keduanya. Jika Hitler bertindak sebagian terbesarnya atas dorongan ideologi yang tersembunyi, Napoleon semata-mata terdorong oleh ambisi yang oportunistis dan dia tak punya selera melakukan penjagalan besar dan gila-gilaan.

Dalam masa pemerintahan Napoleon, tidak terdapat semacam kamp konsentrasi seperti yang dipunyai Hitler. Teramat masyhurnya nama Napoleon amat mudah menjebak orang menganggap dia itu berpengaruh besar secara berlebih-lebihan. Masa pengaruh jangka pendeknya memang besar, mungkin lebih besar dari Alexander Yang Agung walaupun tidak sebesar

Hitler. (Menurut taksiran, sekitar 500.000 tentara Perancis mati dalam perang Napoleon, sedang sekitar 800.000 orang Jerman tewas selama Perang Dunia ke-2). Dengan ukuran apa pun, perbuatan pengrusakan Napoleon lebih sedikit ketimbang apa yang diperbuat Hitler.

Banyak orang bilang, masa Napoleon menyediakan peluang bagi perubahan-perubahan bagi terkonsolidasinya dan semakin mapannya kaum borjuais Perancis. Di tahun 1815, tatkala monarki Perancis akhirnya tersusun kembali, perubahan-perubahan ini ditopang dan dilindungi begitu baiknya sehingga kemungkinan bisa kembalinya pola-pola sosial orde lama suatu hal yang sepenuhnya mustahil.

Tetapi, perubahan terpenting sebetulnya terjadi dan tersusun sebelum Napoleon. Pada tahun 1799 ketika Napoleon memegang kendali pemerintahan mungkin setiap jalan ke arah kembalinya ke masa status quo sudah terlambat. Tetapi, lepas dari ambisi Napoleon sendiri yang keraja-rajaan, dia memang pegang peranan penting menyebarnya ide revolusi ke seluruh Eropa.

Napoleon juga membawa akibat timbulnya pengaruh-pengaruh luas dan besar dalam revolusi Amerika Latin. Penyerbuannya ke Spanyol melemahkan pemerintahan Spanyol sehingga cengkraman kolonialnya di daerah-daerah jajahannya juga dengan sendirinya melonggar dan tidak efektif. Dalam situasi de facto otonomi inilah gerakan-gerakan kemerdekaan Amerika Latin mulai meletus.

Napoleon di pertempuran Waterloo. Dari semua langkah perbuatan Napoleon, yang paling penting dan paling punya pengaruh berjangka panjang justru yang berada di luar rencananya dan tidak ada sangkut pautnya dengan rencana Napoleon sendiri.

Di tahun 1803, Napoleon menjual daerah luas kepada Amerika Serikat. Dia tahu, milik Perancis di Amerika Utara sulit dilindungi menghadapi serangan-serangan Inggris. Selain itu, dia juga perlu duit, penjualan tanah Louisiana itu mungkin merupakan jual-beli tanah secara damai yang terbesar dalam sejarah sekaligus mengubah Amerika Serikat menjadi suatu negara yang berukuran benua.

Sukar dibayangkan apa bentuknya Amerika Serikat tanpa Louisiana ini. Pasti akan merupakan negeri yang samasekali berbeda dengan apa yang kita kenal sekarang. Dan pula layak diragukan Amerika Serikat bisa menjadi negeri kuat tanpa jual-beli Louisiana ini. Napoleon, tentu saja, bukanlah satu-satunya orang yang berperanan dan bertanggung jawab atas penjualan ini. Pemerintah Amerika jelas pegang peranan pula. Tetapi, penawaran Perancis menjual Louisiana diputuskan dalam perundingan oleh satu orang. Dan orang itu Napoleon Bonaparte.

Saddam Husein
Senjata Pembunuh Massal dan Puluhan Ribu Nyawa Penduduk Iran



Saddam Husein lahir pada tahun 1937di Tikrit, Irak. Kehidupan di Desanya teramat sangat keras, pada masa kecilnya Saddam seringkali keluar rumah dengan membekali diri dengan senjata sebagai alat bela diri dikarenakan seringkali terjadi bentrokan antar-teman sebayanya. Pada usia 16 Tahun Saddam sudah menjadi ketua geng jalanan.

Pada Usia 17 Tahun Saddam membunuh salah seorang saingan pamannya hingga dipenjara 6 bulan. Pada Usia 19 Tahun sudah berkomplot untuk menumbangkan monarki yang berkuasa dan pada usia 21 tahun melakukan percobaan pembunuhan dengan menembak perdana menteri Irak dengan senapan Mesin.

Pada usia 20 tahun ia terjun dalam dunia politik dengan bergabung dalam Partai Baath. Saddam memainkan peran penting dalam kudeta yang dilakukan Partai Baath terhadap Presiden Irak saat itu, Abdul Rahman Arif pada tahun 1968. Kudeta tersebut dipimpin oleh ketua Partai Baath, Hasan Al Bakr yang setelah kudeta mengangkat diri sebagai presiden.

Saddam pun diangkat sebagai wakil Hasan Al Bakr dan menduduki po-

sisi itu selama 15 tahun. Selama itu pula, Saddam melakukan berbagai aksi represif terhadap rakyat Irak. Setelah semakin berkuasa, Saddam pun menyingkirkan Hasan Al Bakr dan merebut posisi sebagai presiden dan pemimpin Partai Baath.

Tak lama setelah Saddam menjadi pemimpin partai Baath, dia melakukan pembersihan besar-besaran dalam tubuh partai. Para penentangnya dibunuh. Para ulama penentang Saddam juga dibunuh atau disiksa dalam penjara. Selama 35 tahun menjadi pemimpin Partai Baath, dia melakukan berbagai pembunuhan massal terhadap rakyat Kurdi di utara Irak dan rakyat Syiah di selatan Irak.

Sebagian sejarawan meyakini, sejak sebelum kudeta tahun 1968, sesungguhnya Saddam sudah menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Menurut mereka, Saddam setelah pembunuhan terhadap Abdul Karim Qasim tahun 1959 melarikan diri ke Mesir dan di negara ini dia menjalin hubungan dengan agen-agen CIA.

Empat tahun kemudian, Saddam pun kembali ke Irak. Pelayanan penuh Saddam terhadap Gedung Putih mulai terlihat mencolok di hadapan opini umum sejak dia menjadi wakil presiden Hasan Al Bakr. Setelah dia menyingkirkan Hasan Al Bakr yang tak lain sepupunya sendiri, dan meraih tampuk kepresidenan, Saddam semakin meningkatkan kerjasamanya dengan Gedung Putih. Pelayanan terbesar yang dilakukan Saddam terhadap kehendak para penguasa Amerika Serikat adalah invasinya ke Iran pada tahun 1980, segera setelah kemenangan revolusi Islam Iran.

Revolusi Islam Iran telah menumbangkan raja boneka Amerika, Shah Pahlevi. Amerika Serikat juga tidak bisa lagi mengeksploitasi kekayaan alam Iran sebagaimana yang telah dilakukannya selama era pemerintahan Pahlevi. Itulah sebabnya AS mendalangi serangan Saddam terhadap Iran. Selain memberikan bantuan politik dan dana, negara-negara Barat itu juga membantu Saddam dalam memproduksi senjata pembunuh massal yang digunakan dalam menyerang Iran.

Menurut data, selama era perang itu, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain, serta negara-negara Arab, telah memberikan bantuan sebesar

120 milyar dollar kepada Saddam. Periode perang delapan tahun Irak-Iran adalah periode keemasan hubungan antara Saddam dan Amerika Serikat. Donald Rumsfeld pada tahun 1983 datang ke Irak untuk berjumpa dengan Saddam dan menjanjikan bantuan keuangan. Robert Fisk wartawan terkemuka dari AS menulis, “Pada zaman ketika Irak membeli gas kimia dari AS, saya dengan mata kepala sendiri melihat bahwa Rumsfeld bersalaman dengan Saddam.

Selama perang delapan tahun Iran-Irak itu, bangsa Iran telah kehilangan nyawa puluhan ribu warganya, mengalami kerugian materil ratusan milyar dollar, dan mengalami ketertinggalan pembangunan selama bertahun-tahun. Selama perang, Saddam juga menggunakan senjata dan bom kimia yang menyebabkan kematian puluhan ribu orang.

Hari ini, terdapat sekitar 45.000 orang Iran yang masih hidup dengan menanggung berbagai penyakit akibat terkontaminasi senjata kimia. Setiap tahunnya, pemerintah Iran mengeluarkan dana 37 juta dollar AS untuk merawat para korban senjata kimia itu, namun tiap tahun pula banyak di antara mereka yang akhirnya gugur. Namun, kegigihan bangsa Iran dalam membela tanah air mereka, usaha Saddam dan negara-negara Barat untuk menganeksasi Iran akhirnya menemui kegagalan.

Setelah kalah dalam usahanya untuk menguasai Iran, Saddam pun mulai dikhianati oleh sekutunya itu. Atas lampu hijau dari Amerika Serikat, pada tahun 1991 Saddam menyerang Kuwait dengan tujuan menguasai ladang-ladang minyak di negeri itu.

Namun, segera setelah serbuan Saddam ke Kuwait, AS malah menggalang pasukan multinasional untuk membela Kuwait. Tentu saja, pasukan Saddam yang memang sudah lemah karena delapan tahun bertempur dengan Iran, dengan mudah bisa dipukul mundur oleh AS dan sekutu-sekutunya. Kelemahan posisi Saddam dimanfaatkan oleh sebagian bangsa Irak untuk memberontak dari diktator yang selama ini sudah menyengsarakan mereka itu.

Namun, lagi-lagi, Saddam berkonspirasi dengan AS. Tiba-tiba serangan pasukan AS terhadap Saddam dihentikan sehingga Saddam bisa berkonsen-

trasi merepresi warganya yang memberontak. Namun tak lama kemudian, AS memimpin gerakan internasional untuk mengembargo Irak dan yang sengsara akibat embargo ini adalah rakyat kecil. Mereka kekurangan makan dan obat-obatan, sementara Saddam dan para penguasa tetap hidup sejahtera. Setelah 12 tahun menderita akibat embargo tersebut, rakyat Irak pada tahun 2003 menghadapi penderitaan baru lagi, yaitu agresi AS ke wilayah mereka dengan alasan untuk menggulingkan Saddam. Setelah Saddam terguling pun, AS dan Inggris tetap bercokol di negeri itu dan menimpakan penderitaan tak terkira bagi rakyat Irak.



PENUTUP

Jika kita hendak mengupas tuntas masalah kebijakan publik sampai ke akar-akarnya, mungkin akan sulit jika kita tidak menggeluti dunia politik dan lingkungannya. Walaupun sekedar teori sebenarnya sangat membantu untuk sekedar paham apa dan seperti apa kebijakan publik tersebut. Namun demikian, saya coba mengulas istilah yang seringkali dikaitkan dengan kebijakan publik. Saya mengutip satu paper susunan dosen Prof.Dr. Utang Suwaryo yang menjelaskan istilah-istilah kebijakan dalam pengertian modern.

A. Istilah Kebijakan Publik

Hogwood dan Gun (dalam Parson:2005:15) menyebutkan ada 10 penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern yakni:

B. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas

Sebagai ekspresi untuk tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan

Sebagai keputusan pemerintah
Sebagai otorisasi formal
Sebagai sebuah program
Sebagai output
Sebagai outcome
Sebagai teori atau model
Sebagai sebuah proses

Istilah-istilah inilah yang seringkali dipergunakan oleh para ahli kebijakan saat ini untuk menyusun dan menggambarkan definisi atau pengertian kebijakan publik. Dari istilah tersebut kata "keputusan pemerintah" menjadi kata terlaris untuk susunan sebuah definisi kebijakan publik. Selanjutnya ada kata "sebagai sebuah proses" tentu sobat semua bisa melanjutkannya kan? Menyusun definisi tidaklah mudah. Harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya "tidak boleh terlalu umum, tidak boleh terlalu khusus, atau tidak boleh menggunakan kata yang sulit dipahami".

Dalam definisi kebijakan publik yang umum saat ini, dan bertebaran di dunia nyata maupun dunia nyata, biasanya definisinya memiliki 5 unsur

yang memang layak dan sesuai dengan kondisi real nya saat ini.

C. Kebijakan memiliki 5 unsur ;

1. Tujuan
2. Rencana
3. Program
4. Keputusan
5. Efek atau dampak

Artinya, kebijakan haruslah mengandung tujuan, rencana, program, agar tercapai keputusan yang baik secara mayoritas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana jika keputusan tersebut nantinya justru berdampak buruk bagi masyarakat? Nah disinilah nantinya peran para analis kebijakan. Insya Allah lain waktu akan saya bahas juga mengenai analisis kebijakan publik.

Menurut Harold D Laswell dan Abraham Kaplan, memberi arti kebijakan sebagai " a project program of goals, values and practise" (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah). Definisi ini lebih menekankan kepada hasil tanpa menjelaskan aktor kebijakan yang membuat keputusan. Namun aspek manajerialnya ada, hal ini mengacu kepada kalimat " praktek-praktek yang terarah".

James E Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah " a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Definisi ini menjelaskan actor kebijakan, yng digambarkan sebagai kelompok yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan. Di Negara Indonesia, lembaga legislatif adalah aktor yang paling awal untuk menyusun draft kebijakan-kebijakan yang akan dijadikan undang-undang dan peraturan.

Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (tjokroamidjojo,1976). Thomas R dye mendefinisikan kebijakan sebagai " *is whatever government*

choose to do or not to do" (apapaun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) Definisi ini dikenal sebagai definisi klasik. Teorinya identik dengan apa yang disebut sebagai administrasi negara, bukan administrasi publik.

Saya berasumsi bahwa teori ini mempercayakan kepada pemerintah secara mutlak untuk menyusun draft kebijakan. Hanya pemerintah saja. Sementara masyarakat, stakholder cenderung hanya sebagai formalitas untuk hadir. Beda halnya dengan era adminstrasi publik zaman sekarang yang diikuti dan diawasi oleh masyarakat penyusunannya.

David Easton memberikan arti kebijakan publik sebagai " the authoritative allocation of values for the whole society" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/ sah kepada seluruh anggota masyarakat. Teori ini sama halnya dengan teori Thomas R dye dari segi hak mutlak pemerintah.

D. Agenda Kebijakan Publik

Oleh karena masalah publik yang telah diidentifikasi begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempunyai sifat yang khas, lebih kongkrit dan terbatas jumlahnya.

Dalam hal ini, Lester dan Steward dalam Winarno (2002 : 60) menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria yakni :

Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan. Mempunyai sifat partikularitas, di mana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human interest.

Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dari masyarakat. Sedangkan Abidin (2004:107) menjelaskan bahwa "masalah publik dapat dibagi ke dalam masalah strategis dan masalah yang tidak strategis (taktis)". Masalah strategis adalah masalah yang antara lain memenuhi keempat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Luas cakupannya. Artinya, wawasan cakupannya tidak hanya meliputi satu sektor atau satu wilayah saja, tetapi meliputi beberapa sektor/wilayah.

2. Jangka waktunya panjang. Pengertian ini erat hubungannya dengan tujuan dari perencanaan jangka panjang. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa penyelesaian masalah memerlukan waktu yang panjang dan dampak yang ditimbulkan bisa jadi mempunyai akibat yang jauh ke depan.

3. Mempunyai keterkaitan yang luas. Substansi permasalahan dan cara-cara penyelesaiannya menyangkut banyak pihak dalam masyarakat

4. Mengandung resiko dan kemungkinan keuntungan yang besar. Rugi yang ditimbulkan atau hasil yang mungkin diperoleh akibat dari penanganan masalah tersebut cukup besar baik dalam nilai.

5. Banyaknya teori-teori seputar definisi kebijakan publik, maka yang paling mendekati kondisi real saat ini adalah teori nomor 2 berdasarkan asumsi lebih dekat dengan teori administrasi publik modern.



DAFTAR PUSTAKA

Leo Agustino, 2008, Dasar-dasar Kebijakan Publik

Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi 2)

Winarno,Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik

Hessel Nogi S. Tangkilisan, Implementasi Kebijakan Publik

M.Irfan Islamy. (2009), Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara

Suharno, 2010 – Dasar-dasar Kebijakan Publik

Thomas Dye, 1992 – Understanding Public Policy

Alif Lukmanul Hakim, 2007, Merenungkan Kembali Pancasila Indonesia, Bangsa Tanpa Ideologi, Newsletter KOMMPAK Edisi I 2007.http://alif lukmanulhakim.blogspot.com.

Abdurrohim, Pendidikan Sebagai Upaya Rekonstruksi Sosial, posted by Almuttaqin at11:41 PM, http://almuttaqin-uinbi2b.blogspot.com/2008/04/Abdurrohim

Awaludin Marwan, 2009, Menggali Pancasila dari Dalam Kalbu Kita. Jakarta

Bagus Takwin. 2003, Filsafat Timur; Sebuah Pengantar ke Pemikiran Timur. Jalasutra.Yogjakarta

Budiman, Hikmat, 2002, Lubang Hitam Kebudayaan , Kanisius, Yogyakarta

H. A.R Tilaar, 2002, Kebijakan Pendidikan, yogyakarta:Pusat Belajar

Haryatmoko, 2008, “Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis”, dalam buku Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika

Moh. Yamin,2009, Menggugat Pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz
Muhtar, 2009, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta GP Press
Rianti Nugroho,2008, Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi, Jogjakarta: Pustaka Pelajar,

UUD 1945 amandemen keempat, pasal 31 ayat 4.

ANONIM , 2005, Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Cemerlang.

Lesmana M.A., Prof. Dr. Tjipta . 2009 . DARI SOEKARNO SAMPAI SBY : Intrik & lobi Politik Para Penguasa . Jakarta : Gramedia

Kencana Syafiie, Inu, Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama

www.HistoryIndonesia.com

http://nusantaranews.wordpress.com/

www.wikipedia.com

http://ananda-jagadhita.blogspot.com/2011/05/masa-pemerintahan-habibie.html

http://klosetide.wordpress.com

KEBIJAKAN PUBLIK

PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN